

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO **next**

Edisi 13
Januari 2020



KOMINFO
connect

**SATUKAN
TEKAD**

TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widastuti

Wakil Pengarah:
Philip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati

Reporter:
Patricia Samantha S.
Annisa Bonita P.,
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamdza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Connect!

Meskipun sudah banyak tagline yang diciptakan untuk memberikan semangat melayani dan semangat bekerja bagi seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Informatika, tahun 2020 sebuah *tagline* baru diluncurkan: Kominfo Connect. *Tagline* ini digagas sendiri oleh Menteri Kominfo 2019-2024: Bapak Johnny G. Plate. Melalui *tagline* Kominfo Connect, Menteri Johnny mengharapkan seluruh jajaran Kementerian Kominfo bekerja lebih optimal membangun konektivitas melalui infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok tanah air.

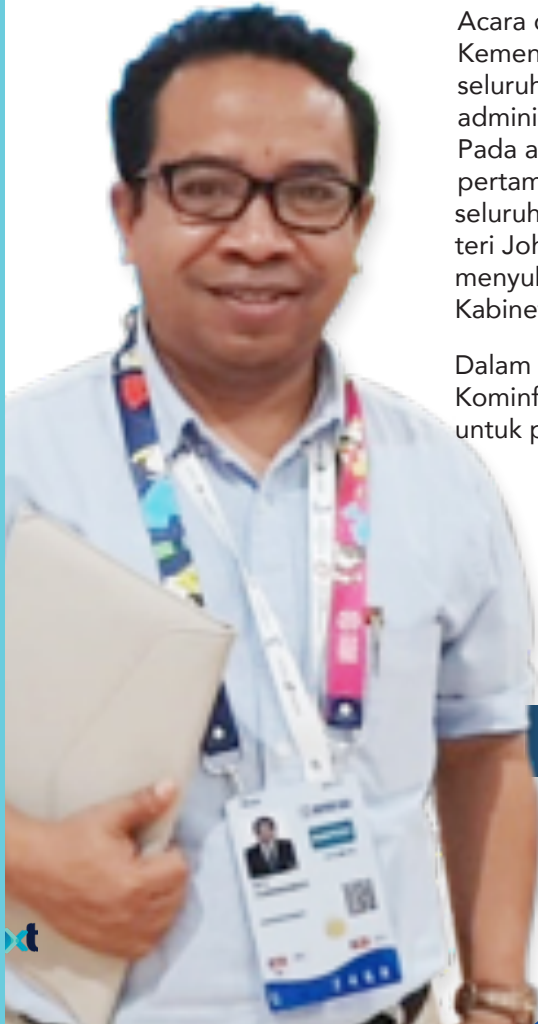
Semangat Kominfo Connect di bidang infrastruktur telekomunikasi dan informatika melalui sejumlah program prioritas seperti Palapa Ring, satelit multifungsi Satria, pembangunan akses internet di daerah 3T, penataan frekuensi, dan beberapa program lainnya. Tak hanya itu. Komitmen *connect* juga harus diwujudkan melalui program komunikasi publik yang efektif. Peran Kementerian Kominfo sebagai *government public relations* (GPR) harus diaktifkan agar setiap program dan kebijakan pemerintah bisa *connect* dengan rakyat. Kerja pemerintah *connect* dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Sebagai penanda komitmen *connect* tersebut, digelarlah acara akbar di awal tahun 2020, bertempat di Convention Ancol Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Acara dihadiri oleh sebanyak 2.750 ASN Kementerian Kominfo, mulai dari Menteri, seluruh pejabat tinggi pratama dan madya, administrator dan pengawas serta staf.

Pada acara tersebut, Menteri Johnny untuk pertama kalinya bertemu dengan hampir seluruh civitas Kementerian Kominfo. Menteri Johnny mengajak warga Kominfo untuk menyukseskan visi dan misi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam semangat Kominfo Connect, majalah Kominfo Next edisi ini kami ketengahkan untuk pembaca.



Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

Daftar Isi

2 Surat dari MMB 9

6 Rak
Buku

4 Perspektif
Menteri

8 Kominfopedia

10 Teknologi
& Gadget

14 Liputan Khusus

20 KomEvent

24 Opini

50 Sorotan Media

55 Portal

62 Jurnal
Foto

72 Lintas
Kominfo

75 Tokoh

82 **Liputan Utama**
ASN Kominfo
yang Pancasilais &
Penggerak Digitalisasi
Indonesia

Konektivitas adalah Fitrah dan Amanah Kita

Apakah tidak telat memunculkan semboyan *connect* sekarang? Jargon ini sudah banyak digunakan sejak tiga dekade lalu ketika revolusi teknologi seluler memungkinkan *handset* dan layanan operator menjadi terjangkau bagi lebih banyak orang. Telekomunikasi menjadi sangat murah sehingga memungkinkan semua orang untuk terkoneksi dengan lebih mudah. Bahkan kemudian komunikasi yang dilakukan berbentuk multimedia, tak lagi hanya berwujud suara atau teks.

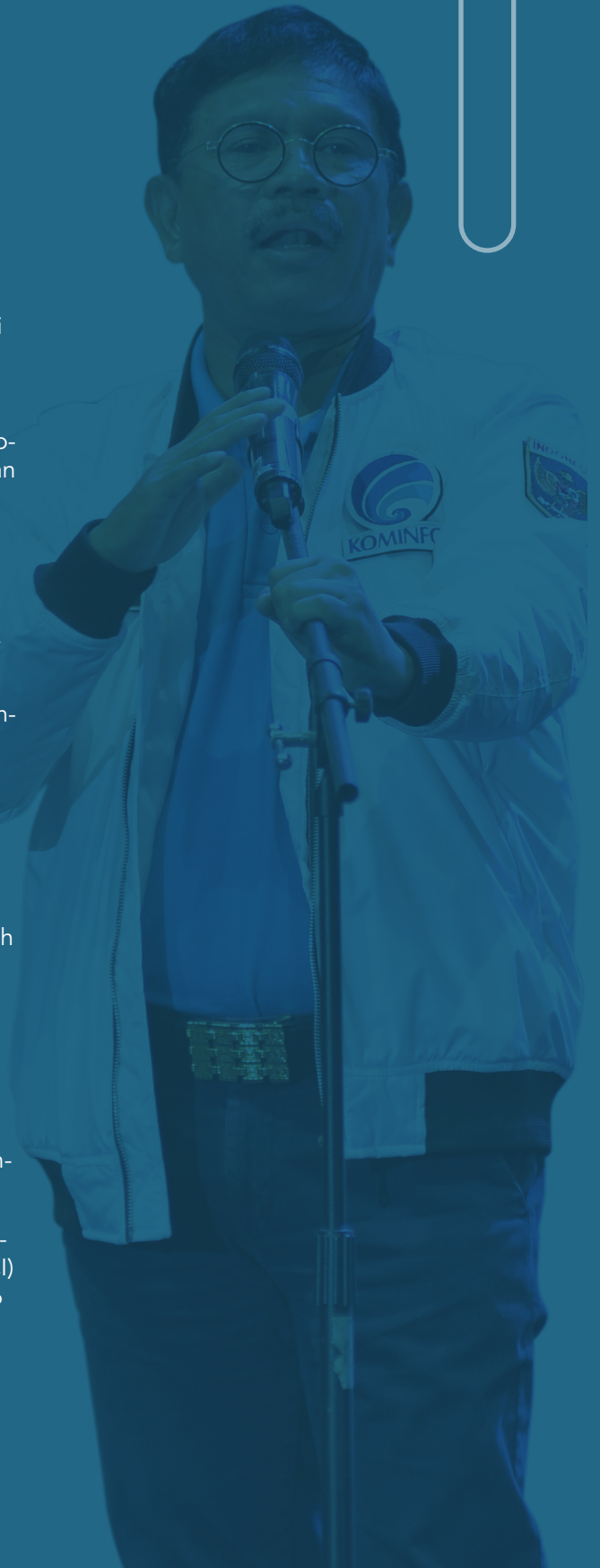
Internet kemudian hadir dalam genggaman kita. Berhubungan dengan seluruh dunia cukup dilakukan dari perangkat mungil di telapak tangan. *Connected*, sejak saat itu, disebut sebagai fitrah baru umat manusia.

Lalu mengapa kita memilih seperti menghidupkan kembali semboyan ini?

Sebagai pelayan masyarakat, kita harus bisa melihat sampai jauh ke bawah permukaan sehingga bisa ikut merasakan denyut kehidupan bangsa, sampai ke pelosok-pelosoknya. Masih banyak saudara-saudara kita yang hanya bisa terpana dengan jargon-jargon digitalisasi yang banyak berseliweran disemburkan oleh produk-produk dan tokoh-tokoh kondang pendengunya (*buzzer*), sementara bagi mereka kondisi-kondisi itu masih jauh panggang dari api.

Kita yang harus bisa merasakan dan mengetahui kebutuhan saudara-saudara kita yang belum *connected* tersebut. Masih ada saudara-saudara kita yang masih mengalami *blankspot* sinyal komunikasi dan masih hanya baru bisa menikmati teknologi generasi 2G.

Indonesia masih berlutut di urutan ke-62 dari 79 negara yang disurvei, dalam Global Connectivity Index (GCI) 2019 yang dikeluarkan oleh Huawei. Skorinya hanya 36 dari skor maksimal 120, di bawah rata-rata global. Hanya cakupan 4G yang menunjukkan peningkatan skor. Cakupan 4G di Indonesia dan juga jumlah total pengguna internet, memang terus meningkat.



Laporan GCI ini memberi skor tertinggi untuk Indonesia dalam hal penetrasi ponsel cerdas dan jumlah pengguna layanan seluler. Sedangkan perkembangan *fixed network* terhitung lambat. Menurut mereka, hal ini akan mengakibatkan kurangnya akses *broadband* yang berkualitas tinggi yang akan menghambat upaya menumbuhkan industri digital.

Dengan menciptakan akses komunikasi yang lebih baik ke telekomunikasi dan informasi, peluang bisnis dan pekerjaan berbasis internet (*e-commerce*) akan terbuka. Pada gilirannya, ini akan membuat pasar tenaga kerja Indonesia lebih efisien, dan akan meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia di pasar global.



Pada tingkat pasar tenaga kerja inilah kita juga perlu bertindak. Kita harus menyediakan konektivitas yang memadai bagi angkatan kerja kita agar mereka mendapatkan pengetahuan dan *benchmark* keterampilan digital yang memadai. Konektivitas dalam hal ini bukan melulu dalam hal infrastruktur, namun juga konektivitas kepada akses ilmu pengetahuan dan teknologi digital, akses kepada lembaga-lembaga yang *concern* dengan talenta digital, akses kepada kurikulum yang paling tepat untuk menghadapi gelombang digitalisasi, dan sebagainya.

Memang digitalisasi sering diasosiasikan dengan pemangkas besar-besaran tenaga kerja dan sumber daya manusia. Namun jangan terlena dengan anggapan tersebut, karena populasi kita yang besar juga diincar sebagai pasar untuk *e-commerce* dan ekonomi digital. Persentase penduduk yang terhubung ke Internet

adalah sumber daya yang sangat dahsyat dalam ekonomi digital, baik sebagai pelaku maupun pasar. Kita memiliki populasi 260 juta orang, menurut data APJII, 171 juta di antaranya adalah pengguna internet. Dengan jumlah pengguna sebesar itu, dalam hitungan sejumlah lembaga, Indonesia menempati posisi keempat atau kelima terbesar di dunia.

Jumlah penduduk juga dihitung sebagai faktor pendukung utama kebesaran ekonomi digital kita. Forbes dalam artikel "Indonesia: The New Tiger of Southeast Asia", menyebutkan tiga alasan yang membuat Indonesia bisa menjadi "macan baru" di Asia Tenggara. Pertama, usia penduduk Indonesia relatif muda yakni rata-rata 29 tahun. Sebanyak 60% dari total populasinya berusia di bawah 40 tahun. Kedua, 60% penduduk dewasa di Indonesia memiliki ponsel pintar (*smartphone*). Ketiga, Indonesia adalah salah satu negara den-

gan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Sekitar 95% atau 142 juta dari total 150 juta pengguna di Indonesia mengakses internet lewat ponsel.

Connect-nya Indonesia adalah *connect*-nya seperempat miliar orang. *Connect*-nya Indonesia adalah pemecah kebuntuan untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau, lautan, gunung, dan lembah yang selama ini terpisah-pisah. *Connect*-nya Indonesia adalah jawaban atas kerinduan untuk kembali mewujudkan kebesaran peradaban nenek moyang yang menyatukan Nusantara.

Jadi konektivitas adalah fitrah dan amanah Bumi Pertiwi kita sejak zaman dulu kala sampai selama-lamanya. Kita harus selalu bersyukur Kominfo mendapat amanah untuk mewujudkan itu semua. Cara bersyukur terbaik, menurut hemat saya, adalah mengerjakan semua itu sebaik-baiknya, dengan KOMINFO CONNECT.

“

Perpustakaan Kominfo



Penulis :
GM Susanto

The Power of Digital Marketing

Buku ini dapat membantu anda untuk belajar banyak jurus praktis yang membumi seperti *zero marketing*, *triple earning*, *simple selling*, dan masih banyak strategi yang bisa anda terapkan untuk menekan *budget* promosi Anda dengan hasil penjualan berlipat dari sebelumnya.

Rak Buku

JANGAN MEMBUAT MASALAH KECIL JADI MASALAH BESAR

Cara Mudah
Mencegah Masalah Kecil
Menggangu Hidup Kita

RICHARD CARLSON

Penulis :
Dr Richard Carlson

Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar : Cara Mudah Mencegah Masalah Kita Menggangu Hidup Kita

Banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi kita memperlakukannya sebagai masalah besar. Sebenarnya, dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar.

Dengan gaya tulisan yang mudah dipahami, buku ini menyajikan cara-cara membentuk perspektif yang lebih positif tersebut sehingga kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan lebih peduli. Hidup kita akan lebih terfokus pada masa kini, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik, dan batin kita akan menjadi lebih tenang.

📍 **Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo**

**Senin s.d Jum'at
08.00 - 16.00 WIB**

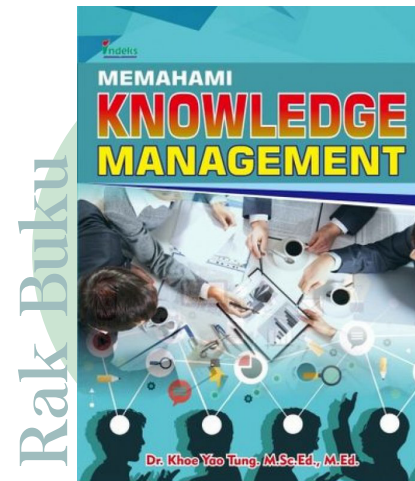


Penulis :
Naning Pranoto

Mei Merah 1998 : Kala Arwah Berkisah

Dalam kobaran api Tragedi Mei 1998 di Jakarta yang bersimbah darah. Martabat keperempuannya dijarah para lelaki bedebah, masuk ke liang lahat berkafan hitam-kelamnya sejarah. Ia menunggu keadilan dalam membusuk jasad yang berarwah gentayangan resah, Jabang bayi yang dikandungnya lahir berayah siapa, entah. Kini ia tumbuh kembang menjadi gadis berlabel haram jadah, menyusuri setiap kelok jalan untuk mencari tahu jejak ibunya yang berair mata nanah. Untuk apa hidup jika hanya dicekik dan dicabik derita yang tak pernah sudah? Karena, perempuan itu bukan sampah, perempuan itu rahim generasi yang membangun bangsa dan negeri megah. Maka, selayaknya mendapat ruang hak hidup untuk eksis berkiprah.

Novel ini terinspirasi oleh eksese kemelut menjelang Era Reformasi Mei 1998 yang memperjuangkan perubahan bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum yang terkungkung selama empat windu pemerintahan Orde Baru. Tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam novel ini fiktif belaka.



Penulis :
Khoe Yao Tung

Memahami *Knowledge Management*

Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan sumber daya penting bagi organisasi. Pengetahuan dapat diungkapkan, dibagikan, disimpan, dan dipindahkan ke konteks lain untuk mendapatkan pilihan-pilihan tindakan terbaik pada masa mendatang.

Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) adalah proses yang sistemik dan spesifik untuk memperoleh, mengorganisasi, dan mengkomunikasikan pengetahuan milik karyawan sehingga para karyawan lain dapat menggunakannya secara lebih efektif dan lebih produktif pada pekerjaan mereka.

Manajemen Pengetahuan menjadi faktor kunci bagi organisasi bisnis dan organisasi nirlaba untuk mempertahankan keunggulan bersaing (*competitive advantages*) di lingkungan yang sangat mudah bergejolak pada saat ini.

Buku ini menyisipkan studi kasus sebagai inspirasi memahami teks yang ada. Buku ini juga menjelaskan tentang perspektif manajemen pengetahuan, siklus manajemen pengetahuan, dan lain-lain.

#KOMINFOEDIA

Artificial Intelligence

Halo SobatKom! Pernah dengar kan, rencana Presiden Jokowi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk beberapa posisi layanan pemerintahan? Menurut Presiden, penerapan teknologi AI dapat membantu proses efisiensi birokrasi di sisi hal-hal teknis, administrasi, dan pengolahan data.

Penerapan teknologi AI untuk efisiensi birokrasi ini memang sudah diterapkan di berbagai negara maju. Contohnya, Cincinnati Fire Department di Amerika Serikat menganalisa data dengan AI untuk mengoptimalkan respon layanan darurat. Pemerintah Australia juga sudah menggunakan AI sebagai asisten virtual untuk menjawab pertanyaan publik di beberapa situs pemerintahan. Negara tetangga kita pun, Singapura, memiliki National Artificial Intelligence (AI) Strategy sebagai bagian dari Smart Nation Initiative yang mengkaji rencana penerapan AI untuk sektor publik.

Lalu sebenarnya apa sih AI itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artificial intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.

Istilah "artificial intelligence" pertama kali dicetuskan tahun 1956 oleh Professor John McCarthy, seorang ilmuwan komputer Amerika Serikat saat ia mengajar di Dartmouth Conference. Lalu di tahun 1958, Prof. McCarthy menciptakan LISP, bahasa pemrograman

komputer yang kemudian menjadi standar bahasa pemrograman AI. Penggunaannya bukan hanya di bidang robotik dan aplikasi keilmuan, tapi juga di berbagai layanan internet-based seperti alat pendeteksi penipuan kartu kredit hingga penjadwalan penerbangan.

Bukan cuma itu. SobatKom pasti familiar dengan asisten pribadi virtual seperti Siri, Cortana, Alexa, atau Google Assistant? Asisten virtual yang bisa membantu SobatKom menemukan informasi di web, mendapatkan petunjuk arah, mengirim pesan, mengontrol lampu, melaporkan lalu lintas dan cuaca, menjawab pertanyaan, hingga mengatur jadwal SobatKom ke kalender.

Nah, bahasa komputer ciptaan Prof McCarthy tadi merupakan cikal bakal pengembangan teknologi voice-recognition seperti Siri dan Google Assistant tersebut. Kemampuan AI yang dapat bekerja "tanpa lelah" dan tidak mengalami "penurunan tingkat konsentrasi" seperti halnya manusia diakui dapat menciptakan efisiensi kerja. Contohnya yang dilakukan oleh Fokoku Mutual Life Insurance. Pada 2017 lalu, perusahaan asuransi asal Jepang ini mengganti 34 karyawannya untuk menghitung pembayaran asuransi dengan teknologi AI Watson Explorer milik IBM, karena mereka percaya AI akan meningkatkan produktivitas hingga 30% dan efisiensi biaya hingga 140 juta Yen.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah menggunakan teknologi AI pada Layanan Chatbot dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Diluncurkan April 2019 lalu, layanan yang diberi nama Chatbot Anti Hoaks ini adalah piranti lunak berupa program komputer yang terkoneksi dengan aplikasi pesan instan Telegram melalui akun @chatbotantihoaks. Chatbot Anti Hoaks dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih diragukan kebenarannya. Informasi klarifikasi hoaks yang akan disajikan melalui chatbot berasal dari database Mesin AIS Kemkominfo.

<https://www.brookings.edu/blog/techtank/2017/06/23/learning-from-public-sector-experimentation-with-artificial-intelligence/>
<https://www.thequandian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17906/biases-pers-no-79/kominfo042019-terting-perengi-hoaks-dan-ujaran-kebencian-kominfo-luncurkan-layanan-chatbot/Diarsip_pers

KOMINFOPEDIA ON YOUTUBE



 KominfoTV



TEKNO LOGI GAD GET

Tahun baru saja berganti, namun hiruk pikuk perayaan kali ini tidak semeriah biasanya. Suasana pergantian tahun yang diiringi turunnya hujan deras mengakibatkan terjadinya banjir di berbagai wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memberikan pernyataan bahwa curah hujan yang tinggi akan terus melanda Indonesia hingga bulan Maret 2020.

Nah, kali ini kita akan membahas berbagai perangkat berteknologi terkini yang dirancang untuk menghadapi bencana banjir, mulai dari alat transportasi yang bisa digunakan baik di darat maupun air hingga rumah anti banjir.

Sepeda Motor Amfibi



Sumber :
<https://gibbssports.com/biski>

Sepeda motor atau mobil tidak dirancang untuk dapat melewati banjir yang tinggi sehingga berakibat jalur transportasi menjadi lumpuh. Memiliki kendaraan amfibi yang dapat menempuh jalur darat dan air bisa menjadi pilihan SobatKom.

Biski adalah kendaraan roda dua yang dapat berjalan di darat dan air. Dibuat oleh Gibbs, produsen berbagai jenis kendaraan amfibi, Biski memiliki kekuatan 55 tenaga kuda saat berjalan di atas air dengan kecepatan maksimal 60 kilometer per jam. Sementara di darat, Biski dapat melesat 130 kilometer perjam. Untuk berpindah dari mode darat ke mode air pun dapat dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, kurang dari 5 detik.

Namun Biski yang merupakan satu-satunya kendaraan amfibi roda dua saat ini masih berupa kendaraan konsep dan belum dijual untuk umum serta belum ditentukan harga jualnya. Sebagai perbandingan, Gibbs sebelumnya telah membuat kendaraan amfibi roda empat dengan nama Quadski yang dijual di kisaran 550juta rupiah.

Penahan Banjir



Sebuah perusahaan bernama All Weather Industries

Meluncurkan produk bernama **Dam Easy Flood Barriers** yang berguna untuk mencegah air banjir masuk ke dalam rumah. Produk yang berasal dari Irlandia ini bekerja dengan sangat sederhana namun efektif untuk mencegah masuknya air, dan dapat dikemas serta dibawa dengan mudah dalam satu tas kecil.

Instalasi produk ini pun dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa langkah sederhana. Dengan terpasangnya penahan banjir ini, maka kita tidak perlu khawatir lagi air banjir bisa masuk ke dalam rumah. Alat ini dijual seharga Rp 11juta di negara asalnya, namun beberapa *marketplace* lokal ada yang menjualnya dengan harga kisaran Rp 19juta.



Sumber :
<https://www.dameasyfloodbarriers.com/item/dam-easy-flood-barrier-door-dam/527>

Bagaimana jika ada rumah yang benar-benar anti banjir alias bisa berdiri mengapung di atas air?

Sebuah perusahaan arsitektur asal Inggris, BACA Architects membuat sebuah rumah yang diklaim sebagai satu-satunya **rumah amfibi**.

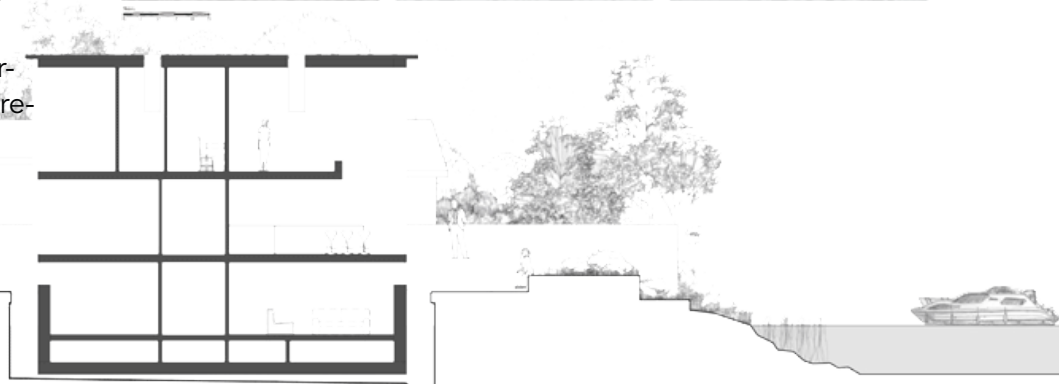
Rumah dengan luas 225 meter persegi dan dilengkapi 3 kamar tidur ini cocok untuk dibangun di tempat yang selalu dilanda banjir. Rumah ini memiliki 3 buah lantai, termasuk 1 lantai *basement* yang dapat mengapung jika terjadi banjir.

Rumah ini dibangun terpisah dari fondasi dan dirancang berfungsi seperti dermaga di pelabuhan, sehingga jika terjadi banjir struktur bangunan dapat mengapung di atas air serta dapat mengatasi banjir hingga setinggi 2,5 meter. BACA Architects menyatakan bahwa bangunan yang terletak di kota Buckinghamshire, Inggris ini merupakan salah satu bukti bahwa meskipun berada di area yang dikelilingi air, mendirikan bangunan yang aman dan kering tidaklah mustahil.

Sumber :

<https://www.baca.uk.com/amphibious-house.html>

<https://www.dezeen.com/2016/01/20/baca-architects-bouyant-amphibious-house-river-thames-buckinghamshire-floating-architecture/>



Rumah Amfibi





Menkominfo Paparkan Strategi Komprehensif Pemerintah untuk Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital

Liputan Khusus
World Economic Forum
(WEF) Annual Meeting
2020 Davos, Swiss

MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menjadi pembicara pada sesi-sesi diskusi World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2020 di Davos, Swiss. Perhelatan tahunan ini diselenggarakan selama empat hari 21 s.d. 24 Januari 2020.

Delegasi dari Indonesia beranggotakan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahli Lahadalia; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto; dan Asisten Deputi mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, H.E. Wishnutama Kusubandio.

Dalam forum ini Menteri Johnny juga bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia. Pejabat yang melakukan pertemuan bilateral dengan

Menteri Johnny di antaranya adalah Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Kerajaan Arab Saudi, Abdullah Alswaha; CEO Youtube, Susan Wojcicki; CEO Google Cloud, Thomas Kurian; Presiden Google Asia Pacific, Scott Beaumont; dan Presiden Qualcomm, Cristiano R Amor.

Selain itu Menkominfo Johnny juga berdiskusi empat mata dengan Profesor Klaus Schwab, Pendiri dan Executive Chairman WEF. Profesor Klaus Schwab dikenal dengan bukunya *The Fourth Industrial Revolution*.

World Economic Forum (WEF) Annual Meeting merupakan konferensi tingkat tinggi dan dinilai paling representatif di dunia. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 3.000 kepala negara, pimpinan perusahaan global, pemimpin organisasi politik, penemu-penemu di bidang sains dan kebudayaan dari 90 negara termasuk 500-an jurnalis seluruh dunia.

Talkshow di Paviliun Indonesia

Masih dalam rangkaian WEF 2020, Pemerintah Indonesia juga mendirikan Indonesia Pavilion yang bertempat di Promenade 55, Davos Platz 7270. Paviliun ini dibuka pada 21 Januari pukul 13.30 waktu setempat oleh para Menteri Republik Indonesia dan Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Darmansyah Hadad.

Indonesia Pavilion di Davos, Swiss, diusung dengan tema *Unity in Diversity: Partner for Action* yang merupakan kegiatan 4 hari bersamaan

dengan penyelenggaraan WEF Annual Meeting 2020. Paviliun Indonesia diadakan dalam rangka memanfaatkan berkumpulnya para pemimpin dan perusahaan kelas dunia.

Setelah dibuka acara di Indonesia Pavilion dilanjutkan dengan sesi dialog pertama yang menampilkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Ketua BKPM, Bahil Lahadalia; dengan moderator Dubes Muliaman Darmansyah Hadad dengan tema gambaran umum tentang ketahanan ekonomi Indonesia.

Tema-tema khusus yang dikupas di sini antara lain tentang strategi perdagangan Indonesia, ekonomi digital, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan smart city. Semua tema sesi tersebut dibalut dalam nuansa tema WEF 2020 yaitu *"Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World"*.

Selain sesi-sesi diskusi, pada hari kedua juga diselenggarakan Indonesia Night yang merupakan kesempatan untuk menampilkan budaya, kuliner, dan kesenian Indonesia serta menjadi ajang untuk menjalin networking.

Di paviliun ini digelar pula sesi-sesi workshop atau talkshow dari para Menteri Indonesia yang hadir di Davos maupun pimpinan perusahaan nasional yang dipandang memiliki peran signifikan baik dalam melakukan bisnisnya maupun terhadap perekonomian Indonesia. Adapun sesi-sesi tematik yang dihadirkan menyesuaikan dengan tema WEF 2020 yaitu *"Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World"*.

Bertempat di Indonesia Pavilion, Menteri Johnny G Plate menyampaikan pandangannya dalam talkshow bertema *"Spotlight on Indonesia Unicorn and Digital Economy Advancement: The Big Picture"*.

Tema ini diambil untuk memberikan gambaran lengkap kepada dunia tentang perjalanan unicorn dan decacorn Indonesia hingga mencapai titik saat ini. Juga disampaikan pandangan pemerintah, dalam hal ini Menkominfo, terkait dukungan untuk ekonomi digital melalui regulasi maupun pengembangan ekosistem digital.

Selain itu diharapkan peserta mendapatkan gambaran dan optimisme tentang perkembangan industri ekonomi digital di Indonesia yang berdampak luas bagi perekonomian tidak saja Indonesia, namun secara regional maupun global.

Selain bersama Menkominfo, dialog dan talkshow di Indonesia Pavilion juga menampilkan Chairman KADIN, Rosan Perkasa Roeslani; Co-founder Traveloka, Albert; Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata; dengan moderator Yasha Chatab, Overseas Development Director dari WIR Group. Peserta yang hadir berasal dari C-Level yang mengikuti WEF Annual Meeting 2020.

Selain bersama Menkominfo Johnny G Plate, sesi-sesi dialog yang diselenggarakan di Indonesia Pavilion juga menghadirkan wakil-wakil Indonesia lainnya. Wakil

Indonesia tersebut adalah Ketua BKPM, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung penuh Kementerian Luar Negeri.

Diskusi dengan Tema The Big Picture

Pada hari kedua pelaksanaan World Economic Forum di Davos, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menjadi narasumber pada diskusi semipanel dengan tema Spotlight On Indonesia Unicorns And Digital Economy Advancement: The Big Picture. Bersama Menkominfo, ikut pula hadir sebagai narasumber Founder Tokopedia, William Tanuwijaya; Co-founder Traveloka, Albert; dan Presiden Direktur Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Johnny menguraikan perkembangan startup, unicorn, dan decacorn di Indonesia, yaitu tentang bagaimana Indonesia merupakan salah satu tanah yang subur

untuk pertumbuhan startup. Menurut perhitungan Startup Ranking, Indonesia menduduki urutan nomor lima dunia dengan jumlah startup 2.193 buah pada tahun 2019, setelah Amerika Serikat, India, dan Kanada. Posisi ini bahkan mengungguli negara-negara maju lain seperti Jerman, Australia, Prancis, dan Spanyol yang membuntuti di urutan-urutan sesudahnya.

Selain unggul dalam hal kuantitas, Indonesia juga tangguh dalam hal kualitas startup. Terbukti dengan munculnya empat unicorn (valuasi lebih satu juta dollar AS) dan satu decacorn (valuasi lebih dari sepuluh juta dollar AS). Bahkan valuasi pasar para decacorn dan unicorn Indonesia tersebut, Gojek (11 miliar USD), Tokopedia (7 miliar USD), Traveloka (4,5 miliar USD), OVO (2,9 miliar USD), dan Bukalapak (12 miliar USD), mendominasi dunia startup di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Johnny membeberkan pengalaman pemerintah RI dalam memfasilitasi dan mengakselerasi tumbuhnya pelaku usaha bisnis digital tersebut. Untuk tingkat awal, atau



Indonesia merupakan salah satu tanah yang subur untuk pertumbuhan startup. Indonesia juga tangguh dalam kualitas, terbukti dengan munculnya 4 unicorn dan 1 decacorn yang mendominasi dunia startup di kawasan Asia Tenggara.



disebut tingkat seed, Kominfo bersama ekosistem menggelar Gerakan 1000 Startup untuk mendukung pertumbuhan startup lokal baru. Pada level selanjutnya, digelar program NextICorn (Next Indonesia Unicorn), dengan tujuan untuk mencari startup yang potensial untuk mendapatkan pendanaan seri B. Pada tahap tertinggi, pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya bagi para unicorn dan decacorn melalui instrumen pengembangan sumber daya manusia pendukung, regulasi, dan infrastruktur.

Gerakan 1000 Startup ditargetkan untuk mencetak seribu startup sampai dengan tahun 2024. Program ini dititikberatkan untuk membekali para startup dengan orientasi terhadap tahap-tahap bisnis startup yang baku, yaitu melalui event ignition, workshop, hackspint, bootcamp, dan incubation. Sedangkan NextICorn digagas untuk mempertemukan antara investor dengan startup dengan cara menyelenggarakan event konferensi di dalam dan luar negeri agar mereka bisa saling menjajaki kemungkinan - kemungkinan kerja sama.

Peserta diskusi WEF yang hadir di Indonesia Pavilion juga mendapatkan rincian program-program yang telah digelar pemerintah untuk memberikan dukungan kepada tumbuhnya ekosistem tersebut. Pada pembangunan bidang infrastruktur, Kominfo telah menyelesaikan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring sepanjang 12.148 kilometer, mengelola 6 satelit dan menyiapkan pengayaan 2



satelit baru, pendirian BTS baru untuk menutup blangko spot sebanyak 1.067 buah sampai kuartal ketiga tahun 2019.

Dalam sektor pengembangan sumber daya manusia, bersama ekosistem Kominfo menyelenggarakan pengembangan keterampilan digital dasar melalui gerakan nasional Siberkreasi. Untuk tingkat madya, diselenggarakan program Digital Talent Scholarship yang telah menjangkau puluhan ribu orang penerima beasiswa. Sedangkan untuk mendorong keterampilan digital level advance digelar program Digital Leadership Academy.

Dukungan melalui sektor regulasi digelar dengan cara memangkas peraturan-peraturan yang menghambat atau tumpang tindih dalam bidang ekonomi digital, mendorong pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan UU lainnya, serta mendukung penyusunan omnibus law untuk mendorong masuknya investasi.

Pengembangan Teknologi 5G Bersama Qualcomm

Pada hari ketiga penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos, Swiss, Menkominfo Johnny G Plate mengadakan pertemuan dengan President Qualcomm Cristiano Amon.

Pertemuan yang berlangsung di Paviliun Indonesia ini membahas sejumlah hal, di antaranya penajagan kerjasama pengembangan teknologi 5G. Qualcomm merupakan salah satu perusahaan teknologi global yang tengah melakukan berbagai inovasi teknologi digital.

"Kami tertarik untuk mendukung pengembangan teknologi 5G di Indonesia. Lebih dari itu, kami ingin meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang dengan pemerintah Indonesia," harap Cristiano Amon.

Menteri Johnny menyampaikan bahwa Indonesia berpeluang besar dan sedang bersiap untuk menjadi digital hub di kawasan Asia. "Salah satu kunci untuk menjadi terdepan di era digital adalah kesiapan infrastruktur, diantaranya dengan penguatan konektivitas melalui teknologi 5G," jelas Menteri Kominfo.

Merespons tawaran kerja sama tersebut, Menteri Kominfo menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerjasama dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia, misalnya dalam inisiatif pembangunan ibukota baru.

Hal senada juga disampaikan Menteri Johnny saat menerima VP Global Public Policy AWS Michael Punke. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membicarakan beberapa isu krusial seperti realisasi rencana investasi AWS di Indonesia, perlindungan data pribadi, dan dukungan AWS terhadap ekonomi digital Indonesia. Kembali Menteri Kominfo menekankan bahwa setiap kerja sama harus selalu menghadirkan nilai tambah bagi Indonesia.

conomic Forum 2020, Davos, Switzerland



Pertemuan dengan dua raksasa teknologi global tersebut menjadi agenda penutup sejumlah pertemuan maraton yang dilakukan oleh Menkominfo di ajang WEF 2020. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Widodo Muktiyo menyebutkan sepanjang pelaksanaan World Economic Forum 2020 sudah banyak sekali hasil positif yang didapat Pemerintah Indonesia.

"Kegiatan di Davos ini menjadi sangat efektif. Semua menteri yang datang melakukan serangkaian negosiasi dan lobi dengan mitra, baik antar negara maupun juga antar company dan ini mudah-mudahan bisa menjadi babak baru tumbuhnya ekonomi Indonesia yang berbasis pada teknologi dan menjadi kekuatan kita untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan di Davos 2020 ini," jelas Widodo Muktiyo.

tersebut. "Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Indonesia untuk mengenalkan budayanya. Itu membuat saya selalu menanti kehadiran Indonesia Night tiap tahunnya. Menurut saya, ini salah satu acara yang paling dinantikan dalam setiap perhelatan WEF. Konsistensi Indonesia untuk selalu hadir tiap tahunnya dan mengisi dengan inisiatif promosi budaya ini sungguh luar biasa," tutur Prof Klaus Shwab dalam sambutannya.

Topi Khas Rote dan Kain Tenun NTT

Pendiri dan Chairman World Economic Forum Davos, Prof. Klaus Schwab, yang juga penulis buku dan penggagas "The Fourth Industrial Revolution" menghadiri Indonesia Night yang diselenggarakan dalam rangkaian WEF Annual Meeting 2020. Bahkan Prof Klaus Schwab yang hadir bersama istri juga menyampaikan sambutan dan ikut berfoto dengan mengenakan topi khas Rote dan kain khas Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Nuansa khas Nusa Tenggara Timur, yang notabene merupakan daerah asal Menkominfo, yang mencuat kental malam itu, mendapat pujian dari Chairman WEF

Indonesia Night diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum pertemuan tingkat tinggi para pemimpin, tokoh bisnis dunia, dan media, di ajang World Economic Forum Annual Meeting di Davos. Mengambil tempat di Hotel Morosani, Indonesia Night menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan kesenian Indonesia, serta menjadi ajang untuk menjalin networking dengan peserta WEF dari seluruh dunia.

Acara Indonesia Night yang digelar di hari kedua penyelenggaraan WEF Annual Meeting 2020 di Davos ini dibuka pada pukul tujuh malam waktu setempat dengan pertunjukan kreasi kostum nasional dan disambung dengan ucapan selamat datang oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kesenian yang ditampilkan pada acara ini adalah gamelan yang mengundang decak kagum karena dimainkan oleh orang-orang asing. (***)



KOMINFO connect

Satukan Tekad!

Hubungan kerja antar pegawai dalam sebuah organisasi perlu terus dibina. Hubungan yang baik akan menciptakan iklim kerja organisasi yang nyaman dan mendukung kinerja pegawai yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap kemajuan dan kinerja organisasi. Fasilitas komunikasi antar pegawai di lingkup internal organisasi, menjadi salah satu tugas Biro Hubungan Masyarakat terutama dalam kaitannya dengan hubungan internal. Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Hubungan Masyarakat bersama dengan seluruh satuan kerja di Kementerian

Kominfo menyelenggarakan temu akbar pegawai Kementerian Kominfo bertajuk Kominfo Connect 2020. Kegiatan temu akbar pegawai rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kementerian Kominfo mulai tahun 2018. Tahun 2018, kegiatan dilaksanakan di Hotel Red Top Pecenongan dengan tajuk Kominfo Now. Tahun 2019, temu akbar pegawai dilanjutkan di Hall Basket Serayan dengan tajuk Kominfo Next. Kominfo Connect menjadi tajuk temu akbar pegawai tahun 2020 menjadi awal baru di bawah kepemimpinan Menkominfo Johnny G. Plate.





Kominfo Connect merujuk pada harapan agar segenap Sivitas Kementerian Kominfo menjadi garda terdepan dalam menghubungkan seluruh elemen bangsa dan wilayah. Baik dengan infrastruktur telekomunikasi, penyiaran, layanan digital, layanan informasi, pengembangan sumber daya manusia dan layanan publik yang akuntabel dan berkualitas. Kominfo Connect menjadi target bersama Sivitas Kementerian Kominfo untuk memberikan kontribusi dalam mendukung prioritas Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin.

Perhelatan yang diselenggarakan selama satu hari ini menghadirkan ragam aktifitas dari yang sifatnya serius, permainan, hiburan, inspiratif sampai dengan aktifitas yang menguji kekompakan unit satuan kerja. Konsep pengemasan acara dibuat padat dan bervariasi dengan tujuan agar para Peserta tidak merasa bosan, aktif dan tetap stay tune pada kegiatan ini.

Kominfo Connect diselenggarakan pada Hari Kamis, 30 Januari 2020 bertempat di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta Utara. Acara Kominfo Connect dihadiri oleh para pegawai di 8 (delapan) Satuan Kerja Eselon 1 di Lingkungan Kementerian dengan total peserta sebanyak 2.715 peserta.

Geliat aktivitas Kominfo Connect dimulai dari pukul 07.00. Para peserta langsung dihibur dengan penampilan vocal group Kementerian Kominfo yang pada pagi itu menampilkan Theme Song Kominfo Connect 2020 dan mengajak seluruh peserta untuk ikut menyanyi bersama.



Penampilan Vocal Group KaCe20 yang membawakan official theme song Kominfo Connect 2020



Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastruti membuka secara resmi kegiatan Kominfo Connect dengan pesan yang dibagikan kepada semua ASN yaitu untuk meningkatkan kerjasama, kekompakan serta motivasi. ASN Kementerian Kominfo dituntut untuk bisa memberikan outcome yang nyata ke masyarakat.

“

Indonesia
ada karena
keberagaman,
jika tidak ada
keberagaman
tidak perlu ada
Indonesia

Kominfo Connect menyajikan talkshow yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dalam talkshow yang dimoderatori oleh news anchor Zilvia Iskandar ini, hadir Dr. Rima Agristina selaku Deputy Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Alissa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian; dan Zulfan Lindan selaku Staf Khusus Menkominfo. Talkshow ini diselenggarakan untuk lebih menanamkan jiwa nasionalisme serta update-update terbaru mengenai isu-isu yang berkenaan dengan Pancasila dan bahaya radikalisme.

Alissa Wahid menjadi salah satu pembicara pada talkshow mengenai anti radikalisme

Keynote speech Menkominfo Johnny G. Plate merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu dalam perhelatan Kominfo Connect 2020. Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya Menteri Johnny berbicara secara langsung kepada seluruh Pegawai Kementerian Kominfo dan menyampaikan arahan serta program-program yang akan dijalankan di masa kepemimpinannya. Dalam awal sambutannya, Menteri Johnny mengingatkan kepada para ASN bahwa hanya ada satu Visi dan Misi negara, yaitu Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tugas kita bersama untuk kemudian melaksanakannya. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, ASN Kementerian Kominfo harus menjadi turbin untuk mendorong laju dan kemajuan pemerintahan dan tata kelola bernegara.

Menteri Johnny menyadari bahwa tugas Kementerian Kominfo tidak mudah. Kenapa? Dunia telah bermigrasi dan bertransformasi. ASN Kominfo memiliki peran untuk hadir menghantarkan Indonesia untuk masuk ke era digitalisasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hulu sampai pada pemanfaatan teknologinya di hilir. Sebagai penutup sambutannya dalam Kominfo Connect 2020, Menteri Kominfo berpesan agar ASN Kominfo dapat memastikan tersedianya ekosistem yang unggul serta pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Rangkaian kegiatan dalam Kominfo Connect berlanjut dengan kemeriahan yang menghadirkan kreatifitas dan penampilan unik dari ASN Kementerian Kominfo. Yel-Yel Battle antar satuan kerja yang rutin digelar setiap tahunnya, tahun ini menghadirkan hal yang berbeda. Pemberian penghargaan kepada satuan kerja maupun ASN berprestasi juga tidak terlewatkan dalam kegiatan ini. Kominfo Connect 2020 ditutup dengan penampilan yang membuat pecah seisi eCovention Ancol dari Project Pop.



Saksikan keseruan
Kominfo Connect :



 KominfoTV

Menteri Kominfo RI
Johnny G. Plate

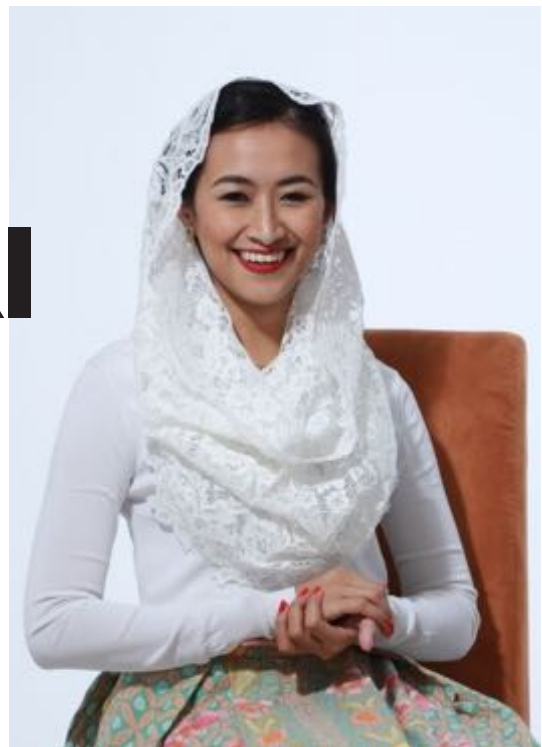
Sumber foto: Hasan Almasi on Unsplash



Ditulis oleh:

LATHIFA MARINA AL ANSHORI

TENAGA AHLI MENTERI KOMINFO
BIDANG LITERASI ISU INTOLERANSI
DAN RADIKALISME



Tidak Sadar Radikal

Menjadi bagian dari garda depan yang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia, membuat kita acap kali lebih waspada dengan sumber daya yang bisa digunakan di tanah air. Bila itu sumber daya materiil, maka kita perlu menanyakan apakah itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat dalam jangka panjang. Apabila itu sumber daya manusia, sudah seyogyanya kita menanyakan apakah si pengguna akan menggunakan kemajuan teknologi dengan hati Pancasila.

Ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme, sudah nyata di Indonesia dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Kita tidak bisa lagi saling tunjuk agar orang lain saja yang membereskan. Pada era di mana semua orang berpotensi menjadi lone wolf, kolaborasi harus dilakukan untuk menghilangkan radikalisme, terorisme, dan separatisme dari Indonesia. Lalu apakah yang membuat potensi seseorang menjadi lone wolf meningkat? Kemajuan teknologi dan kemudahan penyebaran informasi menjadi faktor utamanya. Contohnya, seseorang bisa secara mandiri belajar merakit bom untuk membuktikan pada komunitasnya bahwa ia ikut berjuang.

Pada dasarnya, kata radikal bukanlah sesuatu yang berarti negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal artinya mendasar, amat keras menuntut perubahan, juga maju dalam berpikir dan bertindak. Radikalisme yang kini berkonotasi negatif disebabkan

oleh radikal terorisme, yakni cara berpikir yang memaklumi, menerima, dan menyetujui tindakan kekerasan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Adapun radikalisasi adalah transfer cara berpikir yang mentoleransi kekerasan untuk tujuan tertentu dari satu orang lain atau satu kelompok kepada kelompok lain.

Bagaimanakah bentuk tindakan radikal terorisme yang sudah menjamur di Indonesia sejak tahun 1949? Sesederhana tindakan intoleransi di lingkungan sekitar dan menganggap kelompoknya sebagai yang paling benar. Tipe orang yang radikal teroris cenderung anti Pancasila dan NKRI, sekaligus anti pemerintah. Apabila dia beragama Islam, orang tersebut akan mudah mengafirkan orang lain. Di tambah lagi, dia sudi menggunakan kekerasan untuk tujuan tertentu. Seperti melemparkan granat, meledakkan bom, hingga menjadi pengantin bom bunuh diri. Menjadi radikal teroris tidak mengenal umur,

Layaknya memberikan imunisasi kepada balita, rakyat sekarang juga perlu diberi imunisasi agar tidak mudah menerima pikiran-pikiran radikal terorime.

baik tua dan muda; *baby boomers* hingga milenial.

Bersama-sama kita haru menangkal cara berpikir radikal terorime. Layaknya memberikan imunisasi kepada balita, rakyat sekarang juga perlu diberi imunisasi agar tidak mudah menerima pikiran-pikiran radikal terorime. Penulis meyakini kalau mayoritas warga negara Indonesia masih cinta NKRI. Namun, tanpa melakukan pencegahan, pemahaman radikal terorime bisa menyebar tanpa disadari masyarakat, memasuki pikiran bawah sadar sehingga ia bisa menjadi simpatisan kelompok berorientasi radikal. Ini bisa terlihat dari perilakunya di dunia media sosial; memberikan like, melakukan *share posting* yang radikal, hingga melontarkan opini yang berisi ujaran kebencian.

Diperlukan keberanian dan ketegasan untuk memutus transfer cara berpikir radikal terorime dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sebagai bagian dari grup yang melek literasi digital, intervensi terhadap saluran-saluran komunikasi

harus dilakukan untuk memutus transfer informasi dan pemikiran radikal terorime ini. Proses transfer pemikiran tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam medium. Hampir semua medium penyebaran informasi dapat digunakan untuk menyebarkan pemikiran anti Pancasila.

Cara penyebaran ideologi ini sangatlah halus dengan isi konten yang dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diterima. Diparafrase dengan bahasa yang mudah dicerna, bahkan cenderung menarik perhatian. Tidak sekali dua kali penulis menemukan ajakan mendirikan negara khilafah dalam pamflet yang dibagikan di masjid-masjid. *Transmitter*-nya adalah orang-orang yang bersosok meyakinkan dan terlihat seperti orang yang biasa dijangkau oleh rakyat pada umumnya.

Target penerima pesan radikal terorime adalah individu-individu yang rentan dan tidak matang secara kejiwaan. Salah satu tantangan di area urban adalah fakta bahwa semakin banyaknya orang yang harus bekerja lebih banyak dan berat

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pekerja yang burn-out tanpa mereka sadari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa *burn-out* adalah fenomena dalam konteks dunia kerja. *Burn-out* adalah sindrom dari stres kronis dari kehidupan kerja yang tidak terobati dengan baik. Ciri-cirinya adalah kecapaian berlebihan, energi terforsir terus-menerus, mulai berpikir negatif dan sinis terhadap pekerjaannya sendiri, juga berkurangnya efikasi profesional. Sehingga, kesehatan mental di dunia kerja juga harus menjadi perhatian kita bersama. Apakah Anda salah satunya? Atau Anda mengenal kolega yang mengalami gejala tersebut di atas? Bila iya, maka bertambah satu individu yang rentan menerima pesan radikal terorisme. Bisa jadi, yang bersangkutan tidak sadar kalau ia sudah radikal.

Di lain pihak, tantangan di daerah rural adalah konteks penduduk marjinal. Apabila seseorang merasa termarginalkan, diperlakukan tidak adil, mengalami kemiskinan, ditambah kurangnya pendidikan dan pengetahuan, maka orang tersebut cenderung lebih mudah menyerap dan menerima informasi-informasi yang berunsur radikal terorime. Lagi-lagi, mungkin ia pun tidak sadar kalau sudah terjangkit radikalisme. Adakah keluarga kita di daerah yang seperti itu? Lalu, apakah yang bisa

kita lakukan bila ada keluarga kita sendiri yang mendukung pemahaman radikal terorisme? Kerap kali, sebagai keluarga kita menjadi permisif karena tidak mau terlibat permasalahan dengan keluarga. Namun, mengambil satu langkah lebih maju untuk menerapkan prinsip kebhinekaan dalam keluarga juga bisa menjadi solusi untuk menyadarkan korban transfer pemikiran radikal terorisme.

Penanganan hal semacam ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, sejak seseorang baru terekspos pada narasi radikal terorisme, mulai menyetujui dan mendukung tindakan radikal terorisme, hingga turut berpartisipasi melakukannya. Pemerintah sudah tegas menempatkan diri sebagai pemimpin pembasmi radikal terorime dari tanah air, sudah seyogyanya sebagai anak bangsa yang peduli pada ibu pertiwi, kita turut mendukung agenda pemerintah tersebut. Kita patut selalu siap siaga dan

awas dalam melihat dan mendengar untuk mengidentifikasi pergerakan radikal teroris, baik yang kecil seperti penyebaran pesan-pesan berbau radikal, maupun aksi-aksi separatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada gading yang tak retak, namun apabila kita mengisi keretakan itu dengan emas gotong royong persatuan Indonesia, maka ketahanan nasional adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita raih bersama.

Radikal



Sumber foto: This is Engineering on Unsplash

Ditulis oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

INDRA MAULANA



Revisi UU Penyiaran

"Masih jaman nonton TV?" Begitu kira-kira pertanyaan yang dilontarkan sobat saya dengan serius. Belum sempat saya jawab, malah lekas dia sambung lagi, "Apa sih yang nggak ada di internet jaman sekarang? Film? yang legal ada di Netflix, mau yang gratisan? Berserakan dimana-mana tinggal googling aja dikit, berita? buka dong detik, ada videonya juga kok. Musik? apa sih yang gak ada di Youtube, musik kekinian sampe jaman kolonial juga ada. Kalau masih keukeuh juga mau nonton TV konvensional buka aja streamingnya, bisa buka dari komputer, tablet, hand-phone bisaaa... mau nonton sambil ke belakang juga silahkan, mana bisa TV dibawa-bawa ke toilet?!" (saya garuk-garuk kepala).

Memang faktanya begitu. Seakan tidak ada lagi kelebihan yang ditawarkan teknologi Televisi (TV) di jaman now ini kecuali layarnya yang besar. Sebagian konten premium malah sudah beralih masuk platform over-the-top (OTT). Film-film box office yang dulunya hanya bisa ditonton pada jam primetime di TV free-to-air atau TV berbayar, sekarang bisa ditonton pada jam berapapun dan berapa kalipun di platform OTT.

Kemudian apa yang membuat industri Penyiaran TV dan Radio yang katanya sudah sunset itu masih bertahan sampai sekarang?

Bisa jadi karena kontennya yang 'pilihan' tidak seperti Youtube yang campur aduk, bisa jadi karena gratis 'nyalain' TV langsung nonton tidak perlu beli kuota internet atau tergantung sama wifi tetangga (bagi fakir kuota), bisa jadi karena tayangan beritanya yang terpercaya atau setidaknya minim hoaks, bisa jadi karena lebih nyaman nonton di layar besar tidak bikin leher pegal dan tangan 'merengkel', atau bisa jadi karena sudah terbiasa saja sehingga rasanya aneh kalau sampai rumah kemudian tidak 'setel' TV, masuk mobil tidak 'setel' radio, dan sederet alasan bisa jadi semacamnya.

Menonton TV dan mendengarkan Radio, sebagai salah satu cara menikmati hak memperoleh informasi dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin negara dalam konstitusi, merupakan kebebasan setiap orang. Selain karena kontennya yang informatif, masyarakat menonton TV juga karena butuh

hiburan. Kegiatan tertawa bersama keluarga ketika menonton acara lawak di TV telah dan mungkin masih menghangatkan ruang keluarga di jutaan rumah di Indonesia.

Singkatnya, TV dan Radio berkontribusi dalam meningkatkan peradaban manusia, memicu imajinasi, merangsang pemikiran kritis, mendorong edukasi dan mempertemukan jutaan manusia seputar minat yang sama.

Terlepas dari rekam jejaknya, masih perlukah sekarang kita membuat aturan baru tentang penyiaran?

Sejak dibuat sampai dengan sekarang, kurang lebih 18 tahun sudah ia hadir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) merupakan usulan parlemen sebagai produk reformasi yang ketika itu begitu mendambakan kebebasan pers dan independensi media sebagai pilar ke-4 demokrasi. Tanggal lahirnya pun berdekatan dengan kelahiran UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Partai Politik.

Setelah mulai berlaku, perjalanan UU Penyiaran tidak mulus. Tidak kurang 7 (tujuh) kali legislasi ini digugat dalam *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi, dan tidak kurang 9 (sembilan) kali pula ketentuan pelaksanaannya di *judicial review* di Mahkamah Agung. Penerapan ketentuannya pun kerap kali multitafsir antara tataran UU dan tataran PP serta turunannya.

Tahun 2020 menandai masuknya kembali Revisi UU Penyiaran ke dalam Prolegnas 5 (lima) tahunan, bahkan RUU ini menjadi Prioritas yang harus diselesaikan pada tahun ini. Bukan hal baru, karena Revisi UU Penyiaran juga masuk dalam Prolegnas lima tahunan pada 2 periode sebelumnya, yaitu periode 2010-2014 (Prioritas 2013) dan periode 2015-2019 (Prioritas 2017 dan 2018), namun tidak kunjung selesai. Kerap kali terdapat pandangan yang diametral dalam pembahasan RUU Penyiaran. Maklum saja substansi RUU ini cukup strategis dan pemangku kepentingannya sangat luas.

Berkaca pada persoalan dan tantangan yang ada, setidaknya terdapat 5 (lima) isu besar yang perlu diatur dalam revisi UU Penyiaran, pertama, penyederhanaan perizinan penyiaran den-

gan memangkas birokrasi, menjadikannya satu pintu dan terintegrasi secara elektronik.

Kedua, memperkuat fungsi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), khususnya untuk fokus dalam mengawasi konten penyiaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran konten. KPI juga perlu memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap lembaga rating, sebagai fungsi kontrol mendorong konten penyiaran yang sehat.

Ketiga, payung hukum yang kuat untuk migrasi penyiaran analog ke digital dan menghentikan siaran TV Terrestrial analog *free-to-air* (Analog Switch Off) pada batas waktunya. Dengan pemanfaatan teknologi digital maka akan diperoleh efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 700 MHz yang dapat digunakan untuk keperluan *broad-*

TV &
mening
me
pemikiran
dan mem

band. Penerima manfaat terbesar adalah masyarakat yang akan menikmati layanan informasi berbasis teknologi nirkabel. Pemanfaatannya termasuk untuk kepentingan darurat, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dll.

Hasil Kajian Boston Consulting Group pada tahun 2017 menyebutkan hasil efisiensi yang kemudian digunakan untuk internet *broadband* akan menghasilkan *multiplier effect* untuk ekonomi digital Indonesia, perhitungannya dalam periode 2020-2026 saja akan menciptakan 181 ribu kegiatan usaha baru, 232 ribu lapangan pekerjaan baru, US\$ 5,5 miliar pendapatan negara dalam bentuk Pajak dan Non Pajak, dan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar US\$ 31,7 miliar.

Implementasi ASO Indonesia cukup tertinggal dibanding negara lain di dunia, bahkan di regional Asia Tenggara. Harapannya setidaknya Batas waktu ASO selesai pada medio 2022.

Keempat, perlu penguatan dan efisiensi pada institusi penyiaran publik. Melalui penggabungan LPP RRI dengan LPP TVRI serta perbaikan aturan tata kelola dan sistem penganggarannya diharapkan institusi baru tersebut dapat lebih *agile* dan fokus dalam memberikan konten edukasi dan hiburan yang mencerminkan perannya sebagai *national flag carrier* penyiaran Indonesia. *Role model*-nya bisa belajar antara lain dari BBC di Inggris dan NHK di Jepang.

Kelima, perlu diatur korelasi antara penyiaran dan layanan media baru yang juga memberikan layanan audiovisual, seperti layanan OTT. Karakteristiknya berbeda, penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut *broadcast*, pada dasarnya merupakan layanan *push service* dari

**& Radio berkontribusi dalam
katkan peradaban manusia,
micu imajinasi, merangsang
n kritis, mendorong edukasi
pertemukan jutaan manusia
seputar minat yang sama.**

Revisi PULU Penyiaran

lembaga penyiaran ke segala arah sehingga dapat diterima secara serentak dan bersamaan, sifatnya masif dan terjadwal (linear). Sedangkan layanan OTT adalah layanan *pull service* melalui protokol internet, pengguna yang mengambil dan menikmati konten yang disediakan penyedia pada server-nya, sehingga pengguna perlu menggunakan jasa dari penyedia akses internet (ISP) untuk mengakses konten-konten OTT. Mengkategorikan layanan OTT sebagai bagian dari penyiaran mungkin bukan langkah yang ideal, mengingat penyiaran telah diatur dengan sangat ketat dan *rigid* dalam regulasi, sedangkan layanan media baru di Indonesia masih dalam masa tumbuh kembang, jika diatur terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional. Terlebih keinginan untuk mengatur layanan OTT secara ketat akan menghadapi tantangan bahwa mayoritas penyedia layanan OTT saat ini berasal dari luar yurisdiksi kita. Kiranya saat ini lebih bijaksana untuk memisahkan penyiaran dari layanan media baru, yang perlu didorong adalah agar industri penyiaran nasional dan ekosistem industri kreatifnya dapat memanfaatkan layanan media baru melalui internet broadband secara optimal.

Menyambung cerita di awal, lalu saya jawab teman saya, “bro, ya masih ah. Jam saya nonton TV memang sudah berkurang drastis tidak selama dulu, tapi ketika ada kejadian penting, informasi yang paling bisa saya percaya adalah TV dan Radio. Pas banjir kemarin lewat TV lah saya memantau kondisinya, selebihnya saya cari info tambahan di internet. Pas rame Pemilu kemarin, acara debat Capres-Cawapres di TV dan Radio yang jadi referensi utama, gak pake delay nontonnya. Andaikata sampai terjadi perang dunia ke-3 (ketok-ketok meja) TV dan Radio akan menjadi media pengumuman negara kepada rakyat yang paling efektif karena sifat masif dan serentak bersamaan langsung ke setiap rumah, gitu juga dengan informasi darurat dan kebencanaan, atau bahasa kerennya *early warning system*.”

Kita mungkin tidak selalu merasakan pentingnya penyiaran pada ritme kehidupan serba cepat saat ini, tetapi pada situasi-situasi krusial, penyiaran tidak tergantikan oleh media apapun. Itu sebabnya Industri Penyiaran Nasional perlu kita jaga dan bangun bersama agar mencerminkan nilai-nilai luhur karakter dan kepribadian Bangsa Indonesia.

Sumber foto: Brooke Lark on Unsplash



Ditulis oleh:

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN FASILITASI
PLATFORM PERDAGANGAN
DIREKTORAT EKONOMI DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

**PUTI
ADELLA
ELVINA**



UMKM Go Online Upaya Kominfo Wujudkan Visi

“The Digital Energy of Asia”

Indonesia memiliki visi menjadi negara digital ekonomi terbesar pada tahun 2020. Oleh karena itu, Indonesia sangat mendukung kerjasama ASEAN-AS di bidang teknologi informatika, khususnya pemanfaatan ekonomi digital untuk umum. Presiden Jokowi memandang perlunya kerjasama ASEAN-AS untuk memastikan adanya dukungan yang berkelanjutan bagi pengembangan dan ketahanan UMKM, khususnya dalam hal akses pasar dan alih pengetahuan dari perusahaan besar kepada UMKM.

Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan ekonomi berbasis

digital di Indonesia diwujudkan dengan mengunjungi Kawasan Silicon Valley pada pertengahan Februari 2016 lalu guna mendeklarasikan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia”.

Di tahun berikutnya, pada 2017, saat mengikuti pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan transaksi e-commerce yang mencapai USD 130 miliar pada 2020.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Google dan Temasek bahwa

pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara akan mencapai USD 200 miliar pada 2025 dan pertumbuhan internet ekonomi khusus online travel, online media dan ride hailing di Indonesia akan mencapai USD 100 Miliar di tahun 2025.

Peran Dit Ekonomi Digital Mengakselerasi Digitalisasi Dunia Usaha

Sebagai perwujudan visi yang telah dicantumkan tersebut, maka pemerintah

UMKM Go Online Upaya Kominfo Wujudkan Visi

“The Digital Economy”

melalui sinergi dengan beberapa Kementerian, telah menginisiasi beberapa gerakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, khususnya ekonomi digital di Indonesia. Beberapa inisiasi yang telah dijalankan oleh pemerintah (Kementerian Kominfo) melalui Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika yaitu: Gerakan Nasional UMKM Go Online, Gerakan Nasional 1000 Startup, 1 Juta Petani dan Nelayan Go Online, Nexticorn, dan Digitalisasi Sektor Strategis (Pertanian, Pariwisata, Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Inklusi Keuangan dan Ekonomi Kreatif).

Kementerian Kominfo telah men-canangkan program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online sejak tahun 2017. Adapun tujuan dari Program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online yaitu membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia baik di ranah regional maupun global. Dengan memadukan sistem penjualan *online* dan *offline*, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran *online* dapat membantu mempertemukan konsumen *online* dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Plt Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo, I Nyoman Adhiarna, mengatakan bahwa Fokus program

Dit Ekonomi Digital yang utama terkait transformasi digital sektor-sektor strategis dengan tujuan untuk mengakselerasi digitalisasi dunia usaha, di samping mendorong dan menumbuhkan ekosistem Startup Digital dengan harapan dapat berdampak massif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, kata Nyoman, Dit Ekonomi Digital terlibat dalam gerakan nasional “UMKM Jualan Online” dalam rangka peningkatan kesadaran (*awareness*) bagi UMKM pentingnya pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) bersama Kementerian/ Lembaga lain.

Kegiatan UMKM Go Online berupa Onboarding yaitu mendorong usaha UMKM bertransformasi usaha dari *offline* menjadi *online*, bekerjasama dengan penyelenggara startup/platform *marketplace* dan pembayaran digital (Digital Payment) dilakukan dengan registrasi dalam platform digital, bertransaksi melalui platform tersebut dengan menjual produk-produknya. Target hingga November 2019 adalah 11.354.920 melampaui target 8 juta.

Kegiatan yang dilakukan Dit Ekonomi Digital: Roadshow, Grebeg Pasar, Ramadhan Express dan Kemitraan. Tahun ini Kominfo telah mencapai 28.702 UMKM go online. Adapun bisnis prosesnya adalah sebagai berikut:

Menyangkut dukungan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Ekonomi Digital, terhadap 3 Segmen penerapan *roadmap e-commerce* (UMKM, perusahaan e-Commerce yang *established &* perusahaan rintisan bidang teknologi), Nyoman Adhiarna menjelaskan, hingga saat ini dukungan yang diberikan pemerintah melalui program-program direktorat ekonomi digital adalah sebagai berikut:

1. Kita mendorong UMKM untuk go digital salah satunya adalah dengan mendorong pedagang melakukan *on boarding* yaitu dengan bermigrasi berjualan secara online dengan menjadi *merchant* (pedagang) di *marketplace* / platform perdagangan digital. Ini harus dilakukan secara berkesinambungan melalui program pendampingan. Beberapa dari UMKM yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu akan terhapus sendirinya dalam *marketplace*. Karena itu pekerjaan pendampingan yang berkesinambungan menjadi penting.

2. E-Commerce yang *established* akan didorong terus berkembang. Caranya, dengan memfasilitasi mereka untuk dapat bertemu dengan investor dari luar negeri. Keterlibatan beberapa startup dan unicorn dalam forum-forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Swiss, melalui fasilitasi Kementerian Kominfo adalah salah satu upaya ini sehingga mereka menjadi lebih dikenal di dunia.

3. Perusahaan rintisan bidang teknologi juga didorong memperkenalkan inovasi dan produknya dalam beberapa kegiatan dan festival Kominfo misalnya program Republic of IoT sehingga makin dikenal luas oleh publik serta inovasi dan solusinya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, kata Nyoman, program-program di direktorat ekonomi digital mencakup di antaranya kerjasama dengan Kementerian/Lembaga membantu mempercepat digitalisasi 7 sektor strategis yang mencakup: pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, keuangan, perhubungan dan ekonomi kreatif. "Kami juga melaksanakan beberapa inisiatif Kementerian kominfo terkait digitalisasi sektor strategis misalnya: UMKM Go Digital, Petani Go Digital (Smart Farming) dan Nelayan Go Digital (Smart Fishery) dengan memanfaatkan teknologi

Internet of Things (IoT)," tuturnya.

Perkuat Ekonomi Nasional Dengan Digitalisasi UMKM

Gerakan nasional digitalisasi UMKM ini bertujuan mendorong kekuatan ekonomi nasional yang berbasis UMKM. Gerakan ini juga didukung oleh 2 program pemerintah lainnya, yaitu Program UMKM dan Program Ekonomi Kerakyatan. Sebagai pelaku ekonomi terbesar di Indonesia, pengembangan UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital. Berdasarkan data dari Kementerian KUKM dan BPS tahun 2017, dengan jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta unit, UMKM mampu menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, 97 persen penyerapan tenaga kerja, 99 persen berkontribusi terhadap total lapangan kerja, 14,17 persen berkontribusi terhadap ekspor dan 58,18 persen menyumbang investasi sehingga pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan UMKM terutama peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform digital dan inovasi teknologi. Hal ini semakin didukung oleh riset LPEM FEB UI 2019, terkait dampak Tokopedia terhadap Ekonomi Indonesia berkontribusi 1,5% terhadap pertumbuhan ekonomi

di Indonesia serta dapat meningkatkan penjualan sebesar 22% serta mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 10,3% dari total lapangan kerja baru.

Melalui upaya peningkatan jumlah partisipasi UMKM dalam menggunakan *online e-commerce* akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Mc Kinsey, pasar *online e-commerce* di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh hingga delapan kali lipat dari tahun 2017 hingga 2022, dari pembelanjaan senilai \$8 miliar pada 2017 menjadi \$55 hingga \$65 miliar pada tahun 2022. Penetrasi *online e-commerce* akan meningkat menjadi 83 persen dari yang awalnya saat ini hanya 74 persen, dengan sekitar seperempat dari pengguna ini akan melakukan pembelian. Secara paralel, pengeluaran rata-rata individu di Indonesia untuk berbelanja online juga akan meningkat dari \$260 per tahun menjadi \$620 per tahun pada tahun 2022 karena kepercayaan konsumen terhadap ekosistem online telah meningkat dan lebih banyak UMKM yang melakukan kegiatan online, banyaknya variasi pilihan produk dengan harga terjangkau, dan berbagai pilihan ekspedisi pengiriman yang terpercaya.

men
para U

Program UMKM Go Online memberikan kesempatan pada UMKM untuk menggunakan platform online

Lakukan 4 Tahapan

Ada 4 (empat) tahapan UMKM Go Online yaitu *onboarding*, *active selling*, *scale up* dan *go international*. Untuk fasilitasi UMKM Go Online maka Kementerian Kominfo bekerjasama dengan berbagai stakeholder dari instansi pemerintah dan swasta. Program ini bekerjasama Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Lazada, Grab Food, Marketplace Lokal seperti tumbasin dan titipku) telah tercapai sejumlah +/- 17.113.220 UMKM data per desember 2019 yang telah Go Online melalui kegiatan On Boarding ke Marketplace dengan capaian yang melebihi target awal 8 juta UMKM Go Online di tahun 2019. Di tahun 2019, data agregat jumlah UMKM Go Online di beberapa *marketplace* (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Titipku dan Tumbasin) dan capaian dari Kominfo sebesar 39.233 UMKM Go Online dengan total keseluruhan yaitu +/- 5.919.333

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk fasilitasi 8 juta UMKM Go Online adalah Pertama, *roadshow* berupa kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen IKP, Nurbaya Initiatives, Pemerintah Daerah, dan para *marketplace* untuk mempromosikan produk UMKM secara online. Model

Kegiatan berupa Petunra, Seminar dan Workshop; Kedua, Grebeg Pasar, Kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan para *marketplace* untuk mempromosikan penjualan secara online untuk UMKM. Model Kegiatan dilaksanakan dengan "jemput bola" ke pasar dan sentra industri; Ketiga Ramadhan Ekspres berupa Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan para *marketplace* untuk mempromosikan penjualan secara online untuk UMKM dengan produk Makanan, Kue Basah dan Minuman dalam rangka Bulan Ramadhan; Keempat, Kemitraan, Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan para *marketplace* untuk mempromosikan penjualan secara online untuk UMKM.

Program Fasilitasi UMKM Go Online di tahun 2019 dilakukan dalam bentuk kegiatan Grebeg Pasar di 20 Kabupaten/Kota dan 120 (seratus dua puluh) pasar rakyat, peningkatan *awareness* UMKM Go Online, serta Workshop UMKM di Kota Bogor. Model Kegiatan grebeg pasar dilaksanakan dengan "jemput bola" ke Pasar dan Sentra Industri. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan para *marketplace* (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Tumbasin, dan Titipku) untuk mempromosikan penjualan secara online untuk UMKM dan melakukan sosialisasi transaksi pembayaran nontunai (*cashless payment*). Ada beberapa *stakeholder* lainnya yang bekerjasama dengan kegiatan Grebeg Pasar yaitu Kementerian Keuangan untuk membantu pendampingan terkait pembukuan

Gerakan nasional digitalisasi UMKM ini bertujuan mendorong kekuatan ekonomi nasional yang berbasis UMKM.

dan tata cara pembuatan NPWP, serta bekerjasama dengan platform pembayaran untuk sosialisasi pembayaran non tunai (*cashless payment*) misalnya OVO, DANA, Gopay, QRIS (Telkom), serta pihak perbankan (Bank UMKM Jatim, Bank BRI, Bank CIMB Niaga), dan ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Rakyat Indonesia).

Lokasi pelaksanaan Grebeg Pasar: wilayah sumatra (Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jambi), wilayah Jawa (Kabupaten Pangandaran, Yogyakarta, Cirebon dll), wilayah Kalimantan (Balikpapan), dan Wilayah Timur (Makasar, Denpasar, Kabupaten Lotim, dan Kota Mataram). Untuk meningkatkan jumlah UMKM Go Online yang aktif berjualan maka Kementerian Kominfo bekerjasama dengan beberapa *marketplace* misalnya kampanye Shopee tentang program Grebeg Pasar yang tergabung di *landing page* kreasi nusantara serta adanya notifikasi menggunakan sistem *marketplace* Bukalapak agar para pelaku UMKM yang sudah terdaftar melakukan aktivasi dan transaksi *e-commerce*. Selain itu, untuk mempromosikan produk lokal dari para Pelaku UMKM yang “*active seller*” di beberapa daerah lokasi Grebeg Pasar maka telah dibuat *landing page* khusus dengan link sebagai berikut:

- 1.bit.ly/grebegpasarbukalapak
- 2.bit.ly/grebegpasartokopedia
- 3.bit.ly/grebegpasarshopee

Dalam rangka peningkatan *awareness* UMKM Go Online, maka telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu. Adlibs UMKM Go Online di radio lokal, publikasi di media *online* dan *offline*, pembuatan Iklan PSA UMKM Go Online, *placement* Iklan PSA UMKM Go Online di KRL, *placement* Iklan PSA UMKM Go Online di 4 stasiun TV (Metro TV, Kompas TV, RCTI dan SCTV), penyusunan komik UMKM Go Online bekerjasama dengan Ditjen IKP, sosialisasi di akun medsos @umkmjualanonline dan website (umkmgoonline.kominfo.go.id). Hal ini semakin didukung oleh hasil kajian MarkPlus Analysis tahun 2019 tentang 5 program Kementerian Kominfo yang paling diketahui oleh masyarakat Indonesia yaitu UU ITE, Aduan Konten, Gerakan 1.000 Start Up, UU IKP dan UMKM Go Online. Di mana penilaian UMKM Go Online mencapai skala 4,76 dari skala tertinggi 6, sebagian besar responden sebanyak 82,9% mengetahui bahwa program UMKM Go Online memberikan kesempatan pada para UMKM untuk menggunakan platform *online* dan sebanyak 7,1% mengetahui pembinaan dan pengembangan UMKM di Indonesia, sisanya sebesar 1,4% mengetahui tentang digital produk dan aplikasi online.

RATAS UMKM

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden tanggal 11 November 2019, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwasanya program Pemberdayaan UMKM belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan programnya tidak terintegrasi dan sasaran dalam pemberdayaan UMKM yang masih dalam sektor perdagangan (Kontan.co.id tanggal 11 November 2019). Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, program pemberdayaan UMKM akan dilakukan Sinergi Program dengan beberapa Kementerian/ Lembaga terkait. Masalah umum yang dihadapi UMKM sangat beragam dan kompleks di antaranya adalah SDM dan Manajemen (rekrutmen, pola pikir, pendampingan, budaya kerja, kualitas SDM, dll),

aspek inovasi dan teknologi (inovasi produk, adopsi teknologi baru, kapasitas produksi, dll), aspek finansial (akses sumber pembiayaan, laporan keuangan, pajak, pengelolaan keuangan, dll), aspek pasar dan bahan baku (akses pasar digital, kemitraan, akses ekspor, ketersediaan bahan baku, dll), serta aspek kelembagaan (data, perizinan usaha, standar produk, kontrak bisnis, dll).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM sedang menyusun rencana strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM di mana peran Kominfo sangat diharapkan untuk mendorong adopsi teknologi bagi UMKM untuk mendorong perluasan akses pasar dan meningkatkan daya saing produk dan jasa. Dalam Rencana Strategi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (*one gate policy*) maka akan dilakukan koordinasi lintas sektor.

Kembangkan Destinasi Wisata Super Prioritas

Ada 6 Program Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020 -2024 yaitu perluasan akses pasar produk dan jasa, peningkatan daya saing produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, pengembangan kapasitas manajemen

SDM, kemudahan dan kesempatan berusaha serta koordinasi lintas sektor. Rencana di tahun depan, KemenkopUKM akan fokus untuk mengembangkan UMKM di beberapa kawasan pariwisata super prioritas yaitu Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatra Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat) dan Likupang (Sulawesi Utara).

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo dalam 5 tahun mendatang akan mendukung pencapaian target UMKM naik kelas (*scaling up*) dengan mengadopsi teknologi bagi para pelaku UMKM Produsen di kawasan prioritas tersebut. Di tahun 2020, Program UMKM Go Online akan berfokus pada 5 kawasan pariwisata super prioritas sebagaimana dimaksud.

“The Digital Energy of Asia”

Nantinya, program UMKM Go Online ini akan membantu dua hal yaitu akses pemasaran dan proses bisnis UMKM. Dalam hal akses pemasaran, akan melanjutkan kegiatan onboarding di *marketplace* terutama *marketplace* yang berorientasi ekspor dan untuk membantu digitalisasi operasional UMKM maka akan bekerja sama dengan startup terkait manajemen keuangan, manajemen pelanggan, manajemen aset/*inventory* dan pengelolaan bisnis UMKM.

Diharapkan dengan adanya sinergi program lintas K/L/I ini akan tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan UMKM, meningkatkan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Arah Kebijakan Strategis Transformasi Digital Bappenas dan RPJMN di mana untuk perdagangan digital, pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan startup teknologi untuk memasok produk dan jasa ke pasar internasional serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi digital, Kementerian Kominfo juga melakukan upaya dalam memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat guna menunjang pengusaha petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan melalui program Petani dan Nelayan Go Online. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbankan, operator, serta Startup Digital Sektor Pertanian dan Perikanan untuk mendukung terselenggaranya ekosistem digital dari hulu ke hilir. Capaian di Tahun 2019, telah memenuhi target 300.000 petani dan nelayan go online dengan jumlah 151.324 petani go online (100,88%) dan 151.018 nelayan go online (100,68%).

Diskusikan Startup dan Digitalisasi UMKM Bersama Laos

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga berusaha meningkatkan jumlah UKM yang berjualan di *marketplace*. Hal itu

dipaparkan Plt. Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna, ketika menerima sepuluh orang Delegasi Republik Rakyat Demokratik Laos (Lao PDR) berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bertukar informasi mengenai penguatan dan pengembangan startup digital dan digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia pada pertengahan November 2019. "Nilai transaksi di bidang *e-commerce* dan ekonomi digital di wilayah Asia Tenggara akan meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun mendatang. Selain infrastruktur, Kementerian Kominfo juga berusaha meningkatkan jumlah UKM yang berjualan di *marketplace*," jelasnya.

Mengenai pengembangan startup di Indonesia, Kementerian Kominfo dalam 3 tahun terakhir sudah meluncurkan program Gerakan Nasional 1000 Startup. Meskipun demikian, Plt. Direktur Nyoman menyadari tidak mudah untuk menciptakan bisnis startup yang

K
pengemba
perlu ke

UMKM Go Online Upaya Kominfo Wujudkan Visi

sukses. “Ketika berbicara tentang startup, mungkin dari 100 hanya 1 yang sukses,” jelasnya.

Menurut Nyoman, Kementerian Kominfo telah melaksanakan berbagai program untuk membantu para startup agar mampu terus berkembang. “Kami memiliki program yang terdiri atas tahapan *workshop*, *ignition*, *hackathon*, dan *bootcamp* untuk memfasilitasi startup,” katanya.

Plt. Direktur Ekonomi Digital mengapresiasi upaya beberapa pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan startup di daerahnya diantaranya dengan membuat *coworking space* gratis yang bisa dimanfaatkan bersama.

Sekilas Mengenai 3 KEK Baru

Dalam 5 tahun kedepan, pemerintah mencanangkan kegiatan *smart farming* dan *smart e-fishery* dengan target *proof of concept* pembentukan ekosistem *smart farming* dan *smart e-fishery* di 3 lokasi tiap tahun di kawasan prioritas (Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan SKPT).

Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui penetapan 3 (tiga) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Singhasari (Kabupaten Malang, Jawa

Timur); PP Nomor 85 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Kendal (Jawa Tengah); dan PP Nomor 84 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara).

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdiri dari 9 (sembilan) KEK Industri dan 6 (enam) KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor.

Pengembangan 15 KEK tersebut telah menghasilkan realisasi investasi hingga Rp22,2 triliun, dan juga telah berkontribusi pada

Kedepannya dalam hal pangan ekonomi digital kolaborasi lintas sektor.

UMKM Go Online

Upaya Kominfo

di tahun 2019 sudah dilakukan digitalisasi konten pendidikan dan digitalisasi manajemen sekolah. Saat ini, sudah dilakukan kerjasama dengan Eduspec, STEAM informatika, Visio Inkubator, Pahamify, Sekolah.id serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk digitalisasi sektor strategis di tahun 2019 sudah dilakukan implementasi di beberapa sektor yaitu Pertanian, Pariwisata, Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Inklusi Keuangan dan Ekonomi Kreatif. Sebagai contoh digitalisasi di sektor pertanian ada implementasi pertanian presisi dan lelang digital, pertanian presisi merupakan konsep pertanian yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola keberagaman informasi yang ada pada lahan diantaranya mengenai kondisi udara, air, cuaca, dan iklim untuk memastikan perlakuan yang tepat sehingga produktivitas dan keberlanjutan lahan optimal.

penciptaan lapangan pekerjaan, sebab terhitung hingga akhir tahun 2019, realisasi serapan tenaga kerja di KEK mencapai lebih kurang 8.686 orang

Dalam pengembangan KEK yang berdaya saing dan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayahnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta masyarakat sekitar KEK tersebut berada. Dukungan itu harus terencana, terintegrasi, dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam arahan kebijakan transformasi digital dari Bappenas di 5 tahun mendatang, berfokus pada *distance learning* dan sistem pembelajaran *online* serta penyesuaian kurikulum yang siap untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, di mana fokus digitalisasinya terletak pada 5 sektor, yaitu: pertanian, pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pariwisata digital. Dalam hal digitalisasi sektor pendidikan

Sedangkan Digitalisasi pencatatan hasil lelang komoditas hortikultura dimaksudkan untuk melakukan perekaman data hasil lelang sehingga mampu menciptakan transparansi dan kompetisi harga yang baik. Melalui pencatatan hasil lelang digital, pemerintah daerah dan pusat memiliki kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dan membuat kebijakan. Di tahun mendatang, program ini akan digabung dalam kegiatan *smart farming*.

Selain itu, implementasi digitalisasi sektor kesehatan di tahun 2019 merupakan upaya dalam membantu peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan (faskes) di Indonesia melalui pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan data terintegrasi yang disediakan oleh Start Up Teknologi Kesehatan.

Kegiatan ini sudah bermitra dengan Asosiasi Klinik, Dinas Kesehatan dan Healthtech.id. Di tahun 2020 -2024, kebijakan digitalisasi kesehatan berupa perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam media dan rekam medis online serta lanjutan

program fasilitasi pengembangan platform *healthtech* yang mudah diakses oleh masyarakat.

Digitalisasi Pariwisata merupakan upaya dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan melalui pemanfaatan teknologi TIK yang disediakan oleh startup lokal yang bergerak di sektor pariwisata, bermitra dengan beberapa *stakeholder* yaitu startup Triponyu, Kemenpar, Pemda (Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo) dan Pokdarwis/Komunitas. Secara keseluruhan digitalisasi sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan beberapa sektor strategis lainnya memiliki target dari tahun 2020 – 2024 berupa persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis sebesar 100%.

Melalui beberapa gerakan nasional UMKM Go Online dan program digitalisasi di beberapa sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Company tahun 2016, digitalisasi akan berdampak pada peningkatan PDB Indonesia USD 150 Miliar pada tahun 2025. Oleh karena itu, untuk kedepannya dalam hal pengembangan ekonomi digital perlu kolaborasi lintas sektor. (PAE)

Sumber foto: by Marco Oriolesi on Unsplash



Ditulis oleh:

DIREKTUR LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

BAMBANG DWI ANGGONO



Tantangan dalam Mewujudkan Smart Government

Indonesia — Part I

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar birokrasi dirampingkan, proses bisnis/birokrasi disederhanakan, dan model kerja birokrat difleksibelkan melalui pemanfaatan teknologi. Di kalangan profesional *non-government*, budaya kerja berbasis kinerja dengan fleksibilitas waktu dan cara sudah lumrah dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan aparatur pemerintahan di Indonesia? Apakah sudah siap?

Khususnya di Indonesia, pemerintah selalu dituding sebagai lembaga yang selalu tertinggal dari dinamika bisnis *non-government*. Ketika masyarakat sudah merasakan dan nyaman dengan transaksi *paperless* untuk berbagai kepentingan, di lingkungan pemerintahan sekedar mengubah undangan kertas melalui sistem persuratan elektronik pun masih menjadi pekerjaan rumah yang begitu pelik untuk dirubah. Belum lagi urusan-urusan yang terkait dengan sistem keuangan.

Namun demikian, pesimis seperti itu saat ini mulai dikikis secara sistematis. Pemerintah telah meny-

iapkan berbagai strategi Smart-Government untuk mewujudkan harapan Presiden, dan tentunya harapan seluruh masyarakat Indonesia ini.

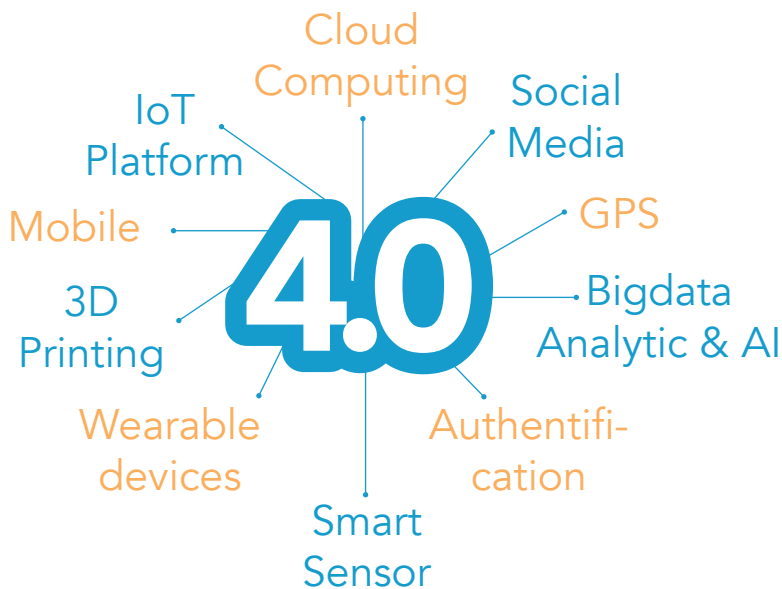
Revolusi Industri 4.0

Dalam satu dekade ini umat manusia dilimpahi oleh anugerah teknologi yang begitu canggih. Kita mengenalnya dengan Revolusi Teknologi dan Industri 4.0. Kemajuan teknologi ini bukan hanya menawarkan keterhubungan yang bersifat global, namun juga memenuhi kebutuhan analisis data dan informasi yang nyaris bersumber dari jutaan sumber dari seluruh penjuru dunia. Kemampuan ini dapat direkayasa sehingga memungkinkan mesin belajar sendiri dari data dan informasi yang masuk (*machine learning*), bahkan hingga ke pembelajaran secara mendalam (*deep*

learning). Kemampuan ini yang membawa era yang dipenuhi perangkat canggih dewasa ini sebagai era cerdas (*smart*).

Banyak negara telah mengadopsi kemampuan revolusi industri 4.0 ini untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan negara kepada rakyatnya. Pemerintah mampu *men-delivery* layanan melalui teknologi yang ada di genggaman tangan rakyatnya. Teknologi mampu membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat, sekaligus melakukan eksekusi kebijakan secara cepat pula. Pemerintahan seperti ini umum disebut sebagai pemerintahan yang cerdas (Smart-Government).

Tantangan Dalam Merwujudkan Smart Government



Dinamika eGovernment Indonesia

Inisiatif untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas sebenarnya bukan baru-baru ini saja dijalankan. Sejak era orde baru, inisiatif ini telah muncul melalui peluncuran satelit palapa di tahun 1975an. Satelit pertama di Asia Pasifik yang mampu mewujudkan diseminasi informasi yang begitu cepat di negeri 17.000 pulau ini. Di tahun 1995an pemerintah telah meluncurkan sistem informasi pendapatan daerah terpadu secara nasional dengan jaringan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri) melalui satelit, sehingga sistem pendapatan daerah mampu dimonitor secara nasional, dan dilanjutkan dengan beberapa aplikasi lainnya.

Sejak lahirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Team Koordinasi Telematika Indonesia dan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi eGovernment. Team Koordinasi Telematika yang kemudian berkembang menjadi Dewan TIK Nasional (Wantiknas) ini diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan TIK di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengawali maraknya pembangunan eGovernment. Setiap instansi pemerintah berlomba menciptakan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan dan pelayanan umum sekaligus mengembangkan ekosistem TIK (infrastruktur, platform, aplikasi dan SOP) secara masing-masing. Setiap Kementerian menginstruksikan atau mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi binaannya untuk mengembangkan ekosistem TIK-nya untuk alasan modernisasi atau elektronifikasi layanannya. Inpres 3/2003 ternyata menghasilkan euforia belanja TIK di lingkungan pemerintahan secara *massif* dan tidak terintegrasi. Bahkan hingga dunia masuk ke Revolusi Industri 4.0, penerapan eGovernment di Indonesia masih dominan berbasis silo.

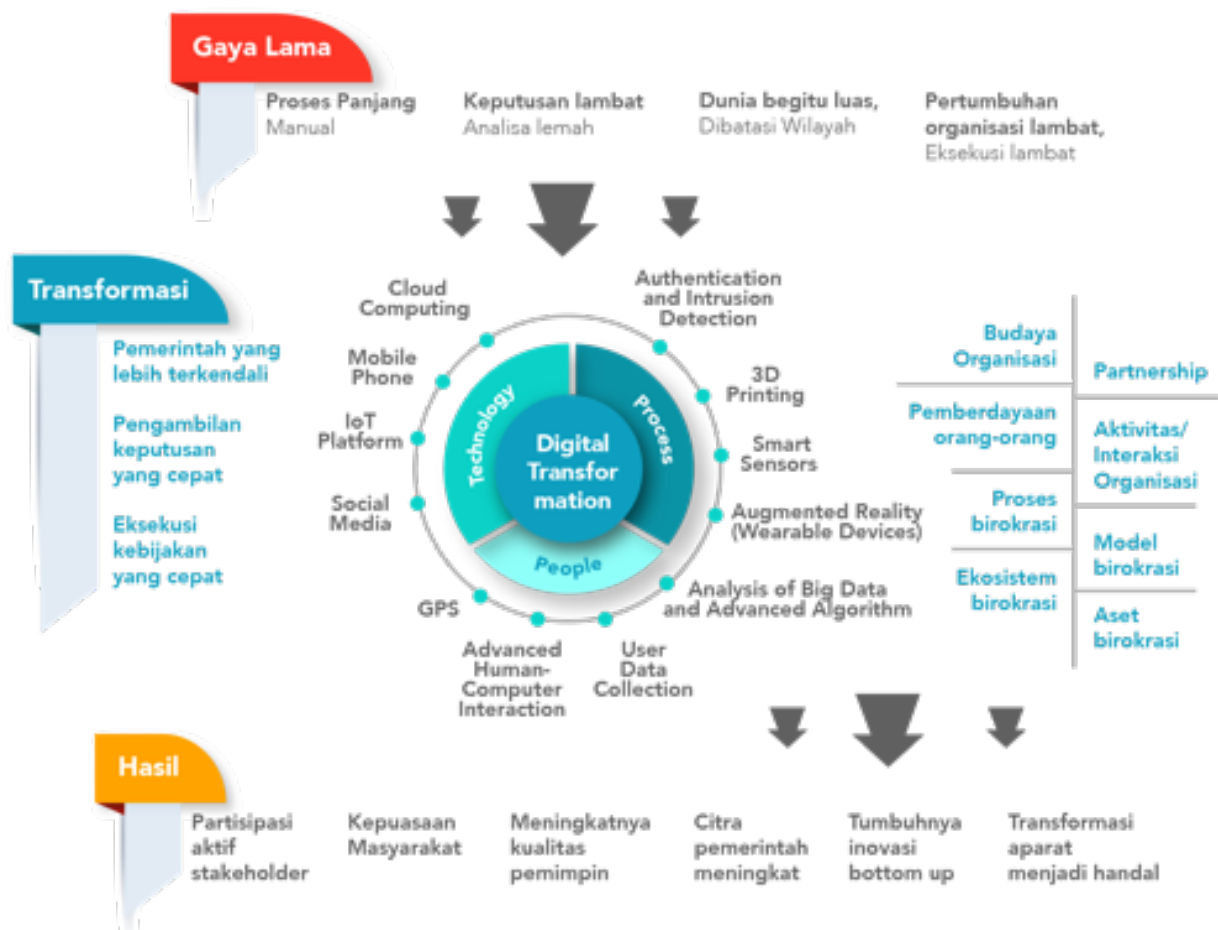
Kondisi yang nyata saat ini sebagai akibat kebijakan yang bersifat silo, duplikasi sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah cukup massif. Bahkan ada satu kementerian yang mengoperasikan empat sampai enam aplikasi sejenis. Bila ada 30 Kementerian menginstruksikan pemda untuk mengembangkan atau menyediakan aplikasi sektoral mereka, maka dengan 548 Pemda yang ada, terdapat lebih dari 16.000 aplikasi. Kenyataannya sebagian besar

Pemda mengoperasikan lebih dari 40 aplikasi. Dengan asumsi setiap aplikasi memerlukan biaya sebesar Rp. 100 juta/tahun, maka biaya pemeliharaan aplikasi mencapai Rp. 1,6 Trilyun lebih. Belum termasuk biaya pengembangan awal yang tentunya tidak sedikit.

Dari sisi infrastruktur, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sofrecom Indonesia pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengoperasikan kurang lebih 2700 Pusat Data dengan

berbagai kondisi, dengan tidak sedikit yang memiliki Service Level Agreement (SLA) dan security level yang relatif rendah, bahkan tidak pernah diaudit IT. Dengan asumsi setiap DC memerlukan biaya Rp. 3 Milyard/tahun, maka setidaknya setiap tahun pemerintah Indonesia harus mengalokasikan APBN sebesar Rp. 8,1 Trilyun.

Dana sebesar itu belum termasuk belanja Platform yang diindikasikan lebih dari Rp. 5 Trilyun.



S Tantangannya Smart Government Indonesia

Nilai yang tidak sedikit. Fakta lainnya menunjukkan bahwa meskipun ekosistem eGovernment di Indonesia telah dibangun cukup luar biasa, namun data menunjukkan bahwa SDM ASN yang memiliki kapasitas ahli dan bersertifikasi profesional di bidang TIK relatif rendah. Data yang dirilis Kemkominfo melalui *assessment* Peningkatan eGovernment Indonesia pada tahun 2017, jumlah SDM yang mandatori ditugaskan secara teknis di bidang TIK berkisar 6000 orang, dengan sebagian besar ada di Pusat, dan sebagian besar tidak memiliki sertifikasi profesional di bidang TIK. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika perangkat canggih dibelanjakan dan diserahkan kepada aparatur dengan kapasitas TIK sangat terbatas?

Tantangan yang tidak bisa dianggap ringan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia juga kenyataan begitu luasnya wilayah

Indonesia, dan belum meratanya penetrasi internet berkualitas tinggi. Dan tidak mungkin bagi pemerintah untuk menginstall aplikasi di setiap PC pada kantor desa di era *cloud computing* saat ini.

Transformasi Digital Government

Pemerintah (Government) telah bertransformasi menjadi eGovernment. Selanjutnya kesadaran untuk berkolaborasi antar layanan antar instansi pemerintah menghasilkan *integrated Government* (iGovernment). Kini revolusi industri 4.0 telah hadir dan sudah saatnya Pemerintah Indonesia menerapkan Smart-Government. Bukan hanya berbicara soal integrasi dan interoperabilitas, namun Pemerintah harus memiliki kecerdasan tinggi melalui implementasi *bigdata analytic* dan kecerdasan buatan.

Untuk mempersiapkan upaya transformasi digital, Pemerintah telah menerbitkan cukup banyak regulasi inti dan teknis, diantaranya UU Telekomunikasi, UU ITE, UU 14/2008 tentang KIP, UU 23/2014 tentang Pemda, PP 18/2018, PP tentang percepatan kesempatan berusaha, Perpres 9/2016 tentang Kebijakan

Satu Peta Perpres 95/2018 tentang SPBE, Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Permenkominfo 8/2019 tentang NSPK Dinas Kominfo, dan cukup banyak regulasi sektoral dan kebijakan teknis dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Apa yang yang direncanakan oleh untuk melakukan percepatan implementasi Smart-Government di Indonesia? Mari kita diskusikan mengapa transformasi digital pemerintahan harus dilakukan.

Banyak orang menilai bahwa transformasi digital pemerintahan berarti belanja perangkat canggih berbasis TIK. Fakta menunjukkan bahwa teknologi, yang merupakan digital, memungkinkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah tradisionalnya. Kita berbicara tentang perubahan organisasi pemerintahan secara menyeluruh, bukan soal proyek TIK.

Gaya lama pemerintah yang walaupun menggunakan computer namun proses bisnis atau birokrasi berjalan manual, pekerjaan yang serba silobase atau dibatasi wilayah-wilayah

tertentu, memiliki kekayaan data namun lemah dalam Analisa, dan impementasi kebijakan yang lambat, ditransformasikan melalui implementasi Enterprise Architecture (EA). Perubahan mendasar dari sisi People, Process dan technology.

Secara umum transformasi digital pemerintah mencakup beberapa area strategis dengan teknologi yang berkembang secara global menjadi, yaitu:

1. Perubahan budaya organisasi
2. Perubahan dalam cara pandang dan aktivitas *partnership*
3. Upaya pemberdayaan orang-orang sebagai upaya pemanfaatan *resource* SDM secara optimal
4. Perubahan aktivitas dan interaksi internal dan eksternal organisasi
5. Perubahan proses bisnis atau proses birokrasi
6. Perubahan terhadap model bisnis/birokrasi
7. Kenyataan bahwa ekosistem bisnis/birokrasi juga berubah, dan
8. Perubahan terhadap *asset* bisnis/birokrasi.

Transformasi digital pemerintahan yang dilaksanakan secara konsisten dan kuat akan menghasilkan tiga kondisi positif, yaitu:

1. Pemerintahan yang lebih terkendali
2. Pengambilan keputusan yang cepat, dan
3. Eksekusi kebijakan yang cepat.

Apa yang sangat mungkin dihasilkan dalam transformasi digital pemerintahan? Pertama, sebagaimana telah terjadi da-

lam globalisasi, fakta menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder menjadi lebih aktif. Kedua, kita melihat bagaimana masyarakat begitu aktif memberikan informasi partisipatif melalui aplikasi berbasis lalu lintas, profile bisnis, dan lain-lain. Ketiga, jaminan kualitas layanan melalui interaksi yang baik pasti akan menghasilkan kepuasan masyarakat. Keempat, perubahan budaya dan model bisnis dalam birokrasi akan melahirkan keberanian untuk berinovasi. Kelima, atmosfer yang sehat untuk berinovasi yang didukung dengan penguatan kapasitas aparat akan menghasilkan birokrat-birokrat yang handal dalam menjalankan tugasnya.

Keenam, iklim yang sehat dalam model bisnis dan proses bisnis akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sistem akan memaksa pemimpin untuk tidak anti terhadap perubahan dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong kinerja pribadinya dan organisasi yang dipimpinnya. Dan ketujuh, pada akhirnya masyarakat akan mengakui kualitas birokrasi yang handal dan layak dipercaya.

— Bersambung - Edisi Februari —

Smart Government
Indonesia

Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi



<https://nasional.republika.co.id/berita/q3smlu320/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan sebanyak 431.065 aduan konten negatif telah mereka terima sepanjang 2019.

“Konten bermuatan negatif yang diterima melalui laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, maupun melalui akun Twitter @aduanKonten,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi, Rabu (8/1).

Konten yang paling banyak diadakan ke Kominfo selama 2019 berupa muatan pornografi, jumlahnya mencapai 244.738 aduan. Konten aduan terbanyak kedua adalah fitnah dengan jumlah total sebanyak 57.984.

Kominfo juga menerima aduan masyarakat yang masuk kategori konten yang meresahkan masyarakat, jumlahnya mencapai 53.455.

Konten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks 15.361.

Aduan lainnya yang diterima Kominfo selama 2019 antara lain berkaitan dengan SARA, kekerasan terhadap anak, terorisme dan penyalahgunaan obat terlarang.

Selain menerima aduan masyarakat mengenai konten negatif, Kominfo secara aktif melakukan penelusuran untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap temuan konten, melalui mesin AIS

yang dikelola Subdirektorat Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Kominfo Blokir 4 Ribu Lebih Tekfin Ilegal

<https://www.antaranews.com/berita/1244388/kominfo-blokir-4-ribu-lebih-tekfin-ilegal>

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan teknologi finansial ilegal selama periode 2018-2019.

“Ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari layanan tekfin ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Kominfo dalam keterangan resmi, Jumat.

Data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo menunjukkan terdapat 4.020 situs dan aplikasi tekfin ilegal yang diblokir pada periode Agustus 2018 hingga Desember 2019.

Pada periode Agustus 2018 hingga Desember 2018, Kominfo memblokir total 738 tekfin ilegal, dengan rincian 211 situs dan 527 aplikasi.

Jumlah tekfin ilegal yang diblokir Kominfo melonjak tajam pada 2019, jumlahnya mencapai 3.282. Mulai 2019, Kominfo menambah pencarian aplikasi tekfin ilegal di platform selain Google Play Store, jumlahnya menembus angka 1.356.

Sementara untuk aplikasi yang berasal dari Google Play Store dan YouTube,

Kominfo memblokir 1.085 situs sepanjang 2019. Situs tekfin yang diblokir tahun lalu berjumlah 841.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi tekfin”.

Kominfo sejak 2016 menjadi anggota Stagas Waspada Investasi bentukan OJK, yang bertujuan melindungi masyarakat dari tekfin ilegal.

Selain itu, pada 2017 lalu Kominfo meluncurkan situs cekrekening.id untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Masyarakat juga bisa melaporkan rekening bank yang terkait dengan penipuan, investasi palsu, narkoba hingga terorisme ke situs tersebut.

Miss Lambe Hoaks

Kominfo Masuk Nominasi WSIS Prizes 2020

<https://www.antaraneews.com/berita/1253319/miss-lambe-hoaks-kominfo-masuk-nominasi-wsis-prizes-2020>

Jakarta (ANTARA) - Pada ajang tahunan Anugerah World Summit on the Information Society (WSIS Prizes), program Miss Lambe Hoaks terpilih masuk dalam salah satu nominasi yang dipertandingkan, yakni pada Category 17, Action Lines C10 “*Ethical dimensions of the Information Society*”, sebagai karya unggulan dari Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) mengajak seluruh warganet Indonesia beramai-ramai untuk melakukan *one man one vote* secara daring dengan batas waktu hingga 24 Januari 2020.

Selain Miss Lambe Hoaks, ada delapan proyek karya atau inisiatif Indonesia yang masuk nominasi, yaitu IoT Makers Creation 2019 Kementerian Kominfo, masuk dalam Category 1 “*The role of governments and all*



1 *stakeholders in the promotion of ICTs for development."*

Selanjutnya, BNPB dan Humanitarian OpenStreet-Map Team Indonesia masuk dalam Category 3, "*Access to information and knowledge. City Wide Mapping for Disaster Management Project.*"

Ada pula Siberkreasi (Indonesia's National Movement for Digital Literacy) yang masuk dalam Category 4 "*Capacity building,*" sementara TAKE BACK OUR PRIVACY (privasi.id), ICT Watch, masuk dalam Category 5 "*Building confidence and security in use of ICTs.*"

Kemudian, ICT Literacy Talkshow Suara Madiun, RTIK Madiun, masuk dalam Category 16 "*Media,*" serta Anti Hoax Public Campaign, Mafindo dan #AgenDamai: A Collaborative Digital Campaign, CfDS, masuk dalam Category 17 "*Ethical dimensions of the Information Society.*"

5 Nantinya, lima dari 20 proyek per kategori yang mendapatkan suara terbanyak dari berbagai penjurur dunia, dinobatkan sebagai

Champion (2nd Best). Kemudian, dari lima proyek tersebut dipilih satu oleh para pakar PBB sebagai Winner (Juara Pertama).

Voting daring pada Kompetisi World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020 dapat dilakukan dengan membuka website WSIS <http://www.itu.int> lalu pilih opsi "vote".

Selanjutnya, daftar akun dengan klik tombol *register as a new user* (jika belum memiliki akun). Lalu, lengkapi data yang diminta, dan klik register. Pastikan mengaktifkan dahulu akun WSIS tersebut melalui tautan atau link konfirmasi yang dikirim ke surel yang didaftarkan.

Kemudian, pakai alamat surel dan kata kunci yang telah dikonfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya, cari tombol vote di bagian kanan atas laman, klik Voting Form untuk mulai dukung Indonesia, terakhir Vote For This Project pada delapan nominasi tersebut.

Sejumlah inisiatif unggulan dari komunitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia berhasil masuk dalam nominasi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2012.

Pada WSIS Prizes 2016 ada tiga nominator dari Indonesia yang menghasilkan 1 Champion (Juara Kedua), sedangkan pada WSIS Prizes 2017 terdapat 18 inisiatif

Indonesia yang menghasilkan 1 Winner (Juara Pertama) dan 4 Champion.

Sedangkan pada World Summit on the Information Society (WSIS Prizes) 2018 yang diikuti oleh 463 inisiatif dari berbagai negara, Indonesia merebut 12 posisi *champion* (2nd Best) dalam The World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2018.

Ajang penghargaan inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU) itu menempatkan Indonesia dalam delapan kategori dari 18 kategori yang dikompetisikan.

Portal IndonesiaBaik.id dari Kemkominfo menjadi *winner* untuk kategori "*media*" pada 2018. Sebelumnya, di tahun 2017 gerakan literasi digital Internet Sehat dari ICT Watch menjadi *winner* untuk kategori "*ethical dimensions*".

Selanjutnya, pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019 di Jenewa, Indonesia merebut empat penghargaan Champion dari PBB.

Setelah melalui kompetisi yang ketat, melibatkan 1062 inisiatif yang didaftarkan dari seluruh dunia melalui ajang WSIS Prizes, empat inisiatif Indonesia yaitu Data Bojonegoro (Relawan TIK Indonesia); Baktiku Pada Petani (Telkomsel); Baktiku Negeriku (Telkomsel) dan Sainifik (Mahasiswa Universitas Diponegoro) memenangkan penghargaan.

Sebagai informasi, Miss Lambe Hoaks merupakan program hasil kolaborasi dan sinergi antara Biro Humas Setjen, Tim Aduan Konten Aptika, dan GPR TV Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

Program mingguan ini menayangkan Miss Lambe Hoaks sebagai Tokoh Utama yang melaporkan hasil pantauan mingguan dari Tim Aduan Konten.

Dengan keceriwisan dari tokoh utama yaitu Miss Lambe Hoaks, program ini menceritakan pandangan terkini yang tengah menjadi perbincangan para warganet/netizen di seluruh platform media sosial baik dari Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram maupun portal yang informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Program Lambe Hoaks ini diproduksi pada hari kerja setiap minggunya dan ditayangkan melalui saluran media utamanya yaitu GPR TV serta saluran Media Sosial Kementerian Kominfo yang lain seperti Youtube, Instagram, Twitter, maupun Facebook.

Dengan hadirnya program terbaru dan unggulan hasil kolaborasi dari tiga satuan kerja Kementerian Kominfo ini diharapkan dapat memberikan tayangan yang segar dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di manapun berada.

Lambe Hoaks ini menampilkan informasi-informasi seputar hoaks yang berhasil dikumpulkan selama satu pekan oleh mesin pelacak AIS Kominfo, kemudian ditampilkan oleh Miss Lambe Hoaks sebagai pembawa acara dan tayangkan di seluruh platform media sosial dan sejumlah stasiun TV.

Setiap hari, Kementerian Kominfo menerima informasi aduan konten hoaks. Kemudian aduan yang diterima melalui tiga jalur, yakni melalui mesin pelacak, aduan masyarakat dan laporan atau surat edaran dari instansi atau lembaga pemerintahan itu diverifikasi untuk dikaji kebenarannya.

Kementerian Kominfo berupaya mengurangi penyebaran hoaks karena adanya potensi dampak perpecahan bangsa akibat hoaks.

Akan Ada Unicorn dan Decacorn Baru Indonesia Tahun Ini

<https://www.antaranews.com/berita/1255101/akan-ada-unicorn-dan-decicorn-baru-indonesia-tahun-ini>

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengisyaratkan akan ada perusahaan rintisan yang menjadi unicorn tahun ini.

"Ada beberapa, tapi, jangan saya sebutkan," kata Johnny, ditemui usai acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya unicorn baru, menurut Johnny akan ada unicorn yang naik kelas jadi decacorn tahun ini.

"Ada yang potensial naik jadi unicorn, ada juga unicorn yang naik jadi decacorn," kata Johnny.

Menteri Johnny belum mau memberikan informa-



si sektor mana yang akan menghasilkan unicorn tahun ini, namun menyebutkan unicorn baru itu berasal dari multiplatform.

Indonesia saat ini memiliki empat perusahaan rintisan yang menembus tingkatan unicorn, yaitu memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat, mereka adalah Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan yang terbaru platform pembayaran digital OVO.

Gojek sudah berhasil menembus strata decacorn, satu tingkat di atas unicorn dengan valuasi minimal 10 miliar dolar AS.

Sejak tahun lalu, diperkirakan unicorn baru akan datang dari sektor pendidikan atau kesehatan karena cukup banyak APBN yang digelontorkan terutama untuk sektor pendidikan.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019).

1. Jamin Keamanan Data Negara, Pemerintah akan Bangun JAM

Jakarta, Kominfo - Pemerintah mencanangkan pembangunan jaringan telekomunikasi yang dikelola sendiri. Tujuannya agar keamanan data-data terjamin. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan jaringan mandiri telah dilakukan di sejumlah instansi, seperti TNI dan Kepolisian. Meskipun demikian, Pemerintah perlu membangun secara khusus pengelolaan jaringan mandiri di lingkup Nasional, tapi tidak instan. Hal itu menurutnya perlu proses yang panjang.

"Kita kan mau bangun suatu jaringan taktikal nasional secara khusus, tapi ini kan panjang sekali, perlu ada penelitian, perlu ada koordinasi dengan semua kementerian/lembaga, perlu juga dia menjadi bagian dari kebijakan pemerintah," jelasnya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Menurut Menteri Johnny, ada dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah, pertama soal keamanan dan kedua pelayanan atau operasional.

“Apakah itu dalam RPJMN atau di dalam program-program bentuk lainnya, karena ini ada dua ya, yang satu terkait dengan keamanan dan *security*, yang satu terkait dengan pelayanan dan operasional,” ungkapnya.

Meski sangat diperlukan untuk ketahanan nasional, Menteri Kominfo menyebutkan pemerintah belum punya target kapan tepatnya pengelolaan jaringan secara mandiri terlaksana. “Masih disusun perencananya karena ini suatu yang jangka panjang dan strategis,” ucapnya.

Mengingat proses yang panjang dalam penyusunan perencanaan proyek pembangunan Jaringan Aman Mandiri ini, Menteri Johnny menyebutkan akan mendorong pembuatan dengan teknologi mandiri. “Ya kalo JAM kan kalo aman mandiri, dan *security* kan yang

idealnya buatan sendiri, kalo belum bisa buatan sendiri bagaimana untuk menjaga keamanan dan *security* negara itukan harus diatur dengan baik,” tambah Menteri Johnny. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan hingga kini Jaringan Telekomunikasi Pemerintah Indonesia masih bergantung dengan pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa jaringan telekomunikasi yang rentan praktek penyadapan.

“Itu kita akan membuat suatu jaringan, nama sementara ini Jaringan Aman Mandiri, itu jaringan frekuensi dan sebagainya itu belum terkoordinasi dan masih pakai jaringan komersial, dengan jaringan komersial itu *company*-nya macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. ini mau bikin yg mandiri. Ampun namanya,” ungkapnya.

Selain alasan keamanan, menurut Mahfud dengan pengelolaan jaringan secara mandiri juga akan lebih menjamin ketahanan ekonomi dari praktek - praktek ilegal yang kerap terjadi, terutama di perairan Indonesia.

“Karena itu bisa meng-*cover* juga penyelundupan-penyelundupan di laut, itu untuk ekonominya. lalu keamanan pertahanannya, kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri,” tuturnya.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Kepala BPSDM Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti, Dirjen SDPPI Ismail dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai kerja sama untuk meningkatkan layanan publik bidang frekuensi radio.

2.

Kominfo dan Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama Layanan Publik Frekuensi Radio

Jakarta, Kominfo – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen SDPPI Kominfo) bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDM Kemenhub), melakukan kerja sama untuk meningkatkan layanan publik bidang frekuensi radio.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan bersama antara Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail dan Kepala BPSDM Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Menhub Budi Karya Sumadi di Wisma Antara, Jakarta, Senin (13/01/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kominfo Johnny menyatakan, Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan bersepakat melakukan kerja sama untuk pemanfaatan perangkat radio, peningkatan pelatihan operator radio serta pertukaran informasi yang terkait dengan frekuensi radio.

“Kerjasama ini terkait dengan sinergitas dari sumber daya dan pelatihan dari radio-radio kita, tidak saja perangkat tapi juga pelatihan sumber daya manusia atau operatornya.”

Lebih lanjut, Menteri Johnny memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal SDPPI Kominfo yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

“Tentu saya memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada jajaran Kementerian Kominfo, khususnya Ditjen SDPPI yang dalam diam, dalam senyap telah mengambil bagian yang luar biasa untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Menteri Johnny mengatakan bahwa, Ditjen SDPPI telah memastikan penerimaan negara dari sumber daya yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh yakni frekuensi radio yang tercapai dengan baik, bahkan melewati target.

Ditjen SDPPI Kominfo, kata Menteri Kominfo, juga berhasil memberikan pelayanan yang prima, sehingga Kementerian Kominfo memenuhi harapan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Ini suatu yang perlu menjadi contoh dan panutan bagi kita sekalian, terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatannya dapat melaksanakan secara sungguh-sungguh untuk memastikan pelayanan pemerintahan bisa dilakukan dengan baik bagi masyarakat kita,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kominfo melakukan tiga rangkaian kegiatan secara bersamaan, yakni Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dengan BPSDM Kementerian Perhubungan, Peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan Refleksi Capaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.



3. Menkominfo: Milenial Perlu Kenal Kemajuan Digital Indonesia

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya para milenial tentang potret perkembangan digitalisasi di Indonesia.

“Para milenial kita ini, perlu terus diberikan informasi negaranya itu seperti apa. Kebetulan hari ini terkait dengan pariwisata dan telekomunikasi,” katanya saat menghadiri Indonesia Millennial Summit 2020 di The Tribrata, Jakarta, Sabtu (18/01/2019).

Di hadapan ratusan milenial yang hadir di acara tersebut, Menteri Johnny menyatakan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kehebatan dalam pembangunannya.



“Kita memberikan gambaran, ini loh, potret bangsa dan negaranya yang sudah menjadi bangsa yang sangat besar karena mempunyai infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang hebat,” ujarnya dalam yang diselenggarakan oleh IDN Times itu.

Menteri Kominfo menjelaskan jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring yang menghubungkan seluruh kabupaten dan kota dengan jaringan internet kecepatan tinggi.

“Kita sudah mempunyai *fixed broadband*, ada 340 ribu lebih kilometer fiber optik di darat dan di laut Indonesia yang menghubungkan semua titik-titik di negara kita ini,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Menteri Johnny, Indonesia juga mempunyai *mobile broadband* yang merupakan komitmen antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Saat ini, Indonesia telah memiliki lima satelit.

“Indonesia bersama perusahaan-perusahaan telekomunikasinya menggunakan lima satelit multifungsi untuk memastikan tersedianya internet di mana-mana di Indonesia. Kita sudah membangun *base station* (BTS) di 400 ribu lebih, dan Indonesia akan mempunyai tiga satelit baru,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan milenial Indonesia terus mengembangkan kreativitas dan usaha berbasis digital.

“Nah, dengan mengetahui ini, nanti akan tersedianya internet dan kecepatan yang lebih baik, kita harapkan para milenial kita mengambil bagian di industrinya, apakah itu melalui *platform*, aplikasi-aplikasi atau apa saja untuk menyemarakkan Indonesia di era digital.”

Selain Menkominfo Johnny yang hadir sebagai narasumber di Indonesia Millennial Summit 2029, juga hadir *Chairman Of the Entrepreneurship & Innovation Center IE Business School*, Juan Jose Guemes, dan CEO of Tiket.com George Hendrata.





2020 Kominfo Connect

Johnny G. Plate

Mengawali tahun 2020, Kementerian Kominfo menggelar ajang pertemuan tahunan sivitas pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo. Bertajuk Kominfo Connect 2020, gelaran akbar ini dihadiri ribuan pegawai dari seluruh satuan kerja dan UPT daerah.

Dalam sambutannya, Menteri Kominfo mengingatkan ASN Kominfo untuk memegang teguh nilai Pancasila. "Ini penting sekali, negara berhadapan dengan lingkungan dan tantangan yang luar biasa besarnya," kata Menteri Johnny di Ecovention Hall Ecopark, Ancol, Jakarta, Kamis (30/01/2020)



Johnny G. Plate

Kemeriahan ajang temu pegawai tahunan KominfoConnect 2020. *(kiri atas)* Kompak dengan jaket putihnya, Menteri Kominfo dan jajaran pejabat Eselon I, Staf Ahli, hingga Staf Khusus terlihat menikmati rangkaian acara Kominfo Connect. *(kanan atas)* Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyapa ribuan pegawai dari 8 satuan kerja Kementerian Kominfo yang hadir di Ecovention Hall Ancol, Kamis (30/01/2020).

(bawah)

Menteri Kominfo dengan sukacita turut bergoyang menikmati penampilan Yel-Yel Battle dari tiap satuan kerja. Di sela-sela penampilan, salah satu perwakilan pegawai Kominfo memberikan buket bunga pada Menteri Johnny.

Kominfo Connect





(kiri)

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti membuka Kominfo Connect 2020. Menurut Sekjen Niken, pertemuan akbar tahunan ini digelar untuk meningkatkan kerja sama dalam menjalankan tugas Kementerian Kominfo, menjaga dan meningkatkan infrastruktur konektivitas dan akses telekomunikasi.



(kanan-bawah)

Raut gembira para sivitas Kementerian Kominfo dengan atribut khas masing-masing satuan kerja yang menambah semarak rangkaian Kominfo-Connect 2020.



2020 Kominfo Connect

Talkshow

Kominfo Connect

Talkshow

Rangkaian KominfoConnect 2020 turut diisi dengan talkshow “ASN dan Ancaman Radikalisme di Era Digital”. Dipandu oleh news anchor Metro TV, Zilvia Iskandar, talkshow ini membahas seputar ancaman radikalisme yang saat ini penyebarannya semakin berkembang hingga ke lingkungan ASN. Menghadirkan narasumber Dr. Rima Agristina dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Staf Khusus Menteri Kominfo, Zulfan Lindan; serta Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid.





Kominfo Connect

Yel-Yel Battle

Keseruan aksi Yel-Yel Battle dari tiap satuan kerja Kementerian Kominfo turut meramaikan perhelatan akbar Kominfo Connect 2020. Tim yel-yel dari DITJEN SDPPI (*kiri atas*), BAKTI (*kedua dari kiri*), SETJEN (*tengah atas*), DITJEN PPI (*tengah bawah*), dan DITJEN IKP (*kanan bawah*).



Totalitas tim BAKTI (kedua dari kiri) dengan kostum dan pipi coreng moreng ala militer, serta yel-yel yang menggebu-gebu penuh semangat tanpa tambahan instrumen musik berhasil menarik hati Dewan Juri. BAKTI kembali meraih Juara I Yel-Yel Battle, mempertahankan gelar yang mereka raih di ajang KominfoNext tahun 2019 lalu.



Do's and Dont's yang Wajib Kamu Terapkan Saat Ingin Mengunggah Foto Anak

Hai Sisters, Kamu pasti sering lihat beberapa artis, teman, tetangga, atau bahkan saudaramu mengunggah foto anaknya. Gemas, sih, lihatnya. Tapi sebenarnya, apa yang harus diperhatikan dari kebiasaan itu? Nih beberapa di antaranya:



Faktor Keamanan Anak

Pastikan tidak ada data pribadi dalam foto anak yang kamu unggah ya!



Minta Persetujuan Anak

Apakah anak setuju dan merasa nyaman ketika fotonya diunggah ke media sosial ataupun tidak, biarkan anak membuat pilihan.



Fokus Pada Kegiatan Anak

Lebih baik foto anak saat ia sedang beraktivitas seperti saat sedang menggambar, saat bermain atau olahraga, dan usahakan fokus dengan hal yang sedang dikerjakan anak.



Lebih Baik Unggah Hasil Karyanya

Ini mengajarkan anak bahwa media sosial bukan sekadar eksistensi fisik seseorang, tapi juga wadah untuk mempublikasikan sebuah karya seni.

Nah, selain harus memperhatikan 4 hal di atas, berikut ini beberapa hal yang tidak boleh kamu posting ke media sosial. Apa saja?



Foto Anak Tanpa Busana

Jangan mengunggah foto anak dalam keadaan tanpa busana. Foto-foto itu tidak laik jadi konsumsi publik. Jangan sampai foto itu disalahgunakan pihak lain, ya!



Foto Anak Orang Lain

Sebaiknya tidak menyebarkan atau memberi tag pada foto anak orang lain di media sosial. Sebelum mengunggah foto anak orang lain, mintalah izin orang tua mereka terlebih dahulu.



Identitas Pribadi

Identitas anak sebaiknya tidak dibagikan untuk umum. Seperti nama lengkap, alamat, juga sekolahnya adalah informasi yang rentan disalahgunakan oleh orang yang mencoba berbuat jahat.



Kejadian Memalukan

Perlihatkan kelemahan, ketakutan, atau hal memalukan lainnya dari anak dapat berdampak pada kehidupannya kelak. Hal semacam itu lebih baik disimpan sebagai koleksi pribadi.



Sakit

Kamu keberatan nggak kalau ada orang lain memamerkan fotomu dalam keadaan lusuh, lemas, tak berdaya? Nah, terapkan standar ini sebelum mengunggah foto anak yang sedang sakit.



Aktivitas Yang Nggak Aman

Jangan mengunggah foto anak melakukan aktivitas tak lazim karena dapat memicu kontroversi.

Jadi, nggak boleh sembarangan posting foto anak, ya, Sisters! Kita juga harus bisa menghargai dan melindungi juga data pribadi setiap anak, lho.

Sisters, Kamu Sudah Tahu Definisi Privasi dan Perlindungan Data Pribadi?

Sisters, tahukah kamu bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk dapat melindungi data pribadinya? Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 G yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Perlindungan ini juga mencakup perlindungan atas data pribadinya, lho, Sisters. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi artinya data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga keberanian serta dilindungi kerahasiaannya. Dimana Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Sisters.

Setiap individu tentunya memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, yaitu hak untuk dapat mengatur, meng-edit, mengelola dan menghapus

data pribadi yang dia miliki dan menentukan kapan, bagaimana dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.

Lalu apa saja, sih, yang termasuk ke dalam data pribadi? Berikut beberapa contohnya, Sisters:

Nama Lengkap	Alamat Email
No. Kartu Identitas	Data Lokalisasi
Alamat IP	Riwayat Kesehatan
Penghasilan	dan sebagainya

Tapi sayang sekali, Sisters, Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki Undang-Undang khusus terkait Perlindungan Data Pribadi, walaupun begitu, ada beberapa undang-undang yang sudah memuat unsur perlindungan data pribadi didalamnya.

Nah, sehubungan dengan data pribadi dalam media elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 26 menyebutkan:

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan



Kominfo Minta Waspadai Penipuan dengan Modus Penggantian SIM Card



Kementerian Kominfo mengajak seluruh pihak baik operator seluler, pihak bank dan masyarakat selaku pengguna untuk lebih waspada dan berhati-hati berkaitan dengan modus penipuan registrasi kartu dan menggunakan penggantian Subscriber Identity Module (SIM). Imbauan itu disampaikan setelah beredar upaya pembobolan rekening bank melalui pergantian kartu SIM yang dialami salah satu pengguna beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dalam aturan registrasi kartu sangat jelas bahwa, perlu suatu kehati-hatian dalam melakukan registrasi ataupun pergantian kartu SIM. "Kalau kita lihat dari kasus yang teman-teman ketahui, ini adalah suatu rangkaian, tidak bisa satu saja yang bisa menjadi wujud permasalahan," katanya dalam Konferensi Pers terkait Pembobolan Rekening Bank melalui Pergantian SIM Card dan Isu-isu terkait Perlindungan Data Pribadi di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/01/2019).



Kominfo Connect 2020, Satukan Visi Dukungan Program Prioritas Pemerintah



Jakarta, Kominfo - Pertemuan akbar tahunan sivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika digelar untuk meningkatkan kerja sama untuk menjalankan tugas kementerian. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, penyelenggaraan Kominfo Connect merupakan rangkaian upaya mengimplementasikan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

"Hari ini kita selenggarakan konektivitas antarsatker. Untuk melaksanakan tugas dari Kementerian Kominfo menjaga dan meningkatkan infrastruktur konektivitas dan akses telekomunikasi, baik untuk masyarakat maupun internal," ujarnya dalam Acara Kominfo Connect 2020 di Ecovention Ancol, Jakarta, Kamis (30/01/2020).



Anggota Komisi I DPR RI Mengunjungi NOC Palapa Ring di NTT



RDP bersama Anggota Komisi I DPR RI telah dimulai. Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyahi membawahi bidang telekomunikasi tengah mendengarkan pemaparan Direktur Utama BAKTI, Anang Latif mengenai proyek BAKTI di propinsi Nusa Tenggara Timur.

Anang Latif menjelaskan Palapa Ring sebagai pendukung jaringan eksisting sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan Akses Internet (AI) terus dilakukan agar dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. BAKTI telah membangun sebanyak 717 titik AI yang tersebar lebih dari 20 kabupaten di NTT. Akses Internet ini digunakan oleh sekolah, kantor pemerintahan, karantina pertanian, puskesmas dan pos lintas batas.

BAKTI Kominfo Cup 2020



"Jiwa sportivitas dalam kedua cabang olah raga yang dipertandingkan ini harus bisa diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kejujuran serta sikap patuh terhadap keputusan wasit harus kita bawa dalam menjalankan tugas kita di kantor. Yang disebut wasit dalam hal ini adalah para pengawas yang akan selalu mengawasi pekerjaan kita," demikian sambutan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, pada saat membuka secara resmi Kejuaraan Tenis Meja dan Futsal dalam rangkaian acara Bakti Kominfo Cup 2020, 9 Januari 2020.

Kejuaraan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh BAKTI ini akan dilangsungkan pada tanggal 9 sampai 10 Januari 2020 dan diikuti beberapa kementerian, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), BMKG, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dua Tahun Berturut Kelola Anggaran Terbaik

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu tolak ukur pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan satuan kerja dalam pengelolaan anggaran menjadi penentu keberhasilan pengelolaan anggaran Kementerian Kominfo. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta pada tahun 2018 dan 2019 lalu berhasil meraih predikat Pagu Besar Terbaik dalam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tim KoinfoNext berkesempatan melakukan wawancara jarak jauh dengan Ir. Noor Iza, MSc, Ketua Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta. Didampingi tim keuangannya, Ketua STMM yang menjabat sejak Agustus 2018 ini berbagi pengalaman dan tips pengelolaan anggaran hingga berhasil mendapat predikat Pagu Besar Terbaik selama dua tahun berturut-turut.



Bisa diceritakan sekilas tentang **IKPA, Pak?**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini bukan lomba, tetapi nilai indeks yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang merupakan penilaian atas kinerja pelaksanaan anggaran satker (satuan kerja) dengan 12 kriteria mulai dari hal terkait rencana penarikan dana sampai dengan realisasi penggunaan anggaran berikut laporan pertanggungjawaban bendahara. Jadi ini semacam rapor penilaian bagi masing-masing satker di instansi pemerintah, yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan sejak 2 tahun terakhir.

Menurut Bapak apa yang membuat **STMM, satuan kerja dengan kategori Pagu Besar, bisa mendapat penghargaan IKPA 2 tahun berturut-turut?**

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Yogyakarta sangat mendorong agar pelaksanaan anggaran satker terkait di DIY terus menjaga indikator tersebut. Pelaksanaan anggaran di Sekolah Tinggi Multi Media berjalan sebagaimana satker-satker lain juga termasuk terjadinya penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan anggaran dan optimalisasi yang diperlukan.

Hal yang penting adalah tertib administrasi keuangan sebagaimana hal ini selalu dipandu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta.



Apakah ada strategi baru yang Bapak terapkan dalam pengelolaan anggaran? Seperti membuat kebijakan untuk tertib administrasi, atau program baru untuk penyerapan anggaran, dsb?

Sebenarnya tidak ada strategi khusus untuk IKPA, kuncinya adalah tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Contohnya salah satu dari 12 indikator penilaian IKPA adalah penyampaian data kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak kontrak ditandatangani, maka sebelum jatuh tempo 5 hari kerja data kontrak sudah kita ajukan ke KPPN.

Contohnya lagi untuk penyelesaian tagihan yang harus diajukan ke KPPN maksimal 17 hari kerja, strateginya adalah menyelesaikan proses pembayaran sejak tagihan muncul sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN. Tentunya selain mengikuti ketentuan dari Kemenkeu, juga dibutuhkan koordinasi dari masing-masing bagian pengelola anggaran, yaitu dari pejabat pengadaan, PPK, PPHP, bendahara, PPSPM, dan bagian lainnya.

Untuk tertib administrasi, kami mengikuti seluruh prosedur yang ada, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, maupun peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Kami juga memiliki 3 Buku Standar Operasional yang terkait dengan, bidang pendidikan, bidang umum, dan juga bidang Kemahasiswaan yang didalamnya terdiri dari berbagai jenis SOP terkait ketiga bidang tersebut yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan kegiatan di ST MultiMedia.

Bisa diceritakan juga tentang tertib administrasi dan pengelolaan anggaran di STMM yang selama ini berjalan, Pak?

Seperti apa persiapan dan proses penilaian IKPA tahun ini dan tahun sebelumnya?

Proses penilaian dari Ditjen Perbendaharaan itu dimulai sejak berjalannya tahun anggaran, dan setiap bulannya akan dilakukan penilaian yang dapat dipantau secara online melalui MonevPA (spanint.kemenkeu.go.id). Tidak ada persiapan khusus terkait dengan IKPA ini, tapi kami setiap tahunnya ada pembinaan maupun monitoring dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta, dan juga kemampuan para pengelola anggaran ini terus dikembangkan dengan cara mengikutkan mereka kedalam berbagai macam kegiatan pengembangan SDM, baik itu pelatihan, sosialisasi, workshop, dan lain-lain. Setiap triwulan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kondisi indikator masing-masing satker yang berada di DIY serta memberikan notifikasi atau perhatian bagi satker yang dalam proses proses administrasi terjadi kendala.

Nilai IKPA STMM turut berpengaruh ke nilai IKPA tingkat kementerian, sehingga tahun lalu Kementerian Kominfo berada di peringkat 2 IKPA terbaik dari seluruh kementerian. Bagaimana tanggapan Bapak?

Kami dari Sekolah Tinggi Multi Media ikut bersyukur dapat berkontribusi terhadap kenaikan IKPA Kementerian Kominfo dan berharap ke depan IKPA Kementerian Kominfo dapat semakin meningkat angka perolehan indikatornya.



Apakah predikat Pagu Besar Terbaik ini berpengaruh pada penambahan anggaran Pak?

Insentif penambahan anggaran diberikan kepada Kementerian Kominfo oleh Kementerian Keuangan atas capaian indikator pada IKPA. Selanjutnya Kementerian memanfaatkan insentif penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas Kementerian.

Keberhasilan dua tahun ini tentu tak lepas dari kerja sama tim. Seperti apa apresiasi Bapak kepada staf-staf STMM?

Apa target Bapak untuk pengelolaan anggaran tahun 2020 ini?

Target pengelolaan anggaran 2020 adalah memenuhi harapan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal serapan dan optimalisasi dengan tetap menjaga keberlangsungan anggaran terhadap aspek kebutuhan operasional lembaga pendidikan.

Kami berterima kasih atas kerja keras tim pelaksana anggaran pada Sekolah Tinggi Multi Media. Hal-hal yang berkenaan dengan masukan-masukan dari Kanwil Perbendaharaan dapat ditindaklanjuti secara cepat. Ke depannya kami terus berupaya meningkatkan capaian angka indikator tersebut termasuk secara khusus pada capaian output yang menjadi tambahan indikator baru dalam IKPA mulai tahun anggaran 2020.

HPN

9 FEBRUARI
HARI PERS NASIONAL

Mengapa HPN diperingati setiap 9 Februari?

Sebelumnya, **Hari Pers Nasional** telah **tercantum** dalam salah satu butir **keputusan Kongres ke-28 PWI** di Kota Padang, Sumatera Barat pada 1978. Disetujui bahwa peringatan HPN dilaksanakan **sesuai dengan hari lahir PWI** (Persatuan Wartawan Indonesia).

Dengan beberapa pertimbangan, maka 9 Februari resmi menjadi Hari Pers Nasional. Hal itu didasarkan pada **Keputusan Presiden No 5 tahun 1985 di masa pemerintahan Soeharto**.

Kesepakatan tersebut tak lepas dari kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.

Usulan masyarakat tersebut

disetujui oleh Dewan Pers dalam sidang ke-21 di Bandung.

pada 9 Februari 1961 untuk disampaikan kepada pemerintah. Hingga akhirnya ditetapkan Hari Pers Nasional dan dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di Ibukota Provinsi yang ada di Indonesia.

HPN dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu dalam HPN selalu melibatkan unsur pemerintah daerah yang ditunjuk tidak hanya menjadi tempat tapi juga panitia penyelenggara.

Peranan Pers Pada Masa Pergerakan Nasional

Menguatkan semangat juang rakyat Indonesia

Pers nasional kala itu menyebarkan informasi dan mimpi untuk meraih kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan. Setelah merdeka pun, masih banyak perlawanan dari penjajah seperti agresi militer dan lain-lain. Dengan adanya publikasi melalui pers, seperti surat kabar, majalah, hingga radio; pesan-pesan kemerdekaan dapat lebih tersampaikan kepada khalayak luas.

Menyadarkan rakyat tentang Kondisi Negara


Karena wilayah Indonesia yang terbentang luas, masih ada rakyat yang belum menyadari bagaimana situasi sebenarnya dari negara pada masa pergerakan nasional itu. Adanya berita yang disampaikan pers pada masa itu, menyadarkan rakyat Indonesia mengenai keadaan negara. Kesadaran ini kemudian mengarah pada bangkitnya semangat juang dan perlawanan kepada para penjajah.



ASN Kominfo yang & Pancasilais Penggerak Digitalisasi Indonesia

*Sambutan
Menteri Kominfo
Johnny G. Plate dalam
acara Kominfo Connect 2020*

KOMINFO **next**



Suatu kegembiraan dan kehormatan yang luar biasa bagi Saya bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan seluruh ekosistem Kementerian Komunikasi dan Informatika; melalui Kominfo Connect 2020. Mungkin, kegiatan ini merupakan momentum pertama kalinya saya melakukan pertemuan besar dengan lingkungan Kominfo yang hebat. Di samping itu, kegiatan Kominfo Connect ini sangat penting untuk membangun kekerabatan, keakraban dan saling mengenal sesama keluarga besar Kominfo.

Saya perlu menyampaikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah berpesan hanya ada satu Visi dan Misi negara, yaitu Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada Visi Misi Menteri, Sekjen, Dirjen, Direktur atau Kepala Balai sekalipun, yang ada adalah melaksanakan kebijakan pemerintah melalui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk kemudian melaksanakannya.

Dalam rangka memenuhi Visi dan Misi itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Kementerian Kominfo mempunyai peran yang luar biasa besar di era teknologi digital saat ini. Sering juga saya sampaikan bahwa, ASN harus menjadi turbin atau gerakannya pemerintahan dan birokrasi. Sebab, tanpa ASN yang hebat, maka turbinnya tidak bisa hebat dalam mendorong laju dan kemajuan pemerintahan dan tata kelola bernegara. Oleh karenanya, menjadi seorang ASN membutuhkan kriteria-kriteria yang luar biasa. Bukan lagi rahasia umum, proses pendaftaran sebagai calon ASN pun telah dilewati dengan berbagai syarat yang kompetitif, hanya putra-putri bangsa hebat-lah yang bisa menjadi ASN karena mereka berasal dari lembaga-lembaga pendidikan yang juga luar biasa hebatnya.

Kita berbangga bahwa yang hadir dalam Kominfo Connect adalah putra-putri terbaik yang dimiliki bangsa ini di bidang telekomunikasi dan informatika. Tentu yang menjadi harapan bersama

setelah purna tugas mengabdikan diri sebagai abdi negara, tugas ASN belum selesai begitu saja, ASN harus meneruskan pengabdianannya dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi menuju penyelenggaraan negara yang hebat pula.

Tuntutan terhadap ASN saat ini tidak sekedar kompetisi, pengalaman dan latar belakang tugas yang dilakukan, tidak saja tentang kemampuan teknis dan managerial.

“**Semangat ASN adalah semangat ideologi dan konstitusi negara yang harus mengalir di dalam pembuluh darah.**”

Lebih dari itu, ASN juga dituntut untuk menjadi penggerak bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. ASN yang hebat adalah ASN yang jiwa Pancasila-nya melekat di dalam dada masing-masing, ketaatan pada konstitusi juga begitu hebat dan kuat sejalan dengan tarikan dan hembusan nafasnya. Semangat ASN adalah semangat ideologi dan konstitusi negara yang harus mengalir di dalam pembuluh darah.

Ini penting sekali, karena negara kita saat ini berhadapan dalam lingkungan dan tantangan global yang luar biasa besarnya juga.

Saya berharap kita tidak hanya melihat ASN secara linear semata, seolah-olah terbatas pada gerakan-gerakan radikal dan separatisme, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Tidak saja itu dan bukan itu. Tapi justru dengan semua gerakan-gerakan geostrategis yang mempengaruhi lingkungan global, di mana Indonesia membutuhkan ASN berjiwa Pancasila dan taat konstitusi harus betul-betul berada di dalam darah, jiwa dan raganya. Saya meyakini kegiatan Kominfo Connect sebagai instrument membakar semangat kerjasama dari ASN untuk selalu menumbuhkan rasa kecintaannya pada bangsa dan negara dalam diri masing-masing.

Kita sering melihat banyak sorotan terkait dengan Kementerian Kominfo dalam berbagai hal. Sorotan-sorotan negatif atau yang bernada khawatir harus kita jawab dengan penuh optimisme,



harus kita jawab bahwa ASN Kominfo adalah ASN Pancasila dan taat konstitusi negara. Itulah gagasan besar yang harus ada dalam relung hati, pembuluh darah, jiwa dan raga kita. Modal besar ASN Kominfo adalah memiliki gagasan besar dalam menjawab tantangan demi tantangan global yang menjadi tugas kita saat ini.

Tugas dan peran Kementerian Kominfo tidak mudah. Kenapa? Karena dunia telah bermigrasi dan bertransformasi, kendati demikian, Indonesia juga bermigrasi dan bertransformasi menuju bangsa dan negara digital. Berkaitan dengan inilah ASN Kominfo hadir menghantarkan Indonesia yang kita cintai ini untuk masuk ke era digitalisasi, mulai

Kominfo dan mitra kerja di bidang telekomunikasi dan informatika adalah jantungnya Indonesia yang memastikan tersedianya broadband secara merata di seluruh Tanah Air.

dari pembangunan infrastruktur hulu sampai pada pemanfaatan teknologinya di hilir. Mulai dari penyiapan regulasi primer sampai pelaksanaan tugas manajemen *day to day* yang kita lakukan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif berjalan pun menuntut kita untuk hadir bersama mitra kerja operator seluler. Kominfo dan mitra kerja di bidang telekomunikasi dan informatika adalah jantungnya Indonesia yang memastikan tersedianya *broadband* secara merata di seluruh Tanah Air. Pemerintah juga telah menggelar *fiber optic* di darat maupun laut di hampir



seluruh penjurus Indonesia. Tapi itu saja belum cukup, kita masih mempunyai tugas menghadirkan sinyal di lingkungan masyarakat di mana mereka berada, sebagaimana istilah yang sering digunakan di Kominfo yaitu *the last mile fiber optic*.

Demikian pula, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang secara besar-besaran dilakukan Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bersama operator seluler yang beroperasi di Indonesia, komitmen membangun ratusan ribu bahkan hampir setengah juta Base Transceiver Station (BTS) untuk

menjangkau dan menghadirkan sinyal di lingkungan masyarakat. Hadirnya BTS juga harus menjangkau *the last mile* kepada saudara-saudara kita yang belum tersentuh jaringan seluler seperti di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dan sebagiannya berada di wilayah yang sangat sulit dan jauh.

Oleh karenanya, tugas kita saat ini adalah memastikan *mobile broadband* tersedia untuk meng-cover wilayah nasional kita, baik oleh operator seluler maupun melalui BAKTI. Memang ini semuanya tidak murah, kita butuh triliunan rupiah. Sangat mahal. Di sisi lainnya, kita juga harus memastikan pemanfaatan penggunaan uang negara tepat sasaran, efisien dan tepat waktu. Inilah pekerjaan kolektif lintas kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya seluruh ekosistem Kominfo.



Dari aspek regulasi dan payung hukum, kita membutuhkan regulasi yang hebat untuk mempercepat dan membuat pengambilan keputusan yang lancar, karenanya menjadi perhatian kita semua saat ini untuk memastikan regulasi yang sudah masuk dalam prioritas Prolegnas 2020 harus diselesaikan dengan baik. Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI dalam rangka menindaklanjuti Rancangan

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Saya mengajak kita semua mengawal bersama-sama dan mengambil bagian di dalamnya agar RUU PDP relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia saat ini dan di masa depan.

Selain RUU PDP, pemerintah juga menyampaikan kepada DPR tentang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law cipta lapangan pekerjaan, Omnibus Law yang memudahkan investasi di dalam negeri dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Omnibus Law yang memastikan perlindungan terhadap usaha kecil, mikro, ultra mikro dan menengah. Omnibus Law yang memastikan tercipta dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga terampil Indonesia.

Saya mengajak ASN Kominfo agar jangan sampai termakan gosip, termakan hoaks dan termakan disinformasi. Kalau saja ASN Kominfo terpapar hoaks, disinformasi dan gosip maka gagal lah keseluruhan usaha kita untuk menghadirkan era



digital yang bermanfaat dan baik untuk bangsa dan negara kita. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul.

Presiden Joko Widodo melalui lima program prioritasnya juga menjadi suatu keharusan bersama untuk diaplikasikan oleh seluruh ASN, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi dan nilai tambah terhadap sumber daya alam Indonesia yang tidak saja menjual dalam bongkahan nya, tetapi setelah diproses dimasukkan untuk mendapatkan nilai tambah.

Termasuk sumber daya yang tidak bisa kita lihat dan merasakan dengan panca indera, yakni spektrum frekuensi yang tata kelolanya berada dibawa Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo. Kita juga perlu melakukan *farming* dan *refarming* agar keseluruhan spek-



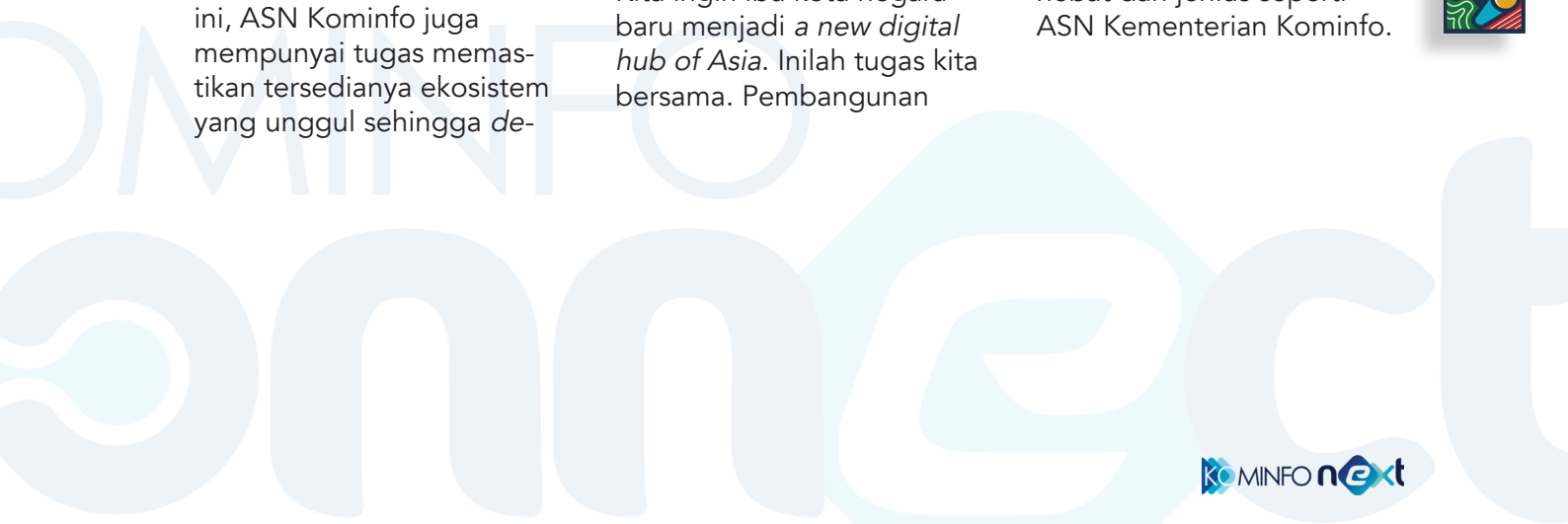


trum frekuensi memberikan manfaat dalam rangka menghantar bangsa dan rakyat Indonesia menuju bangsa digital, termasuk di dalamnya mempersiapkan secara sungguh-sungguh masa depan yang dimaksud dengan teknologi generasi ke-5 atau G5.

Sebagai penutup dari pesan saya di Kominfo Connect ini, ASN Kominfo juga mempunyai tugas memastikan tersedianya ekosistem yang unggul sehingga de-

ployment 5G dapat dilakukan dengan baik. Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Ibukota negara baru nantinya adalah daerah yang dilengkapi sarana dan prasarana teknologi seperti *robotic, artificial intelligence, machine learning* maupun *big data* yang harus kita siapkan infrastruktur dan ekosistemnya. Kita ingin ibu kota negara baru menjadi *a new digital hub of Asia*. Inilah tugas kita bersama. Pembangunan

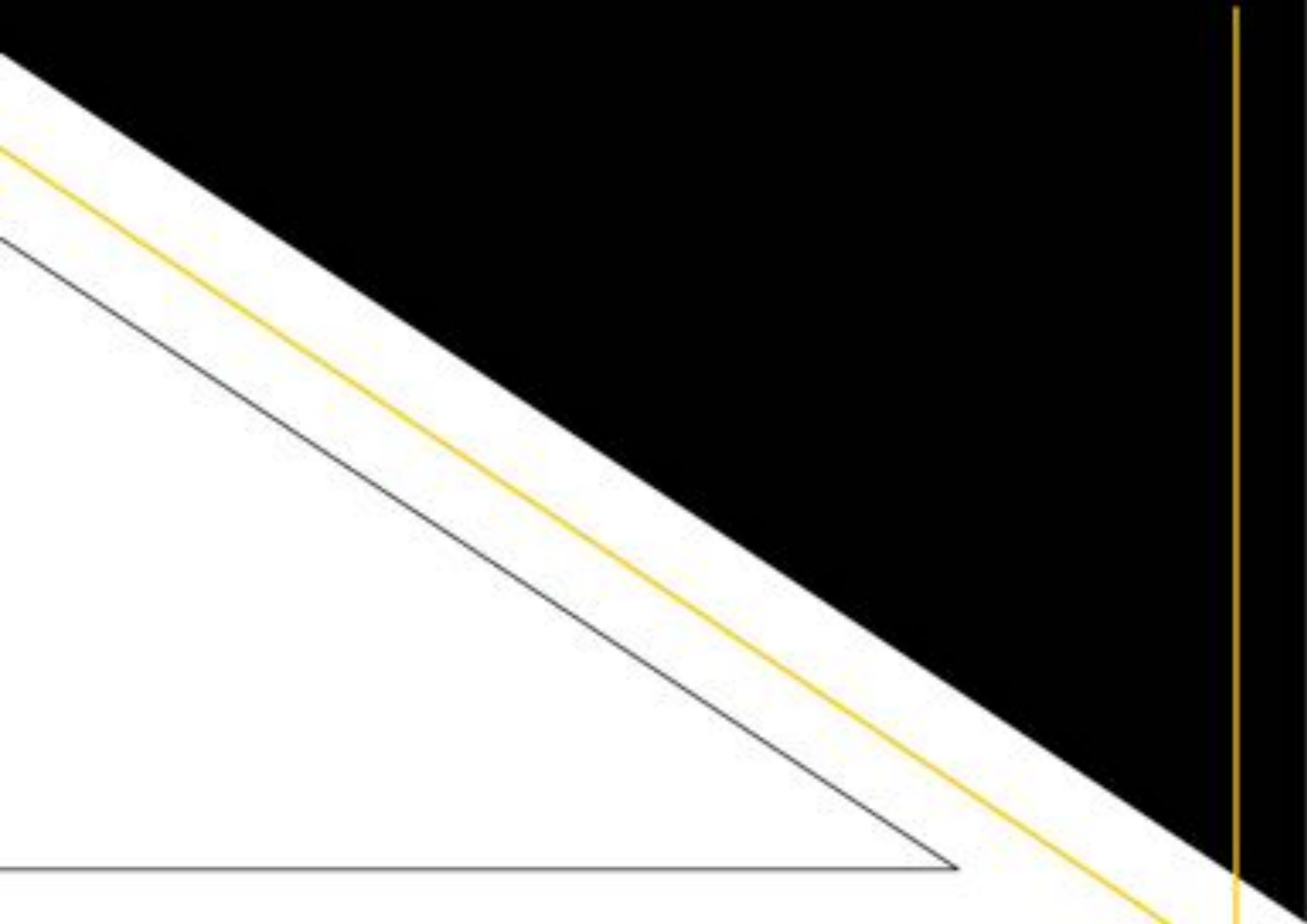
infrastruktur yang sudah dilakukan dengan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya itu tentunya digunakan dengan baik demi kepentingan pertama dan utama untuk masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya meyakini, semua penghargaan dan karya-karya terbaik adalah hasil kerjasama dari orang-orang hebat dan jenius seperti ASN Kementerian Kominfo.





**Putar
180°
untuk
melanjutkan**

Putar
180°
untuk
melanjutkan





#DIGITALINAJA

Hai Talenta Digital Siapkan Diri Kamu!

Raih Beasiswa Pelatihan dan Sertifikasi Digital Talent Scholarship tahun 2020 Diselenggarakan di Berbagai Kota se-Indonesia

Akademi

- Fresh Graduate Academy
- Vocational School Graduate Academy
- Coding Teacher Academy
- Online Academy

Tema Pelatihan

Artificial Intelligence
Big Data Analytics
CCNA Cybersecurity
Cyberoperations
CoreSystem Administrator
Data Scientist
Middleware Developer

Intermediate Animator
Junior Web Developer
Junior Mobile Programmer
Junior Graphic Designer
Junior Network Administrator
Drive Tester
Multimedia Designer

IT Essentials
Programming Essential in Python
Digital Communicator
Digital Marketing
Fintech
IT for Dealer

- Regional Development Academy
- Digital Entrepreneur Academy
- Thematic Academy

GRATIS



Dan masih banyak tema pelatihan baru lainnya!

Untuk informasi dan perkembangan terkini kunjungi situs dan media sosial DTS :

- 📍 digital_talent_kominfo
- 📧 digital_talent_kominfo
- 📌 Digital Talent Scholarship

digitaltalent.kominfo.go.id



RUU PDP TIDAK AKAN BERJALAN SESUAI KEINGINAN YANG DIHARAPKAN, APABILA KESADARAN DAN PEMAHAMAN AKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIVADI SENDIRI KADANG MASIH KITA ABAIKAN.

RUU PDP ini secara komprehensif mengatur data pribadi yang bersifat publik dan privat, yang di dalamnya diatur tentang jenis-jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data dan processor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat serta ketentuan pidana.

Tertapas dari upaya memindahkan data pribadi dari penyimpanan dan pemrosesan data yang kerap memisahkan masyarakat, RUU PDP sebenarnya hanyalah instrumen hukum yang membantu setiap warga negara dalam melindungi data pribadinya.



berbanding jauh dengan Indonesia, sehingga potensi dan ancaman pencurian data jauh lebih besar di Tanah Air. Tapak di sisi percepatan regulasi berkaitan dengan perlindungan data, Indonesia memang tertinggal. Oleh karena itu, kita punya harapan yang sama, bahwa Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN, dan ke 133 di dunia yang memiliki UU tentang perlindungan data pribadi.

Upaya perlindungan data pribadi sebenarnya sudah diatur secara sektoral dan partial pada 31 peraturan perundang-undangan, seperti diantaranya UU Hak Asasi Manusia, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbankan, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Telekomunikasi. Demikian pula termasuk dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi regulasi-regulasi ini memerlukan payung hukum, memerlukan Undang-Undang yang secara komprehensif diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengurusan dan penggunaan sanksi atas penggunaan data pribadi.

Jika RUU PDP nantinya diadukan, saya pribadi meyakini kesadaran masyarakat akan data pribadi yang disalahgunakan akan didukung oleh negara. Sebab, melihat proses demi proses politik yang terlewat hingga perjalanan pemerintah mengenai RUU PDP kepada DPR bisa dibilang berjalan baik.

Berdasarkan penjelasan yang dimaklud dalam RUU PDP, lingkup pengaturannya berlaku untuk sektor publik dan sektor pemerintah. Sektor publik yakni pemerintah, sementara sektor privat meliputi perusahaan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.



perumbuhan UMKM, serta menghadrkan lebih banyak usaha mikro kecil dan menengah. Namun kembali lagi, jika perkembangan industri digital itu tidak didukung dengan regulasi primer atau payung hukum yang kuat, maka orang akan lebih cenderung melihat ancaman atas maraknya pencurian data pribadi. Beberapa catatan di atas hanyalah sebagian kecil dari pentingnya kehadiran RUU PDR.

Menantan Merdeka Data Kita

Pentingnya perlindungan data pribadi memang sudah lama menarik perhatian negara-negara di dunia. Indonesia pun demikian. Saat ini, setidaknya sudah ada 132 negara yang memiliki Undang-Undang perlindungan data. Di ASEAN sendiri, ada Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand yang telah mengadopsi payung hukum perlindungan data. Keempat negara ini sebenarnya jika dilihat dari populasi penduduk dan pengguna internet tentu

ketakutan untuk berdatang atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terepas dari upaya negara melindungi data pribadi warga negaranya, RUU PDR juga memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Penilaian antar platform digital memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional, sehingga akterisasi antara perlindungan data dan mendorong tumbuh pesatnya ekonomi digital harus menjadi konsekuensi pemerintah.

Kenapa? Karena dalam beberapa tahun, Indonesia setidaknya telah memiliki 5 startup Unicorn yang salah satu di antaranya resmi berbentuk decacom yakni diantaranya Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak dan OVO. Dampak ekosistem startup digital adalah membuka peluang kerja, mendorong

perwujudan RRU PDR ini karena bisa dipahami oleh masyarakat luas. Secara personal, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologi, RRU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi, khususnya di era digital, dan secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

Pentingnya RUU PDP disadari juga oleh Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, pada wawancara pada 18 Desember 2019 mengungkapkan 3 alasan pentingnya realisasi dari RUU perlindungan data pribadi :

1. Data penting bagi Indonesia untuk memastikan kedaulatan data dari Indonesia itu sendiri sehubungan dengan keinginan Indonesia untuk beranjak menjadi negara digital
2. Pemilik data juga harus diperhatikan perlindungan privasinya. Yang dimaksudkan disini bahwa 'data owner' juga memiliki kewajiban untuk datanya apakah telah diperbaharui secara berkala dan apa pemrosesan datanya dilakukan dengan benar.
3. Pemakai data itu sendiri. Disampaikan Johnny bahwa pemakai data perlu memastikan dan mendapatkan data-data yang akurat, tepat dan valid.

definisi data pribadi dalam RUU PDP adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang terdendikasi dan atau dapat didendikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi

diharapkan dilakukan oleh semua pihak baik dalam bentuk elektronik maupun konvensional. Menyadari pentingnya RUU PDP tersebut, berdasarkan masukan dan pertimbangan pada Rapat PANJA DPR RI dan Pemerintah telah mendiskusikan secara mendalam dan intensif dengan hasil bahwa RUU PDP masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di

urutan ke-44. Dengan demikian, saat RUU PDP diundangkan maka diharapkan dapat mengeliminir kasus-kasus penyelesaian kasus penyelesaian data pribadi. Selain itu, diharapkan juga akan meningkatkan arus investasi ke Indonesia karena telah ada jaminan perlindungan data pribadi.



September lalu. Sebanyak 35 juta data pribadi penumpang dari kedua anak perusahaan Lion Group yang terbagi dalam dua basis data (data base) dan tersimpan dalam bucket milik Amazon yang terbuka di web telah beredar sebagian lebih di forum pertukaran data.

Menghadapi hal tersebut, sikap waspada harus selalu diterapkan di era Revolusi Industri 4.0 yang membuat kesempatan saja mengakses data pribadi kita menjadi lebih besar.

Akan tetapi, disadari bahwa untuk menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi dan peningkatan kesadaran untuk bersikap waspada akan data pribadi bukan suatu hal yang mudah. Untuk itu, dapat diawali dengan dundangkannya RUU PDP.

Mengingat pentingnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, banyak pihak yang meminta agar Pemerintah segera mengeluarkan Surat Presiden agar RUU PDP dapat segera dikum ke DPR RI untuk bisa langsung diproses pembahasan pada awal masa sidang selanjutnya.

Urgensi dundangkannya RUU PDP karena saat ini ada 32 undang-undang yang substansinya menyinggung persoalan data pribadi. Undang-undang itu terutama mengatur perihal

bagaimana lembaga/nasabah dalam mengakses data pribadi. Hanya saja, karena masih ada ego sektoral, penerapan teknis undang-undang tersebut saling bertumpang tindih. Selain itu, dinilai bahwa ada kekosongan regulasi perlindungan data pribadi yang secara komprehensif dapat melindungi data pribadi seluruh warga negara. Untuk itu, RUU PDP nantinya mengkondisikan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang sudah ada tersebut dan secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga.

Rapat Finalisasi RUU PDP yang diadakan oleh Kementerian Kominfo hari Kamis, 21 November 2019, telah menyempurnakan pengaturan dalam RUU PDP antara lain definisi korporasi dan memasukkan ketentuan untuk penyempurnaan materi yakni pembertahanan kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui media massa dan/atau media elektronik, penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa, alat bukti yang sah termasuk alat bukti elektronik, dan apabila diperlukan proses penyelesaian sengketa dan/atau pengadilan dapat dilakukan secara tertutup.

Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa

R-05/Pw/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sering dengan Revolusi Industri 4.0 dan peningkatan pengarsipan mengenai data pribadi, diakui bahwa dalam dunia digital, data pribadi sangat rentan disalahgunakan. Sejumlah kasus kebocoran data pribadi menjadi perhatian (GDPR) yang mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan diadopsi oleh otoritas pemerintahan di Uni Eropa menganutkan tingkat pelindungan yang sama dan negara-negara yang bekerja sama dengan Uni Eropa.

Dengan adanya tren pelindungan data pribadi tersebut, kondisi terkini saat ini Amerika Serikat telah mengeluarkan The National Security and Personal Data Protection Act of 2019. Selain itu, India sedang membahas mengenai Personal Data Protection Bill of 2019. Pun Pemerintah Indonesia telah menyampaikan secara resmi kepada DPR RI Naskah RUU PDP melalui Surat Presiden No. R/05/Pw/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sering dengan Revolusi Industri 4.0 dan peningkatan pengarsipan mengenai data pribadi, diakui bahwa dalam dunia digital, data pribadi sangat rentan disalahgunakan. Sejumlah kasus kebocoran data pribadi menjadi perhatian (GDPR) yang mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan diadopsi oleh otoritas pemerintahan di Uni Eropa menganutkan tingkat pelindungan yang sama dan negara-negara yang bekerja sama dengan Uni Eropa.

Dengan adanya tren pelindungan data pribadi tersebut, kondisi terkini saat ini Amerika Serikat telah mengeluarkan The National Security and Personal Data Protection Act of 2019. Selain itu, India sedang membahas mengenai Personal Data Protection Bill of 2019. Pun Pemerintah Indonesia telah menyampaikan secara resmi kepada DPR RI Naskah RUU PDP melalui Surat Presiden No.

Untuk menjangkau investasi tersebut, Indonesia harus mengadopsi tren terkini di dunia, salah satunya mengenai pelindungan data pribadi. Salah satu acuan awal pelindungan data pribadi dikeluarkan oleh Uni Eropa yakni peraturan pelindungan data yang komprehensif dan berorientasi pada privasi pengguna yang disebut General Data Protection Regulation (GDPR) yang mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan diadopsi oleh otoritas pemerintahan di Uni Eropa menganutkan tingkat pelindungan yang sama dan negara-negara yang bekerja sama dengan Uni Eropa.

Dengan adanya tren pelindungan data pribadi tersebut, kondisi terkini saat ini Amerika Serikat telah mengeluarkan The National Security and Personal Data Protection Act of 2019. Selain itu, India sedang membahas mengenai Personal Data Protection Bill of 2019. Pun Pemerintah Indonesia telah menyampaikan secara resmi kepada DPR RI Naskah RUU PDP melalui Surat Presiden No.

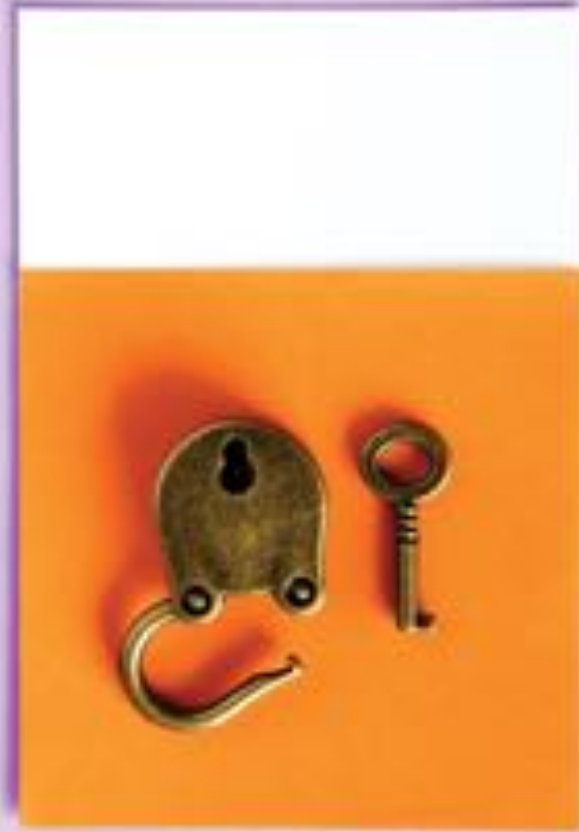
oleh kebocoran data yang terjadi sebelumnya. Itu artinya tidak ada kendali bebas dalam ekspresi di media sosial karena pengguna telah terjelek dalam konsultasi politik.

Lantas, bagaimana dampak kebocoran data pribadi tersebut bagi orang Indonesia? Apakah skandal semacam itu akan dipikirkan tanpa khawatir akan terjadi kebocoran data lain yang mungkin lebih masif dengan efek yang lebih besar? ***

Perkembangan teknologi saat ini membawa ke era Revolusi Industri 4.0 yang gaungnya juga terus dibahas di Indonesia. Apalagi sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0. Presiden berharap, Industri 4.0 tersebut bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Implementasi revolusi industri generasi keempat itu tentunya harus diikuti dengan pembentukan ekosistem yang sehat dan berkesinambungan, agar efektif dan dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi.

RUU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Olekt Ary Firta Nardini
Kepala Subbagian Perencanaan
Perundang-undangan III
Biro Hukum Kementerian Koordinator



S kandal kebocoran data pengguna Facebook oleh perusahaan konsultasi politik Cambridge Analytica di tahun 2014 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia yang gemar bermedia sosial dengan mengunggah data pribadi, baik dalam bentuk multimedia maupun data digital lainnya. Dan kebocoran 87 juta informasi pribadi pengguna media sosial terbesar di dunia itu, mendapat data orang Indonesia sejumlah 1,3 persen atau 1,1 juta data pengguna yang bocor.

Secara garis besar, prosedur yang dilakukan perusahaan konsultasi politik itu adalah mengumpulkan profil jutaan pengguna media sosial yang diolah untuk membangun model yang dapat digunakan untuk eksploitasi preferensi individu yang aktif di media sosial bukan Mark Zuckerberg tersebut. Peta perbedaan pengguna diolah dan dijadikan sebagai target audiens iklan digital yang sangat spesifik atau disebut juga micro-targeted online advertisement.

Propaganda online (daring) tersebut memperhatikan informasi demografi, kontak pribadi, jejaring pertemanan, kecenderungan politik, sampai sikap atas sebuah persoalan publik. Keputusan bahkan sekedar kecenderungan orang dalam membuat status atau pendirian jejepol telah sangat dipengaruhi

Kominfo sendiri! membangun amanah yang tidak ringan untuk mewujudkan Smart - Government ini!

Mandat kepada Kemkominfo

Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah dalam proses transformasi digital pemerintahan. Perpres SPBE telah mengatur distribusi tanggungjawab kepada beberapa Kementerian dan LPNK. Kominfo sendiri membangun amanah yang tidak ringan untuk mewujudkan Smart-Government ini, beberapa di antaranya:

1. Penyelenggaraan Intra-Struktur SPBE, yang mencakup :

- Pusat Data Nasional (DCN), sebagai upaya untuk mereduksi jumlah Data Center sebagai upaya untuk mereduksi jumlah Data Center yang saat ini dioperasikan oleh K/L/D secara signifikan.
- Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai medium transmisi data dan informasi yang aman, yang menghubungkan seluruh instansi pemerintah hingga pengguna layanan e-Government Indonesia.
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), atau sistem interoperabilitas layanan pemerintahan nasional. Sistem ini akan menjadi pusat integrasi layanan dan komunikasi antar data dan sistem informasi/aplikasi SPBE, termasuk akses berbagai data secara terkontrol bagi instansi non pemerintah, yang sber terjadi.

4. Dukungan Bigdata Analytic as a Service (BaaS) dan Artificial Intelligence (AaaS). Teknologi Bigdata dan AI merupakan teknologi yang tidak murah. Betapa mahalnya bila setiap instansi pemerintahan harus mendapatkan secara masing-masing.
5. Solusi Security as a Service (SCaaS). Serangan siber merupakan momok yang cukup menakutkan bagi sebagian besar pengelola TK pemerintah. Belajar security juga tidak murah. Oleh karena itu, solusi penyelesaian teknologi security yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi yang masih mengelola ekosistem TK sendiri harus disediakan untuk alasan efisiensi dan efektifitas pencegahan gangguan serangan siber yang terjadi.

Tantangan Dalam Menciptakan Smart Government Indonesia — Part II

Strategi Transformasi

Pemerintah Indonesia dibuntut untuk berani melakukan transformasi secara cepat. Komitmen untuk menjadi NKRI harus dijawab dengan keinginan untuk gubub (kebersamaan) dalam kerangka NKRI harus dispons sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan satu ekosistem pemerintahan yang kuat secara Bersama-sama. Ego sektoral harus dihindarkan untuk kepentingan nasional.

Data menunjukkan begitu luas wilayah Indonesia, begitu besar aset TIK pemerintah namun tidak saling "berbicara", begitu banyak aplikasi dijalankan, begitu besar resiko keamanan informasi dan resiko gangguan terhadap kedaulatan data dan informasi bangsa (termasuk Data Pribadi), dan kapasitas SDM yang belum optimal yang menyebabkan TIK pemerintahan tidak dikelola dengan baik, maka solusi efektif menuju Smart-Government yang telah disepakati adalah penerapan Government Cloud Computing.

Mengapa harus dengan solusi berbasis cloud? Karena akan butuh waktu yang sangat lama untuk meng-install aplikasi satu persatu pada 629 K/L/D, 6000 lebih kecamatan. Dengan skema cloud, Pemerintah secara nasional cukup menyediakan satu aplikasi cloud untuk dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah hingga di tingkat desa.

Solusi Government Cloud Computing yang tegas dinyatakan dalam Perpres SPBE akan diwujudkan dalam beberapa upaya, di antaranya:

1. Penyediaan Infrastructure as a Service (IaaS), sehingga instansi pemerintah tidak harus memiliki infrastruktur sendiri-

2. Penyediaan Platform as a Service (PaaS). Solusi ini akan menekan belanja platform yang saat ini terjadi secara duplikatif dan kurang optimal permanfaatannya. Belanja platform TIK, seperti OS proprietary dapat ditekan semaksimal mungkin, bahkan memanfaatkan Open Source Software yang mampu menekan belanja secara maksimal.
3. Penerapan Software as a Service (SaaS), yang secara aplikatif diwujudkan melalui kebijakan Aplikasi Umum SPBE secara kongkrit secara bertahap. Pemerintah akan menyetor



BAMBANG DWI ANGGONO

DIREKTUR LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA



Sumber foto: by Marco Oliveira on Unsplash

Kolaborasi menjadi kunci untuk menyapa dunia dari jendela digital Indonesia.

lapkan sarana dan prasarana pendukung seperti infrastruktur telekomunikasi serta talenta digital yang unggul, maka puncak bonus demografi justru memperambat aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang disediakan, kolaborasi dan eksekusi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan secara terus menerus dilakukan agar menghasilkan manusia digital yang unggul, peluang memperbaiki disparitas sosial dan kesenjangan digital semakin mudah, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara maju bukan lagi sebagai slogan. Pada intinya, kolaborasi dan akselerasi menjadi kunci untuk men-

ing dan ekosistem digital lainnya. Secara kuantitatif, Kominfo menerbitkan 9 juta digital talent hingga tahun 2035. Artinya, sekitar 600 ribu lebih digital talent harus dilahirkan setiap tahunnya. Jika talenta-talenta ini dipersiapkan dengan baik, terstruktur dan sistematis melalui konsep pembangunan dari hulu ke hilir, maka Indonesia optimis menjadi negara maju karena memiliki manusia digital yang mampu bersaing di kancah global. Namun sebaliknya, pemerintah dan generasi anak bangsa tidak mengambil kesempatan yang baik ini, Indonesia hanya bisa menjadi penonton.

Setidaknya di tahun 2030, Indonesia juga diprediksi mengalami masa puncak bonus demografi, di mana dari jumlah penduduk Indonesia, usia produktif rata-rata 15-64 tahun jauh lebih besar dibanding usia non produktif, yakni di bawah usia 15 tahun dan di atas 64 tahun. Sederhananya, generasi milenial yang saat ini berusia 15-30 tahun akan menikmati puncak bonus demografi di tahun 2030. Bisa jadi ancaman bisa juga peluang. Ancamanya, jika negara ini tidak meny-

main utama yang memastikannya ekosistem digital di negara ini hadir sebagai pemenang.

Kementerian Kominfo juga mempunyai program Digital Talent Scholarship atau DTS. Program ini membuka kesempatan kepada anak muda maksimal berusia 29 tahun untuk mengenal teknologi digital lebih dekat. Setidaknya ada empat pelatihan digital talent yaitu Vocational School Graduate Academy (VSGA), Fresh Graduate Academy (FGA), Coding Teacher Academy (CTA) dan Online Academy (OA) dengan kategori peserta umum dan profesional yang disabilitas.

[Empat Pelatihan Digital Talent Scholarship Kominfo. Diperoleh dari <https://digitaltalent.kominfo.go.id/> pada 19 Januari 2020]

Selain pemerintah, digital talent juga menjadi program prioritas perusahaan-perusahaan nasional yang mengkomodifikasi potensi anak bangsa.

Inilah manusia digital Indonesia yang akan dibimbing dan dilatih untuk menguasai Artificial Intelligence (AI), Big Data, Robotic Machine Learning, Cloud Comput-

ing dan ekosistem digital lainnya. Secara kuantitatif, Kominfo menerbitkan 9 juta digital talent hingga tahun 2035. Artinya, sekitar 600 ribu lebih digital talent harus dilahirkan setiap tahunnya. Jika talenta-talenta ini dipersiapkan dengan baik, terstruktur dan sistematis melalui konsep pembangunan dari hulu ke hilir, maka Indonesia optimis menjadi negara maju karena memiliki manusia digital yang mampu bersaing di kancah global. Namun sebaliknya, pemerintah dan generasi anak bangsa tidak mengambil kesempatan yang baik ini, Indonesia hanya bisa menjadi penonton.

Setidaknya di tahun 2030, Indonesia juga diprediksi mengalami masa puncak bonus demografi, di mana dari jumlah penduduk Indonesia, usia produktif rata-rata 15-64 tahun jauh lebih besar dibanding usia non produktif, yakni di bawah usia 15 tahun dan di atas 64 tahun. Sederhananya, generasi milenial yang saat ini berusia 15-30 tahun akan menikmati puncak bonus demografi di tahun 2030. Bisa jadi ancaman bisa juga peluang. Ancamanya, jika negara ini tidak meny-

dibagi menjadi tiga paket yakni, paket Barat, Tengah dan Timur yang secara keseluruhan telah resmi beroperasi dan direvisi akhir 2019 lalu.

Sedangkan akses internet dan penyediaan BTS hadir untuk menjangkau wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpendiri) dalam mengurangi kesenjangan teknologi. Akses internet disediakan untuk menjangkau sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T. Demikian juga dengan penyediaan BTS di 3T yang pelaksanaan strateginya untuk menyediakan layanan seluler telepon dasar di daerah-daerah blankspot yang belum mendapatkan sinyal seluler. Selain intras-ruktur telekomunikasi yang kerap disebut tol langit dan tol darat, tol udara atau Satelit Mufungsi juga menjadi fokus pembangunan pemerataan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara Badan Koordinasi Pemasangan Modal (BKPM) dengan Kementerian Kominfo yang menghadirkan teknologi terbaru yaitu high throughput satelite [ibid]

Dengan demikian, infrastruktur telekomunikasi menjadi bagian dari naca kerja Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dan pinggirannya serta menfasilitasi pembangunan wajah pembangunan Indonesia Sentris.

Lahirnya Manusia Digital Indonesia

Kemudahan suatu bangsa yang ingin bergerak maju ke arah yang lebih baik, salah satunya dilihat dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Kita senang kali mengatakan Indonesia harus berdaya, berdiri di atas kaki sendiri dan memulihkan kekuatan sendiri (self sustaining process). Namun di lain sisi, proses pembangunan kadang merupakan keter

sibilitas telekomunikasi dan informasi (BAKTI) [BAKTI] sebagai lembaga pemertanian dibawah naungan Kementerian Kominfo mempunyai visi menempatkan kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Diperoleh dari: <https://www.bakikominfo.id/profile/vision-mission> (Diakses pada 18 Januari 2020) telah menyelesaikan tahapan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti, Palapa Ring, akses internet, Satelit Mufungsi dan penyediaan BTS (Base Transceiver Station), Palapa Ring dan Satelit Mufungsi merupakan program kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring merupakan jangjian serat optik nasional yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kaki Kabel Laut (SKKL) dan Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO). Palapa Ring

an cara

nya literasi!

: Sedangkan

n tindakan

tu memblokir.

Dari hulu, dilakukan dengan memperkenalkan penting digital kepada masyarakat hilir yang dimaksud adalah pencegahan langsung, yaitu

aspek lain dari digital. Kita tidak perlu berbicara dengan industri digital. Sebab, banyak ruang-ruang kebebasan yang berdampak negatif bagi masyarakat, sebut saja cyber crime atau kejahatan dunia maya, penyebaran konten-konten negatif seperti pornografi, perjudian, penipuan, terorisme radikalisme, dan SARA hingga berita bohong atau hoaks. Jika negara memberikan semua ini terjadi, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek digital pun rasanya tak sanggup.

Berkaitan dengan konten-konten negatif dan hoaks, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai konsep pendekatan dari hulu hingga ke hilir. Dari hulu, dilakukan dengan cara memperkenalkan pentingnya literasi digital kepada masyarakat. Sedangkan hilir yang dimaksud adalah tindakan pencegahan langsung, yaitu memblokir. Hal ini sering disampaikan Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate. "Hulu-nya yaitu perilaku, kecenderungan dan budi pekerti, itu tugas bersama-

ma-sama kita sebagai bangsa. Hilir-nya ya kejahatan dan tindakan. (Konsep Literasi Digital Disampaikan Menteri Kominfo Johnny G Plate. Diperoleh dari: https://kominfo.go.id/content/detil/22426/menterjohnny-post-truh-racunnya-demokrasi-dibanta_saker (Diakses pada 18 Januari 2020) Kominfo sendiri mempunyai program literasi digital melalui Siberkreasi. Siberkreasi merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, cyberbullying dan online radicalism. (Tentang Siberkreasi. Diperoleh dari: <https://siberkreasi.id/tentang-siberkreasi/> (Diakses pada 18 Januari 2020))

Konsep hulu ke hilir juga menjadi cara kerja Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Sejak lima tahun terakhir, Kominfo melalui Badan Akse-

M anusia

maju dan berkembang di dunia berdom-
bailomba untuk menjadi negara tertu-
gan prospek digitalisasi yang memberikan
nilai tambah.

Bercara mengenai ekonomi digital di
dunia, Amerika Serikat merupakan nega-
ra yang masih unggul dan kuat dibanding-
negara lain. Berdasarkan studi pemeringka-
tan ekonomi digital di dunia yang dilakukan
oleh Institute for Management Develop-
ment (IMD) School Business Berajar IMD
World Digital Competitiveness Ranking
2019, lima negara dengan pertumbuhan
ekonomi digital tertu-
Serikat, Singapura, Swedia, Denmark dan
Switzerland [Survei IMD School Busi-
ness 2019; Negara Ekonomi Tertu-
Dua. Diperoleh dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4073155/daftar-negara-dengan-ekonomi-dig-ital-terkuat-di-asa-ada-indonesia>
(Diakses pada 17 Januari 2020)
Sumber utama pendapatan suatu

negara dalam ekonomi digital yakni dari perusahaan atau platform digital. Sebagai contoh,
di Amerika Serikat, Facebook dan Amazon mendominasi dengan pendapatan tertinggi yang
memberikan pengaruh positif terhadap FDB Amerika yang mencapai 6,9% atau sebesar
USD1,35 triliun (Rp, 19,358 triliun) pada tahun 2017. (Ekonomi Digital Amerika Serikat Di-
peroleh dari: [https://international.sindonews.com/read/1412399/42/facebook-amazon-dom-
inasekonomi-digital-amerika-serikat-1560815221](https://international.sindonews.com/read/1412399/42/facebook-amazon-dom-inasekonomi-digital-amerika-serikat-1560815221) (Diakses pada 17 Januari 2020)) Data
tersebut mungkin bisa menjadi tindakan persuasif bagi Indonesia dalam menghasilkan eko-
sistem manusia digital. Berkaitan dengan hal ini, cara paling mutakhir yang perlu ditingkatkan
adalah mempertinggi semangat kolaborasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan seluruh
elemen masyarakat, peluang menjadikan Indonesia sebagai poros digital di Asia dan bahkan
dunia bukanlah sesuatu yang mustahil.

Menyoal pentingnya
ekonomi digital dalam
meningkatkan ekonomi-
an di Indonesia, Presiden
Joko Widodo bahkan beka-
l-kali mengingatkan bahwa
ekonomi digital sebagai
arena baru yang perlu dige-
lut anak-anak muda. Jokowi
seringkali mengingatkan
sahaja satunya melalui disku-
si bertajuk “Ekonomi Baru
di Era Digital” pada tahun

2017 lalu. [Wismuhardana,
Alois. 2018. Anak Muda &
Kedso: Memahami Geliat
Anak Muda, Media Sosial,
dan Kepemimpinan dalam
Ekosistem Digital. Hal 153]
Demi menyasar kajian
misional, Presiden Jokowi
mempertegas eksistensi
Indonesia punya peluang
besar menjadi negara digi-
tal. Konsep Digitalisasi Hulu
ke Hilir

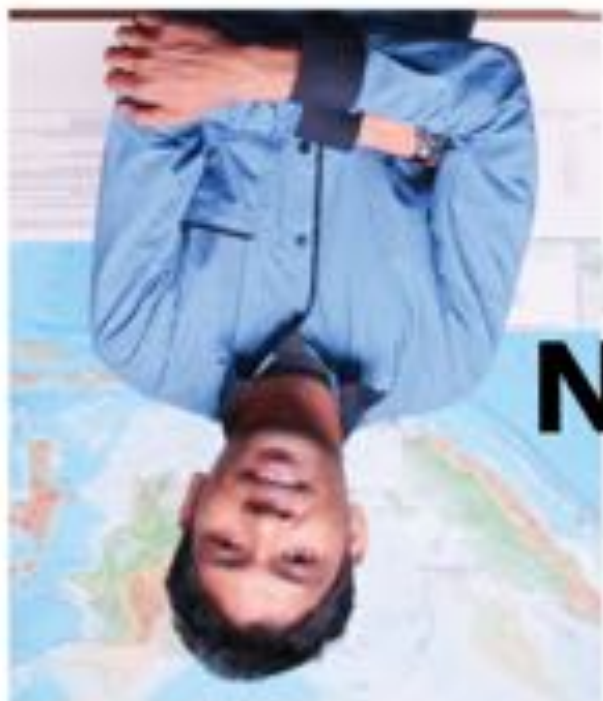
Ketika digi-
talisasi diyakini
sebagai cara
baru bagi In-
donesia menuju
negara maju, maka
membangun dan
memperkuat fondasi
yang kokoh bagi seti-
ap generasi merupakan
satu keharusan univer-
sal. Artinya, negara wajib
hadir memperkenalkan

Masyarakat Digital Indonesia

dan prasarana teknologi yang mutakhir untuk mendukung pola pikir yang inovatif dan kreatif, maka konsekuensi menjadi negara besar hanyalah sebagai penonton. Bukan pemain. Inilah tantangannya. Suka atau tidak suka, industri teknologi digital terus bertransformasi kini dan nanti. Transformasi digital berkaitan dengan meningkatnya sumber kehidupan manusia yang lebih baik. Salah satu aspek yang diprediksi bertumbuh pesat adalah ekonomi digital. Perumbuhan ekonomi menjadi faktor utama pendorong kehidupan sosial lainnya. Dalam cakupan yang lebih luas, ekonomi digital dapat menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara. Karena itu, saat ini kita tengah menyaksikan negara-negara

kekayaan atas anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Namun demikian, semua potensi pasti didapatkan pada tantangan seiring perkembangan zaman. Di abad ke 21 ini, tantangan paling nyata yang dihadapi adalah tumbuh pesatnya teknologi digital. Memoret masa depan Indonesia dari perspektif digitalisasi adalah cara baru yang tidak bisa kita hindari. Dunia telah berubah dan era fisik ke era digital. Dari konvensional menjadi lebih praktis-modern. Aktifitas manusia semakin diberdayakan dan diatur sedemikian rupa oleh teknologi. Apabila semua potensi itu tidak dimbangi dengan sarana

Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan mampu berdaya saing di berbagai sektor. SDM Indonesia juga perlu mentransmisikan dan mengemban tantangan global sebagai salah satu cara melihat dunia dari perspektif keuangan yang dimiliki bangsa ini. Tentu Indonesia punya banyak keunggulan. Dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, ekosistem masyarakat yang beragam budaya, suku, bahasa, keyakinan dan warna kulit, hingga disetukan dalam falsafah ideologi yang tak tergantikan yaitu Pancasila. Semua itu merupakan



AHMAD IRSO KUBANGUN



Ditulis oleh:

Sumber foto: John Schindler on Unsplash

Membersiapkan Target Kita Digital Nation

Minerva Kominfo
Johnny G. Plate

Semua hal ini, ungkap Johnny, sangat menarik untuk dikerjakan bersama-sama dalam sebuah kolaborasi tim kerja yang kompak atas dasar kepercayaan untuk mencapai cita-cita sebagai sebuah bangsa digital. Dalam kolaborasi itu semua pihak bekerja dengan sepenuh hati, dengan pikiran yang terbuka, serta dengan hati dan niat yang terbuka, bahwa semua upaya dan kerja besar ini adalah bagian dari amanah yang dibagikan bagi negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. (*)/jgp

APBN Tahun 2020 program OTS menargetkan peserta mencapai 50.000 orang. Di samping itu, ada pula program beasiswa bagi para dosen dalam kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Singapura. Juga kerja sama program beasiswa bersama pemerintah daerah dan para entrepreneur di start-up, yang langsung bersentuhan dengan pendidikan. Keempat, juga tersedia program-program lain yang berhubungan dengan penyediaan fasilitator misalnya, petani online, nelayan online, serta program digital electronic lainnya bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lintas ke-menaran. Di antaranya, telah mengembangkan program dan pelayanan digital signature. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dunia di mana kontrak perjanjian antar-negara bisa dilakukan atau ditandatangani melalui dokumen online.

Yarakat mengetahui dan merasakan manfaatnya sekaligus bisa berselancar dalam capaian-capaian itu melalui teknologi komunikasi dan informatika yang semakin modern. Kerja, dalam kaitan itu, pihaknya juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagai fasilitator dalam perubahan ekosistem yang terus bergerak cepat. Peralasan yang handal dibutuhkan untuk mengendalikannya. Struktur digital baik yang digunakan secara offline maupun online oleh semua sektor, di semua kementerian dan lembaga, bahkan di sektor privat dan bisnis.

Menteri Johnny menyebutkan, Kementerian Komunikasi, memiliki agenda dan program-program terkait pemberdayaan SDM. Di antaranya, ada Siberkreasi yang melibatkan orang-orang muda supaya mereka tahu dan memahami dunia digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Ada pula program Digital Talent Scholarship (DTS) yang telah dilaksanakan tahun 2019 untuk 25.000 orang dari berbagai kota di Indonesia melalui pembiayaan oleh

Mendorong kesiapan Indonesia menghadapi pergeseran teknologi dan perubahannya termasuk di dunia digital.

Kedua dalam konteks eko-
sistem, Kominfo memaikan
perannya dalam bidang
komunikasi, informasi dan
informasi. Tugas kementerian ini pun membantu men-
transmisikan kegiatan ke-
giatan dan capaian-capaian
pemerintah agar mas-

Indonesia yang memasuki
pasar-pasar nasional dan
internasional. Termasuk
kolaborasi sejumlah unicorn
dan decacorn Indonesia
yang merambah ke pasar
Asia Tenggara, misalnya ke
Vietnam, Thailand, Myan-

mar.

Menurut dia, Indonesia
memiliki kemampuan untuk
teus bertumbuh melalui
kolaborasi bersama para
inventor dan inovator
Indonesia. Hal itu dibun-
jukkan dengan munculnya
para inventor dan inovator

“Jangan sampai kita mem-
bangun infrastruktur dig-
italnya, market place-nya
tersedia, platform banyak,
aplikasi-aplikasi bagus tapi
produk dari luar negeri yang
membantu pasar di dalam
negeri. Hal itu boleh-boleh
saja tetapi untuk keper-
tingan domestik kita harus
pastikan produk-produk
dalam negeri juga berkem-
bang maju. Jalan perlu
produk-produk dalam neg-
eri masuk ke market place
internasional,” papar Menteri
Johnny.

Tugas-tugas tersebut,
menurut Menteri Johnny,
dilakukan melalui berbagai
literasi, pendidikan, pe-
litan-pelatihan bekerja
sama dengan institusi-in-
stitusi baik dengan mitra
usaha maupun dengan
pemerintah daerah untuk
mendorong dan mengajak
semua pihak masuk ke mar-
ketplace.

Di samping itu, memper-
banyak dan mengajak
para petani, peternak dan
nelayan untuk bergeser
dan beralih dari pasar-pasar
offline, fisik, untuk masuk ke
online market yang terbuka
secara domestik maupun
global.

Menteri Johnny mengungkap, Presiden telah memastikan untuk membuat Omnibus Law di bidang Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Terkait hal itu, pihaknya bersama dengan para ahli dari setiap Direktorat Jenderal dan Kementerian pun mendefinisikan langkah untuk melakukan kodifikasi dengan menambal, mengurangi, memperbaiki dan melakukan penghapusan undang-undang dan aturan yang sudah tidak relevan dan tidak bisa lagi memberikan dorongan untuk bergerak cepat mengadaptasi arus perubahan besar ke depan.

Di saat yang sama pula, Kominfo juga perlu membuat satu payung hukum baru menuju ke digitalisasi. "Nah, itu pekerjaan saya di sini. Kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya fiskal, infrastruktur yang disebutkan tadi, tentu sudah banyak ahlinya di sini. Tugas saya mengkoordinasikannya, bagaimana *me-manage* semua hal itu di bawah leadership yang bisa diterima oleh komunitas ASN Kominfo sehingga bisa bersama-sama bergerak maju," tandasnya.

Selain menyiapkan infrastruktur digital, juga perlu menyiapkan ekosistemnya. Pertama, dunia industri telekomunikasi dan informatika perlu didorong—di samping TV-TV tadi—dan memastikan pembangunan dunia *e-commerce* di market place, pengembangan start up baru sehingga melahirkan unicorn yang semakin banyak, serta meningkatkan kualitas unicorn menjadi decacorn yang secara bertahap juga semakin banyak.

Selain itu, sistem 5G juga menawarkan kemungkinan menyediakan koneksi yang terjangkau ke sejumlah besar perangkat nirkabel secara bersamaan. Hal ini memungkinkan terjadinya ekspansi besar jumlah penggunaan perangkat sehari-hari yang terkoneksi dengan internet seperti pengawasan nutrisi dalam tanah bagi petani, lokasi paket atau barang kiriman bagi perusahaan ekspedisi dan tanda-tanda vital untuk pasien rumah sakit.

Saat ini Indonesia masih berada di level 4G, namun sudah harus mengantisipasi masuk ke dunia 5G. Untuk itu, segala faktor yang mendukungnya perlu dipertajam. Di antaranya melakukan manajemen frekuensi yang baik, dengan tata kelola untuk mengatur alokasi frekuensi dan menyiapkan di bandwidth yang mana akan masuk ke 5G. Sehingga pada saat 5G dibutuhkan dan teknologinya sudah bisa diterapkan di Indonesia, alokasi frekuensinya pun sudah tersedia.

Johnny mengatakan kembali, sebagai Menteri Kominfo, pihaknya bekerja untuk memastikan kesiapan Indonesia memasuki perubahan besar tersebut dengan melakukan perubahan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, menyiapkan sumber daya manusianya, dan menyiapkan legislasi primernya.

Pada saat yang sama, kata Johnny, pihaknya juga harus membantu melakukan deregulasi. Hal tersebut diperlukan antara lain untuk mendorong kesiapan Indonesia menghadapi pergeseran teknologi dan perubahannya termasuk di dunia digital, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan publik.

berkomunikasi dengan satu sama lain, dengan ram- bu-rambu jalan, lampu lalu lintas, rel pemandu dan ele- men lain yang dapat dilihat oleh pengemudi manusia. Hal tersebut membutuhkan lompatan teknis lain yaitu mengurangi apa yang disebut sebagai "latensi" atau penundaan antara kapan sinyal dikirimkan dan kapan sebuah si- nyal diterima menjadi 1 milidetik.

Untuk mencapai kecepa- tan data tinggi dengan latensi rendah dibutuhkan perubahan teknis, sema- suk pengiriman data yang menggunakan frekuensi radio yang lebih tinggi dan desain antena untuk men- gurangi gangguan dengan banyaknya perangkat yang berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan. Hal terse- but menjadikan jargon 5G membutuhkan lebih banyak stasiun pangkalan—yang juga harus lebih kecil secara fisik dan menara seluler yang telah ada dan pele- takannya dengan jarak yang lebih dekat. Stasiun pang- kalan 5G mungkin akan diletakkan setiap 250 meter, bukan satu hingga lima km seperti yang dibutuhkan 4G.

dar yang digunakan untuk menfasikan dan mentrans- misikan data melalui gelom- bang radio.

Generasi pertama, secara retroaktif disebut dengan 1G, sebuah sistem analog penuh untuk mentransmis- ikan suara. Sangat berbeda dengan pendahulunya, tele- fon 2G mentransmisikan su- ara dan data secara digital. Dalam generasi-generasi berikutnya, yaitu 3G dan 4G terjadi perubahan teknis yang meningkatkan kece- patan data dari 200 kilobit per detik menjadi ratusan megabit per detik. Dalam perkembangannya, dunia kini mulai memasuki era 5G yang diciptakan dengan kemampuan mentransmis- ikan 1 gigabit atau bahkan 10 gigabit data per detik. Kemampuan untuk men- gim dan menerima data sebanyak itu dengan san- gat cepat membuka pintu peluang bagi sistem virtual reality dan augmented reality, begitu pun dengan otomatisasi.

Roadmap 5G ini adalah rev- olusi dunia digitalisasi yang sangat berbeda dengan 4G. Misalnya mobil kemu- di otomatis akan mampu

program simulcast bisa dimulainya, sehingga poin- switch off, kapan berakim- ya analog itu dan kita masuk ke televisi digital," ungkap Johnny.

Menurutnya, hal ini dilaku- kan agar dunia industri bisa berkembang dengan baik dan masyarakat juga mendapat pelayanan den- gan baik. Ia menyebutkan sejumlah roadmap menuju digital nation yang sedang disiapkan dan akan dilak- sanakan secara bertahap.

Misalnya, saat ini Indonesia berada di industri 4.0, dan dalam kerangka itu sedang menyiapkan infrastruktur 4G untuk mengantisipasi perubahan dan perkem- bangan dunia yang sudah ada. Bergeser menuju ke 5G. Ketika memasuki 5G, land- scape digital juga berubah dan bergeser. Bagi Johnny, Indonesia harus siap meng- hadapi perubahan itu.

Apa itu generasi nirkabel 4G dan 5G? Setiap satu dekade atau lebih, indus- tri nirkabel meluncurkan standar komunikasi seluler yang mampu mentransmis- kan data lebih banyak dengan lebih cepat. Saat ini, babak selanjutnya tengah dalam pengembangan dan diberi nama 5G karena merupakan generasi kelima dari stan-

perlu mempersiapkan digital talent dan telecommunication talent yang memadai! dalam kolaborasi!

Keempat, menata kembali frekuensi untuk memberikan layanan 5G dalam rangka mendukung revolusi industri 4.0. Penataan tersebut, dilakukan pada spektrum frekuensi lower band (700 Mhz dan 800 Mhz), middle band (2,6 GHz dan 3,5 GHz), dan upper band (26 GHz).

Untuk mencapai target besar tersebut, selain mempersiapkan regulasi, membangun infrastruktur, menata-kelola frekuensi, juga perlu mempersiapkan digital talent dan telecommunication talent yang memadai dalam kolaborasi dengan lembaga pendidikan/pelatihan, pemerintah daerah maupun mitra usaha swasta.

Menarik! Johnny berharap pada akhir tahun 2024 kecepatan internet di seluruh wilayah 3T Indonesia termasuk wilayah 3T

bisa pada level 10 Mbps. Ditambahkan dengan penempatan satelit yang lengkap, maka sekitar tahun 2025, kecepatan internet di Indonesia bisa mencapai 30 Mbps. Nah, di situ lah cita-cita Indonesia bertransformasi menjadi bangsa digital, Digital Nation.

Untuk mencapai target menjadi bangsa digital, Menteri Johnny ingin memastikan langkah-langkah persiapan dilakukan secara bertahap, efektif, efisien dan fokus pada pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Salah satu langkah persiapan yang kini sedang dilakukan oleh Kominfo adalah migrasi siaran televisi dari analog ke digital.

Langkah-langkah Persiapan

Di televisi misal-nya, pabrik-pabrik televisi sudah membuat televisi digital, tetapi siaran televisi belum digital. Nah, masyarakat masyarakat punyai televisi yang tidak sepenuhnya bisa disajikan siaran yang sesuai dengan yang mereka miliki. Padahal infrastruktur itu bisa disediakan.

"Maka kita perlu beralih dari analog ke digital yang dikenal dengan analog switch off/ASO. Tentu tidak serta-merta, ada tahapannya. Harus dibuka ruang, karena migrasi itu membutuhkan biaya, membutuhkan persiapan, membutuhkan waktu, disiapkan melalui program yang disebut simulcast yang sudah dirancaang lama. Kita berharap tahun 2020

Membersipkan Target Kita Digital Nation

*Menteri Kominfo
Johnny G. Plate*

lebih fokus pada bagian informatika. Johnny mengakui bahwa peran komunikasi tersebut sudah terdistribusi ke masing-masing kementerian dan lembaga yang memiliki humasnya masing-masing termasuk Presiden yang memiliki jubah sendiri. Bahkan, Menteri dan kepala lembaga menjadi humas di masing-masing kementerian dan lembaga. Meski demikian, sebagai juru bicara negara, perlu komunikasi dari Kementerian Kominfo secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan capaian pembangunan. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti fiber optik, BTS (base transmission station) maupun satelitnya. Pihaknya, ingin memastikan ketiga infrastruktur tersebut menjangkau daerah-daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) sehingga kecepatan internet bisa meningkat.

pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Kemendikbud, Kemendagri dan Kominfo

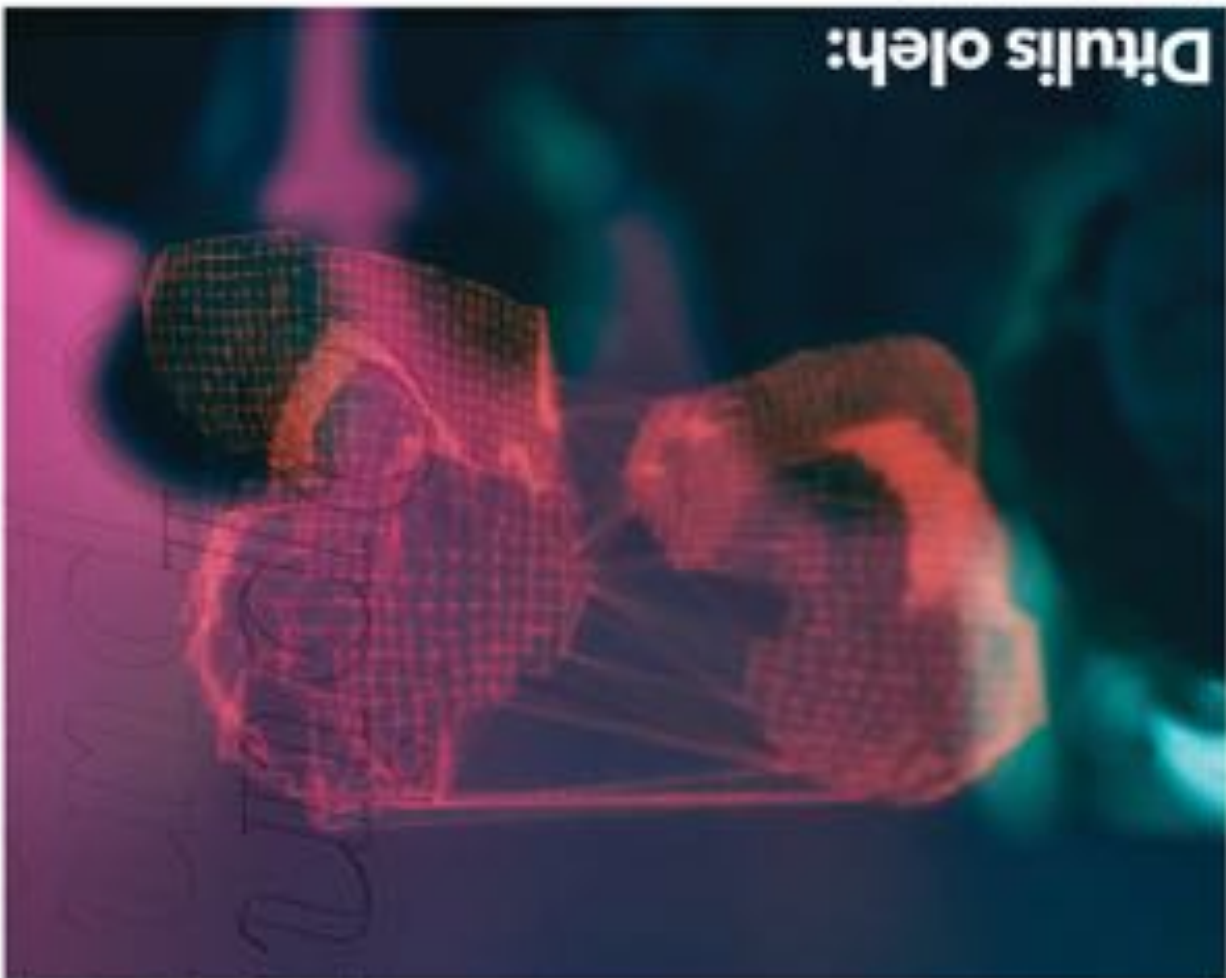
bagi kesempatan menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan tugasnya sesuai visi misi Presiden setidaknya dalam empat hal. Pertama, menyelesaikan regulasi primer yang terdiri dari dua undang-undang penting, yakni RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penyiaran, RUU PDP, kata dia merupakan inisiatif usulan pemerintah dan akan masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional) Prioritas tahun 2020. Sementara RUU Penyiaran menjadi inisiatif usulan DPR. Menteri Johnny mengungkapkan, dan visi pemerintah, ada tiga RUU yang juga penting, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Pajak dan Omnibus Law UMKM. Ketiganya terkait dan Kementerian Kominfo ada di dalamnya. Kedua, memperkuat peran komunikasi dari Kementerian Kominfo yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Menurut dia,

Memasuki bulan ketiga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam ber



PHILIP GOBANG

Staff Khusus Menteri Kominfo



Ditulis oleh:

Sumber foto: Brooker Lark on Unsplash



<p>besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga suasa bangsa tetap dalam keadaan konduktif juga sangat diharapkan oleh Presiden.</p> <p>"Saya berharap juga dalam Pilkada tahun ini di 270 daerah dukungan pers juga bisa lebih dimanfaatkan lagi," imbuhnya.</p> <p>Ke depan, pemerintah juga memiliki agenda besar untuk mewujudkan Indonesia maju. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo berharap besar kepada insan pers untuk tetap berjuang demi kemajjahtaan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan agenda Indonesia maju.</p> <p>"Pembangunan infrastruktur yang terus akan kita lanjutkan, pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi yang nanti akan kita buat bersama setelah ada omnibus law, kemudian reformasi birokrasi, transformasi ekonomi yaitu hilirisasi dan industrialisasi serta yang terkait pemerintahan ibu kota negara," tandasnya.</p> <p>(BPMI Setpres)</p>	<p>peranan pers tersebut sangat dibutuhkan dan kan relevan. Pers menjadi garda terdepan untuk menenangkan masyarakat, memastikan informasi yang kurang akurat, dan turut mengadakan kepanikan yang melanda masyarakat.</p> <p>"Begitu juga dalam menghadapi situasi yang acaman virus korona saat ini peran pers juga sangat dibutuhkan untuk membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak menambak kepanikan apalagi ikut memberikan informasi yang salah," ucap Presiden.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dalam lima tahun terakhir secara konsisten telah mewatarkan kerja-kerja pemerintah, memberikan dukungan, juga memberikan masukan dan kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah. Selain itu, peran pers sebagai pilar demokrasi keempat yang salah satunya pada pelaksanaan Pilg dan Pilpres 2019 berperan</p>	<p>"Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik, informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Ekosistem yang baik harus didukung media harus didukung dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.</p> <p>Presiden mengatakan, negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernih untuk berdiri di depan melawan kecacauan informasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi.</p> <p>"Yang mewatarkan berita baik dan agenda-agenda besar bangsa Indonesia. Membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa," tuturnya.</p> <p>Apalagi bila dihadapkan dengan situasi ancaman kesehatan global yang belakangan membuat,</p>
---	--	---



Sumber Berita : <https://www.president.go.id/berita-pertemuan-pertemuan-harian-president-jokowi-untuk-musai-pertemuan-hari-pes-2020-02-02>

Apresiasi dan Harapan Presiden Jokowi untuk Insan Pers di Peringatan Hari Pers Nasional 2020

Presiden Joko Widodo berharap besar kepada insan pers untuk tetap berjuang demi kemazhabatan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, serta memajukan agenda Indonesia maju.

Masyarakat sehat lahir lewat pembentukan pola pikir positif yang didapatkan lewat informasi-informasi yang baik. Sementara informasi yang baik tersebut lahir lewat jurnalisme dan ekosistemnya yang juga

Maka, dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020 yang dipusatkan di Kawasan Perkotaan Sekeloa Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, pada Sabtu, 8 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa ekosistem dan industri pers harus berjalan dengan sehat dan terdindungi agar masyarakat dapat terus menerima kualitas informasi yang baik.





"Kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa

perkembangan ekonomi digital haruslah

memacu pemasaran terhadap produk-

produk dalam negeri, utamanya produk

usaha mikro, kecil, dan menengah yang

jumlahnya sangat banyak dan mampu

bersaing. Ke depan, ekonomi digital juga

harus memberikan kontribusi signifikan

bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kepala Negara melihat bahwa

ekonomi digital Indonesia memiliki

potensi untuk memecahkan persoalan-

persoalan krusial di tengah masyarakat. Seperti akses kepada pendidikan yang layak, juga penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan terpendul, saya lihat ini juga sudah muncul

banyak. Menyediakan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil, saya lihat ini juga sudah banyak termasuk crowdfunding untuk bantuan sosial," ucapnya.

Maka itu, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan cara mempermudah sumber pendanaan, memberikan pendampingan, mempermudah ekosistem kerja sama dengan lembaga-lembaga investasi dunia, serta regulasi dan birokrasi yang kondusif.

"Saya melihat semakin banyak insiatif startup. Banyak sekali. Cukup banyak insiatif kewirausahaan dan bisnis kita. Kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi digital saya juga lihat banyak. Inilah kekuatan yang harus kita himpun terus," tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain CEO Microsoft Satya Nadella, Menko Perekonomian Airlangga Hartono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadem Anwar Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(BPMI Setpres)

“
 Ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja, harus mendorong ekspor, harus meningkatkan devisa. Kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang kita miliki.”

Sumber Berita : <https://www.president.go.id/saran-pert/president-arahkan-potensi-ekonomi-digital-indonesia-bag-kesejahteraan-masyarakat/>



Potensi besar tersebut turut diungkap oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato utama dalam acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 yang digelar di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020.

"Sampai saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Dengan pertumbuhan yang paling cepat," ungkap Presiden.

Di tahun 2019 kemarin saja, angka pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

"Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara. Nomor lima di dunia setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada. Kita memiliki 2.193 startup. Ada 1 decacorn dan 4 unicom," imbuhnya.

Hal itu diambil dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa dan tingkat penetrasi internetnya yang mencapai 65 persen di tahun 2019. Belum lagi dengan selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Palapa Ring yang menghubungkan lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang akan meningkatkan potensi tersebut.

Namun, besarnya potensi itu tak lantas membuat kita berpuas diri. Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, harus memantapkan betul hal tersebut dengan tidak membalkan negara kita hanya menjadi pasar digital. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia lah yang harus menjadi produsen dan raja di pasar sendiri.

DIGITAL ECONOMY SUMMIT



DevCon/ INDONESIA DIGITA RTA, 27 FEBRUARY 2020

Presiden: Arahkan Potensi Ekonomi Digital Indonesia bagi Kejahteraan Masyarakat

Pemerintah juga berupaya
keras meningkatkan
ekosistem ekonomi digital
di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi yang
sangat besar akan pemanfaatan
dan perkembangan ekonomi digital
di masa mendatang. Berdasarkan
laporan Temasek, pada tahun 2025
mendatang, ekonomi digital Indonesia
diprediksi menyentuh angka 130 miliar
dolar Amerika.

Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30 persen dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan harus kita hindari," tandasnya.

Untuk diketahui, saat menghadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020 pada Kamis, 27 Februari 2020, kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan salah satu CEO perusahaan global yang juga bergerak dalam pengembangan pusat data, CEO Microsoft Satya Nadella. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyampaikan

bahwa pihaknya akan segera menyusun regulasi mengenai investasi pengembangan pusat data di Indonesia.

"Injeksi mereka (Microsoft) ingin investasi di data center, tetapi

saya sampaikan bahwa kita masih mengajukan undang-undang untuk melindungi data pribadi ke DPR yang belum selesai. Tetapi Microsoft ingin segera investasi di Indonesia, sehingga dalam minggu ini akan kita purnuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung investasi yang berkaitan dengan data center," kata Presiden.

(BPMI Setpres)



terkait dengan investasi pengembangan pusat data ini. Mulai dari BUMN telekomunikasi hingga pihak swasta yang belakangan sudah mulai bergerak ke bisnis pusat data. Lebih jauh, berkaitan dengan perlindungan data pengguna, Kepala Negara juga mengingatkan soal pentingnya hal tersebut bagi keamanan dan kedaulatan data. Saat ini pemerintah telah mengusulkan kepada DPR mengenai rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur soal hal itu.

“RUU Pelindungan Data Pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi

dalam beberapa peraturan pendang- undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi,” tuturnya.

Adapun terhadap penerapannya di lingkungan pemerintah, Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia segera mengembangkan pusat data nasional terintegrasi yang menyatukan seluruh kementerian dan lembaga. Menurut survei Kementerian Kominfo dan informatika pada 2018 lalu, terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah.

“Berarti rata-rata terdapat empat pusat data pada setiap instansi pemerintah.



mengembangkan pusat datanya di Tanah Air. Apalagi Indonesia juga memiliki ekosistem perusahaan rintisan yang paling aktif di Asia Tenggara.

Meski demikian, Kepala Negara juga tak ingin agar Indonesia hanya menjadi pasar dan penonton bagi industri tersebut. Investasi pembangunan pusat data harus memberikan nilai tambah dan transfer pengetahuan bagi Indonesia.

"Siapkan regulasinya termasuk yang mengatur soal investasi data center

yang ingin masuk ke Indonesia. Kita juga harus memastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah baik dalam pelatihan digital talent, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain-pemain nasional maupun dalam sharing pengetahuan dan teknologi," ucapnya.

Tak hanya bagi pemain global, Presiden juga ingin mendorong munculnya pemain-pemain besar lainnya dari dalam negeri

Sumber Berita : <https://www.president.go.id/siaran-pers/pengembangan-pusat-data-di-indonesia-dorong-ekonomi-digital-dan-lingkungan-data-privasi-pengguna/>



residen Joko Widodo menyinggung soal urgensi bagi pengembangan pusat data (data center) nasional. Saat memimpin rapat terbatas mengenai hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2020, Presiden menyebut bahwa pusat data yang fokus dikembangkan di Indonesia akan mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal yang saat ini masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.

"Kita tahu saat ini banyak startup-startup kita yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat masih menggunakan

data center di luar negeri. Padahal kalau data center itu ada di Indonesia akan banyak manfaatnya," ujar Presiden.

"Lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk local troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan lebih cepat," imbuhnya.

Di sisi lain, potensi ekonomi digital dan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar mengundang ketertarikan pemain-pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk berinvestasi

Pusat data yang fokus dikembangkan di Indonesia mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal sekaligus melindungi data pribadi pengguna.

Pengembangan Pusat Data di Indonesia

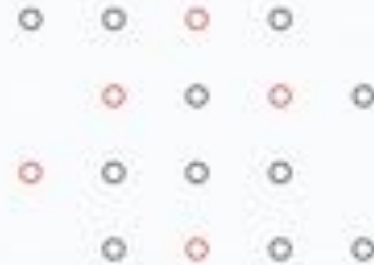
Dorong Ekonomi Digital dan Lindungi Data Pribadi Pengguna



Jakarta (10/02/2020) – Pusdiklat membuka salah satu bentuk kerja sama dalam pengembangan SDM di bidang TK – yang dikelola oleh Badan Litbang SDM – antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama – melalui perjanjian lahan oleh UIN Syarif Hidayatullah – dengan KOICA. Kerja sama di antara kedua Kementerian tersebut kini telah mencapai tahap akhir, ditandai dengan serah terima operasional Pusdiknas pada akhir Desember 2019 lalu.

Proses serah terima tersebut diundaklanjuti dengan proses alih status BMN Pusdiknas dari Kementerian Kominfo ke Kementerian Agama cq UIN Syarif Hidayatullah. Proses ini telah disetujui Kementerian Keuangan melalui Surat Persejuaan Nomor: S-7/MK.06/WK/N.07/KNL.05/2020, tanggal 20 Januari 2020, tentang Persejuaan Pengalihan Status Penggunaan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Serah Terima Alih Status Pusdiknas



Pusdiklat, Jakarta (18/02/2020) – Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas (JPFH) Tingkat Keahlian Tahun Anggaran 2020 dibuka perdana secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada hari Selasa (18/02/2020). Berempat di Pusdiklat Kementerian Kominfo, Jalan Raya Kelapa Dua No. 49-D Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Diklat JPFH Angkatan I Tahun 2020 dilaksanakan selama 26 hari mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 13 Maret 2020.

Diklat ini diikuti sebanyak 19 orang peserta, yang terdiri atas calon dan Pejabat Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian dari berbagai Kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Daerah, Komposisi peserta terdiri atas 18 instansi pusat dan 1 instansi daerah, serta 12 orang peserta perempuan dan 7 orang peserta laki-laki.

Kepala Pusdiklat Membuka Diklat Fungsional Pranata Humas Perdana Tahun 2020





Dirjen IKP: Revitalisasi MPN Sambut Peradaban Baru Sebarikan Informasi

Surakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Mukyo menilai, revitalisasi MPN Nasional (MPN) dalam rangka menyambut peradaban baru yang menurut teknologi modern untuk menyebarkan informasi kepada khlayak luas. Bahkan, Dirjen IKP mendorong revitalisasi dapat menarik bagi generasi milenial.

"Sudah melakukan satu renovasi dan makud saya terlihat kembali lahir kembali untuk menyambut peradaban baru ini," ujar Dirjen Widodo Mukyo di Monumen Pers, Solo, Jumat (14/02/2020). Menurut Dirjen Widodo, MPN seharusnya tidak hanya digunakan sebagai wadah penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah saja. "Tetapi juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat luas tentang perkembangan dunia pers sejak dahulu kala," ujarnya.



Kawal Pilkada Serentak 2020, Dirjen IKP Ajak Pers Jadi Perekat Bangsa

Jakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Mukyo mengatakan tahun 2020 menjadi tahun penting karena akan digelar 270 pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 23 September 2020. Oleh karena itu, Dirjen Widodo mengajak pers untuk menjadi perekat bangsa dengan memerangi hoaks.

"Kita lihat bahwa media massa hingga saat ini tetap bebas menyebarkan informasi dan berita faktual termasuk menyebarkan opini yang mengkritik pemerintah. Tentunya dengan opini dan kritik yang membangun dengan pendekatan solusi," kata Dirjen Widodo saat menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional HFN 2020 di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).

Jakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosetta Niken Widhiastuti menyatakan Persaudaraan Shortly! Kempo Indonesia (Perkem) Dojo Kementerian Kominfo akan menggelar Kejuaraan Nasional Kempo Tahun 2020.

"Menteri Kominfo telah menyetujui untuk Perkem Dojo Kominfo mengadakan Kejuaraan Kempo Nasional antariksa se-Indonesia. Direncanakan akan berlangsung pada bulan Juli 2020 mendatang," kata Sekjen Niken dalam Rapat Persaudaraan Nasional Perkem di Museum Penerangan Kominfo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (06/02/2020).



Kejuaraan Kempo Kominfo Gelar Juli 2020, Nasional Piala Menteri

Yogyakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Imaji mengajak seluruh aparat sipil negara (ASN) di jajaran fokus memperbaiki mindset.

Dirjen Imaji menekankan ada tiga fokus mindset yang harus diubah. Pertama, orientasi yang sifatnya proses harus diubah menjadi menuju hasil. "Output oriented ini mudah-mudahan menjadi pegangan kita. Dalam bekerja kita harus sampai di ujung result-nya," kata Dirjen SDPP dalam sambutan Acara Akreditasi Penyusunan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen SDPP, di Hotel Alana Yogyakarta, Senin (17/02/2020).



Dirjen SDPP: Fokus pada Hasil, Kompetensi dan Branding

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati - matian”

Membaca buku ini, kita benar-benar diajak untuk bisa mengenal Gus Dur secara cukup detail. Bagaimana kondisi fisik dan emosional Gus Dur sepanjang momen-momen penting dalam hidupnya, cerita mengenai perjalanan Gus Dur untuk memodernisasi Islam tradisional di lingkungan pesantren, sikap menjunjung tinggi pluralisme yang teguh dipegang sampai akhir hayat, serta alir pemikiran beliau yang terdapat di luar perkiraan orang kebanyakan membuat buku yang

pada prinsipnya diajarkan dengan sangat menarik, menjadi semakin menarik karena tokoh unik yang diceritakannya. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah satu putri Gus Dur – Alissa Wahid dalam pelatihan Kominfo Connect lalu, bahwa Indonesia ada karena keberagaman, jika tidak ada keberagaman maka tidak perlu ada Indonesia. Fisik Gus Dur mungkin sudah tidak ada di Bumi Indonesia, tetapi pemikiran dan sikap beliau, tetap tinggal di hati masyarakat Indonesia.

Sumber Foto : Dokumentasi Keluarga Gus Dur



Perjuangannya untuk menembus pendidikan di Eropa juga digambarkan dalam buku ini. Tak lupa juga, buntut kisah kasih Gus Dur dengan Sinta Nurayah tak lepas dari coraian pena sang penulis. Bagian yang paling ditunggu dan menurut saya pribadi paling menarik dari buku ini yaitu cerita tentang jalan terjal dan mendaki seorang Gus Dur dalam mencapai posisi orang nomor 1 di negeri ini. Berawal dari sepak terjang Gus Dur di tahun 1980an di organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sampai kemudian 3 (tiga) periode berturut-turut menjadi Ketua NU, di mana intrik-intrik internal organisasi digambarkan secara gamblang oleh Greg Barton. Hubungan Gus Dur selama menjadi Ketua NU dengan Pimpinan Order Baru, Soeharto juga menjadi sorotan tersendiri. Hubungan naik-turun antara kedua tokoh ini, membuat tegang dan penasaran ketika membacanya. Dalam menjalin hubungan ini, Gus Dur menjadi teman sekaligus pengkritik paling menjenjekkan bagi Soeharto, suatu kombinasi yang sangat jarang ditemukan mengingat tirani besi yang diterapkan di Era Orde Baru. Bahkan sampai lengsernya Soeharto, hubungan baik kedua tokoh ini masih tetap terjalin di tengah-tengah panasnya suhu politik di tahun 1998.

Cerita Buku Biografi Gus Dur berlanjut dengan bagian utama cerita (menurut saya) tentang sosok Gus Dur. Karena sejujurnya, saya pribadi baru mengetahui tentang Gus Dur ketika sosok ini dilantik menjadi Presiden RI ke-4, jadi cerita tentang bagaimana Gus Dur menapak jalan terjal menuju tahta presiden menjadi cerita mistis sendiri bagi saya di masa itu. Pada Bab ini, lakon cerita yang ditampilkan tidak hanya Gus Dur seorang, tetapi ada 2 (dua) tokoh lain yang memiliki peran sentral pada masa-masa 'pergolakan' reformasi di tahun 1998 – 1999 yaitu Amien Rais dan Megawati. Ketiga tokoh ini bersama-sama membentuk suatu kekuatan baru yang menghapus dominasi politik-politikus era orde baru yang bernaung di bawah Partai Pohon Beringin. Hubungan rumit di antara ketiganya juga tidak lepas menjadi cerita tersendiri dari buku ini.



Sumber Foto:

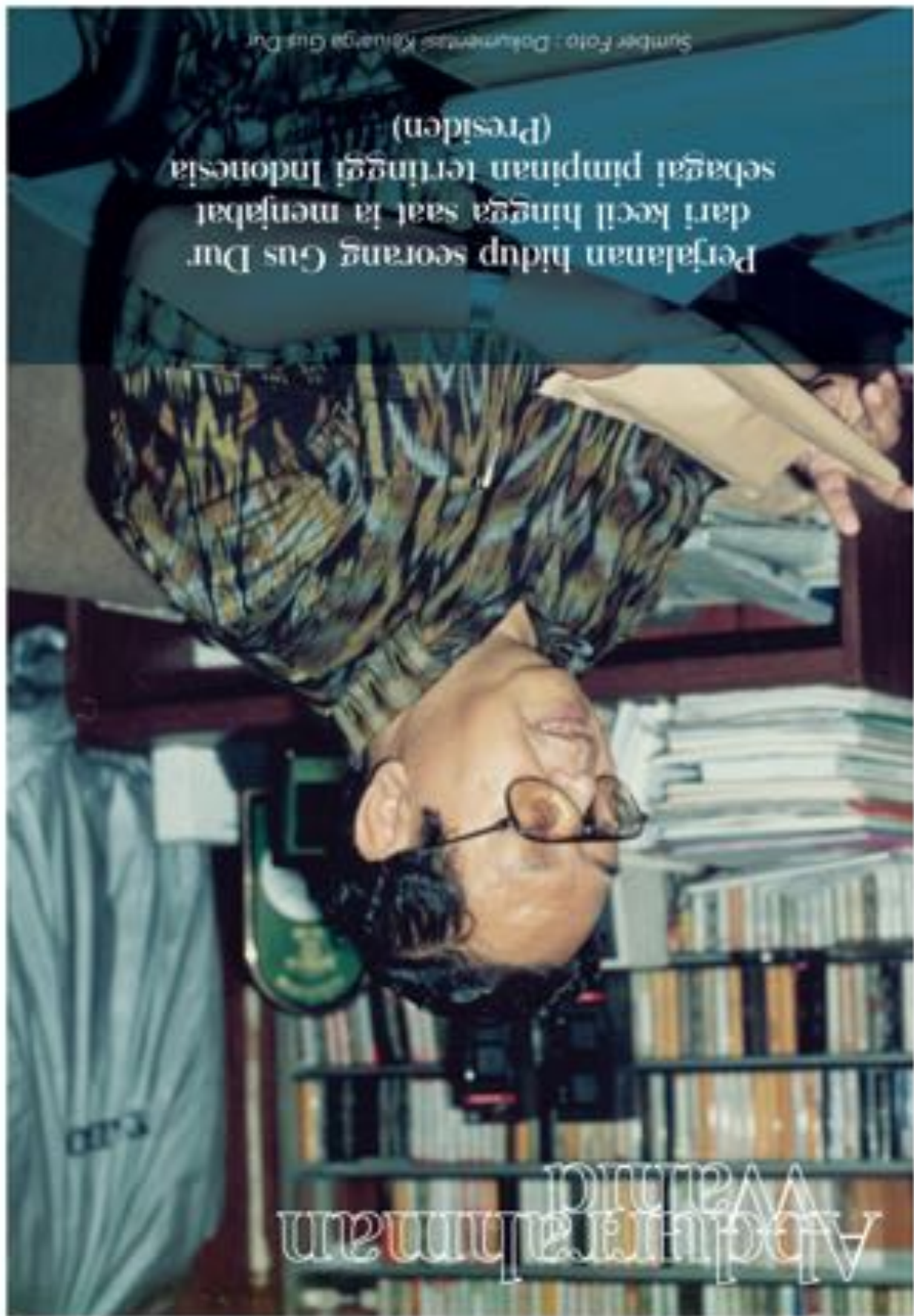
Documentary keluarga Gus Dur



Gus Barton, sang penulis buku, merupakan sosok yang tidak asing bagi Gus Dur dan keluarganya. Sehingga, beberapa bagian buku ini sedikit banyak mengambil sudut pandang dari penulis, baik ketika melakukan wawancara resmi maupun mengikut setiap aktivitas Gus Dur. Hal ini digambarkan pada bab-bab awal buku, di mana penulis mendeskripsikan suasana Gus Dur dan orang-orang terdekatnya ketika kontesasi pemilihan Presiden di tahun 1999. Setiap sisi digambarkan dengan cukup detail oleh penulis, sehingga kita seolah-olah berada dalam ruangan itu untuk diajak berdebar-debar menunggu hasil pemilihan Presiden yang kala itu masih dipitih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bab-bab selanjutnya dari buku ini disajikan dengan alur maju. Dimulai dari masa kecil Gus Dur dan kehidupan bersama ayahnya, Wahid Hasyim. Walaupun jarang bercengkrama secara emosional dengan Sang Ayah, namun kehidupan yang dilalui bersama ayahnya sangat berpengaruh untuk membentuk Gus Dur menjadi sosok cenderung dengan pikirannya yang tajam. Pikiran tajam Gus Dur dicitakan berasal dari target yang diberikan oleh Sang Ayah untuk 'menyetorkan' hasil membaca suatu buku. Budaya membaca diterapkan oleh Wahid Hasyim kepada anaknya, sehingga akhirnya Gus Dur pun menjadi keranjingan dengan buku dan tidak pernah lepas dari buku. Dari Sang Ibu, Soimah Wahid, Gus Dur belajar tentang ketegasan dan perjuangan hidup terutama ketika Sang Ibu harus sendiri membesarkan Gus Dur dan saudara-saudaranya setelah Wahid Hasyim meninggal dalam kecelakaan mobil di usia yang masih muda. Gus Dur dikenal selalu mendengarkan dan menuruti nasihat Sang Ibu.

Kehidupan pendidikan Gus Dur juga tidak lepas membentuknya sebagai seorang dengan jiwa kritis dan pemikirannya. Dengan latar belakang santri, Gus Dur melanjutkan pendidikan sarjana di salah satu universitas ternama di Karo. Di Karo, Gus Dur hanya bertahan beberapa bulan saja sebelum akhirnya pindah ke Irak untuk menempuh pendidikan di sana.



Sumber Foto : Dokumentasi Keluarga Gus Dur

Perjalanan hidup seorang Gus Dur
dari kecil hingga saat ia menjabat
sebagai pimpinan tertinggi Indonesia
(Presiden)

Abdurrahman
Wajidi

Mengenal Gus Dur Lebih dalam

Oleh: Helmi Fajar Andrianto
Redaktur Pelaksana KominfoNext

Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia yang memiliki

keunikan tersendiri, baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil dan bagaimana beliau menyikapi suatu permasalahan politik di republik ini. Satu hal yang paling mudah diingat, apalagi untuk beberapa sivitas di Kementerian Kominfo yang berasal dari Departemen Penerangan yaitu ketika Gus Dur 'membubarkan' Departemen Penerangan. Pada masa itu, peran Departemen Penerangan sangat sentral sehingga

pembubaran departemen yang identik dengan sosok Harmoko tersebut, membuat heboh masyarakat di tanah air. Kemunculan Gus Dur dengan menggunakan celana pendek di Istana Negara juga tidak kalah membuat heboh masyarakat ketika itu. Di balik segala kontroversi tersebut, Gus Dur merupakan sosok pribadi dengan pemikiran yang tajam, tenang dalam menghadapi setiap permasalahan politik, humoris dengan cekungan-cekungan humor cerdas ala NU (Nahdlatul Ulama) serta tokoh terdepan dalam hal pluralisme di Indonesia. Buku ini mengupas tuntas setiap sisi kehidupan Gus Dur mulai dari kehidupan masa kecilnya hingga akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Biografi Gus Dur *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*



Penulis :
Greg Barton

Penerbit :
LKIS Yogyakarta

Per 18 April 2020, Tidak Bisa Terkoneksi ke BTS

Perindustrian Janu Suryanto dan Telekomika Kementerian rektur Industri Elektronika dan Telekomika

Bianis.com, JAKARTA - Di-
 mengatarkan ponsel ilegal
 tidak lagi bisa terkoneksi
 ke base transceiver station
 (BTS) karena pembatasan
 akan dilakukan oleh perusa-
 haan operator seluler.

"Ponsel ilegal yang sudah
 koneksi ke operator sebe-
 lum tanggal 18 [April 2020]
 masih bisa terhubung ke
 operator. Setelah itu, tidak
 bisa terhubung ke BTS
 karena sudah dibatasi oleh
 operator," ujar Janu kepada
 Bisnis, Rabu (19/2/2020).

Namun, langkah pembe-
 rantasan ponsel ilegal di
 Tanah Air ternyata tidak
 terlepas dan sejumlah tanta-
 ngan, salah satunya adalah
 penyalahgunaan nomor
 IMEI ponsel yang sudah
 tidak digunakan sehingga
 memunculkan IMEI zombie.

Sebagai informasi, ber-
 dasarkan data Indonesia
 Teknologi Forum (ITF), pere-
 daran ponsel ilegal di Indo-
 nesia tahun ini diperkirakan
 mencapai 30% dari total 50
 juta ponsel baru yang ma-
 suk, atau naik 10% dari total
 peredaran ponsel ilegal.

Namun demikian, Janu
 mengatakan perlu waktu
 agar sistem dapat berjalan
 dengan sempurna. Fas-
 alnya, sistem yang dibu-
 ngun dengan teknologi
 kecerdasan buatan juga
 memerlukan waktu untuk
 mengenali sistem yang di-
 erapkan sebagai pendeteksi
 nomor IMEI.

"Kemudian, IMEI black
 list akan di kirim ke Ke-
 merkominfo untuk diblokir
 melalui mekanisme yang di-
 sepekat," jelas Janu.

formasi Basis Data Nasional
 (SIBINA).
 akan terhat di Sistem In-
 jumlah- nya lebih dari satu
 sehingga nomor IMEI yang
 Allocation Code (TAC),
 akan memberikan type
 Association (GSMA) nandi
 for Mobile Communications
 taken pihak Global System

Sementara itu, data Asosiasi
 Ponsel Seluruh Indonesia
 (APSI) mengungkapkan dan
 yang masuk ke Indonesia
 setiap tahun, sebanyak 20
 persen-30 persen di an-
 taranya merupakan ponsel
 ilegal.

Tidak tanggung-tanggung,
 negara pun diperkirakan
 akan kehilangan pendapa-
 tan sebesar 10 persen dari
 PPN dan 2,5 persen PPh
 dan berpotensi mengala-
 mi kerugian sebesar Rp2,8
 triliun dalam setahun akibat
 peredaran ponsel ilegal.

Fenomena IMEI zombie,
 di mana produsen ilegal
 melakukan cloning ser- ha-
 dap ponsel yang sudah
 tidak digunakan, sudah
 menjadi perhatian pemerin-
 tah dalam beberapa waktu
 belakangan.

Langkah antisipasi pun su-
 dah disiapkan. Janu menga-
 takan pihak Global System



Prosedur (SOP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pos Kementerian Kominfo juga meminta penyalang Pos untuk tidak melakukan pengiriman barang yang telah dilarang berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah terkait dengan antisipasi penyebaran novel coronavirus.

Penyalang Pos juga dapat melaporkan kepada Badan Karantina, Bea dan Cukai serta instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan apabila ditemukan potensi jenis risiko penularan melalui barang, terutama jenis barang yang dapat menjadi media pembawa penyebaran Novel Coronavirus.

Kementerian Kominfo juga mengharapkan seluruh Penyalang Pos untuk terus berpartisipasi aktif mencegah penyebaran Novel Coronavirus atau Covid-19 agar tidak masuk ke Indonesia, terutama melalui kargo barang.

Kominfo Imbau Penyalang Pos Antisipasi Penyebaran Virus Korona

<https://www.kominfo.go.id>
<https://www.kominfo.go.id>
<https://www.kominfo.go.id>

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau kepada penyalang pos agar mengantisipasi penyebaran virus korona atau Novel Coronavirus (Covid-19) melalui pengiriman barang. Ditjen dari status resmi Kominfo, imbauan ini disampaikan kepada pimpinan Pos Indonesia, DPP Asperindo serta para pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan pos berdasarkan Surat tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pos Ikhwan Baldinus.

Imbauan tersebut berdasarkan tembusan bersama antara Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Badan Karantina serta PPI. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika.

Direktorat Pos mengajak penyalang pos untuk memperhatikan perkembangan yang sangat cepat dari kasus virus korona yang terjadi sejak Desember 2019 sampai saat ini. Dalam rangka antisipasi penyebaran melalui barang kargo pos, Direktorat Pos juga sampaikan beberapa hal penting.

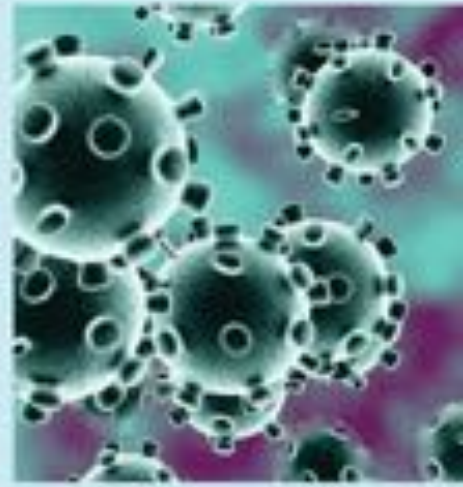
Penyalang Pos diharapkan dapat melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap barang-barang kargo yang dapat masuk ke Indonesia, terutama kargo dan Hongkong, serta negara-negara yang telah terdampak Novel Coronavirus. Dalam kegiatan operasional, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong, serta kargo impor agar menerapkan Standar Operasional

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau kepada penyalang pos agar mengantisipasi penyebaran virus korona atau Novel Coronavirus (Covid-19) melalui pengiriman barang. Ditjen dari status resmi Kominfo, imbauan ini disampaikan kepada pimpinan Pos Indonesia, DPP Asperindo serta para pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan pos berdasarkan Surat tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pos Ikhwan Baldinus.

Imbauan tersebut berdasarkan tembusan bersama antara Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Badan Karantina serta PPI. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika.

Direktorat Pos mengajak penyalang pos untuk memperhatikan perkembangan yang sangat cepat dari kasus virus korona yang terjadi sejak Desember 2019 sampai saat ini. Dalam rangka antisipasi penyebaran melalui barang kargo pos, Direktorat Pos juga sampaikan beberapa hal penting.

Penyalang Pos diharapkan dapat melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap barang-barang kargo yang dapat masuk ke Indonesia, terutama kargo dan Hongkong, serta negara-negara yang telah terdampak Novel Coronavirus. Dalam kegiatan operasional, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong, serta kargo impor agar menerapkan Standar Operasional



Kini Warga Teluk Wondanama Bisa Menikmati Akses Internet

laporan: <https://www.kompas.com/berita/2020/04/21/warga-teluk-wondanama-bisa-menikmati-akses-internet>

REPUBLIKA.CO.ID, TELUK WONDANAMA—Tidak cuma terhubung jaringan telepon seluler, masyarakat di kampung daerah pedalaman, pesisir juga beberapa wilayah terluar di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kini sudah bisa menikmati akses internet dengan mudah.

Sebanyak 15 tower base transceiver station (BTS) baru telah terpasang di 15 titik. Seluruhnya sudah menggunakan teknologi 4G.

"Pada 2019 ada 15 BTS yang sudah diangkapi dengan 4G bantuan dari kementerian. Jadi sekarang sebagian besar di daerah pesisir sudah dapat internet, juga di Yabore dan Inyora (kampung di pedalaman

diraik Naikere)," jelas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Teluk Wondama, Yohanes Lehitu, di Wasior, Selasa (4/2).

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD di gedung dewan di kompleks perkantoran Fenda di Ise, Senin (3/2).

Kepada jajaran Komisi C yang dipimpin Kemran Simadja, Anis, demikian panggilan karib Yohanes Lehitu menambahkan, secara keseluruhan sejak 2017, Pemkab Wondama telah mendapatkan bantuan 33 titik BTS dari Kementerian Kominfo.

Dia mencai, pada 2017 dibangun di 10 titik, 2018 delapan titik dan 2019 sebanyak 15 titik. Seluruhnya sudah berdiri dan hampir semuanya kini sudah berfungsi.

"Dan 33 itu, 15 sudah 4G dan nanti sisanya di 2020 akan di-4G-kan," ucap

mantan Kepala Sub Bagian Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Serda Teluk Wondama ini.

Sementara untuk tiga kampung yang masih terisolir di Distrik Naikere yakni Oya, Undurara dan Inyora, sudah terbangun BTS karena sudah terhubung jalan darat.

Sedangkan kampung Oya dan Undurara yang belum memiliki akses jalan darat, Kominfo akan mengaktifkan kembali alat komunikasi menggunakan radio SSB (single side band).

"Untuk Oya dan Undurara kita pakai radio ring supaya bisa dibantu dengan HT (handy talky). Peralatannya sudah siap tinggal kita tunggu helikopter untuk dibawa ke atas," kata Kepala Seksi Persandian Yakobus Sorbu.

Dia mencai, pada 2017 dibangun di 10 titik, 2018 delapan titik dan 2019 sebanyak 15 titik. Seluruhnya sudah berdiri dan hampir semuanya kini sudah berfungsi.

Menurut Menteri Johnny, perelaksanaan di Indonesia sangat memahami betul dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Namun kata Johnny, industri perelaksanaan ini perlu bertransformasi ke digital karena dunia perindustrian perelaksanaan semakin ketat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pelaksanaan migrasi televisi (TV) analog ke digital dapat dilakukan paling lambat pada 2024 mendatang.

"Indonesia saat ini tertinggal dan sejumlah negara di Eropa, Amerika, bahkan ASEAN dalam penerapan TV digital," tambah Menteri Kominfo. Padahal, Indonesia sudah cukup lama mempersiapkan rencana tersebut. Menteri Johnny menyebut salah satu penghambat rencana migrasi TV analog ke digital yakni belum terdapat payung hukum yang menaungi.





Menkominfo Sebut Tiga Manfaat Siaran Digital Bagi Industri Pertelevisian

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan tiga manfaat siaran digital bagi industri pertelevisian di Indonesia. "Pertama TV digital ini memiliki ruang dan validasinya yang meningkat. Ini bermanfaat bagi pertelevisian itu sendiri," kata Menteri Johnny di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/02/2020).

Kedua, lanjut Menteri Kominfo manajemen dan tata kelola sehingga referensinya lebih efisien. "Dan ketiga konsolidasi pertelevisian itu menjadi lebih baik. Karena untuk ruang pengelolaan bisnis secara teknologi lebih besar dan luas," tuturnya.



“Ketiga, pengguna data (data user) tersebut dapat menerima data yang akurat, tervalidasi, dan up to date, serta data tersedia pada saat dibutuhkan,” jelasnya.

Menteri Johnny mengatakan ada faktor krusial dalam tiga hal itu yaitu bagaimana mengatur perpindahan (flow) data yang berkaitan dengan bagaimana pemilik data bisa membolehkan data itu bisa berpindah (flow).

Menteri Kominfo mengatakan dalam RUU PDP juga akan mengatur bagaimana skema mengikat bagi pengguna data yang tidak sesuai dengan aturan sehingga para pelanggar tersebut dapat diberi sanksi.

luas dalam satu proses politik di DPR ini yang akurabel dan bajakana,” katanya.

Menurut Menteri Kominfo, RUU PDP saat ini dibutuhkan negara sebagai Undang-Undang yang melindungi data umum pribadi dan data spesifik pribadi. Menteri Johnny menyebutkan ada tiga hal pokok dalam pembahasan RUU PDP dengan Komisi I DPR RI.

Pertama, kedaulatan data (data sovereignty), sekaligus dengan pertahanan dan keamanan negara. Kedua, perlindungan terhadap pemilik data dalam rangka hak menyempatkan data, memperbarui (rights to be raised and rights to be forgotten).

“Kalau flow masih di dalam negeri, masih berada dalam yurisdiksi nasional. Tapi kalau perpindahan data lintas negara (*cross border data flow*) maka itu berhubungan atau berurusan dengan negara yang lain. Nah, di situ perlu juga diatur bagaimana agar data pribadi kita tidak tersebar begitu saja tanpa *concern* dari pemilik data itu.”

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku optimis Indonesia negara yang ke 127 yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sebab, DPR RI sudah siap membahas Rancangan Undang-Undang PDP dalam waktu dekat ini.

"Disampaikan (ke DPR) sudah ada 126 negara yang memiliki (UU PDP). Kita harus jadi negara yang ke 127 yang memiliki Undang-Undang PDP," kata Menteri Johnny di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (04/02/2019). Menteri Johnny menyebutkan RUU PDP ini sudah diajukan ke DPR RI melalui Komisi I. RUU PDP terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. "Isi RUU tersebut sangat spesifik yaitu menyangkut hak-hak yang bersifat sangat personal (privat). Karena itu, harus dibicarakan secara menyeluruh, secara luas, dan mengajak partisipasi publik yang

Menkominfo: Indonesia Harus Jadi Negara ke 127 Miliki UU PDP

3.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate bersama Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan kepada pekerja media di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (04/02/2019). - (AYH)

demokrasi. "Apalagi pers ini pilar penting demokrasi, dan demokrasi kita walaupun usianya baru tapi pilihan kita adalah demokrasi yang memang relevan dengan situasi kita dan bangsa, bermanfaat baik adanya bagi bangsa dan negara kita. Karenanya melihat pers saat ini, kita harus melihat pers saat ini, kita pakai kaca mata otoritarian, kita sudah di era demokrasi, regulasi dan payung-payung hukum yang disediakan saat ini mungkin belum sempurna, tetapi semangat dan landasan filosofinya adalah masuk ke era kebebasan," tambahnya.

Menteri Johnny juga mengajak seluruh ekosistem pers dan pihak-pihak yang terkait untuk secara bersama-sama bertanggungjawab dan meningkatkan kualitas kebebasan pers. Hal ini agar kehadiran pers semakin memberikan manfaat baik secara pribadi, komunitas masyarakat hingga untuk kepentingan bangsa dan negara. "Tantangannya pada saat kita masuk ke era yang bebas, tentu dengan lingkungan yang diterima secara umum, kita juga dihadapkan pada tantangan disruptif sekarang ini," ucap Menteri Johnny.

Selain Menteri Johnny, turut hadir sebagai narasumber HPN 2020 bersama Anugerah Adinegoro antara lain Tokoh Pers Nasional Itham Bintang, Ketua PWI sekaligus Penanggungjawab Hari Pers Nasional Atal S Depari, Anggota DPR RI Nico Sahana, anggota Dewan Pers Agus Sudoyo dan Ketua Panitia Adinegoro Rita Sri Hastuti. (ak)

"Tantangan pers adalah eksistensi industri pers itu sendiri, jadi dua komponen yang satu adalah semangat insan pers, di sisi yang lain teknologi dan kemajuan teknologi yang harus kita perjuangkan etiknya. Ini tantangan, kita harus menyusun regulasinya dan kita masuk ke era baru untuk kejayaan pers kita," tujuhnya saat menjadi Narasumber dalam Program Indonesia Bicara bertajuk Hari Pers Nasional 2020 bersama Anugerah Adinegoro, Gedung TVRI, Jakarta, Senin (03/02/2020).

Layaknya masyarakat global yang bertransformasi dan bermigrasi dari dunia fisik ke dunia digital, demikian juga era teritorial ke era ekstrateritorial. Menteri Johnny menjelaskan bahwa tantangan yang sama juga tengah dihadapi oleh industri pers saat ini, baik pers dalam lingkup global maupun di Indonesia.

"Pers juga mulai bermigrasi dan masuk ke era digital yang mengubah keseluruhan profilnya, maka tantangan eksistensinya menjadi relevan untuk kita bicarakan ke mana arah pers kita yang berkualitas di era 4.0 ini tantangan besarnya, tidak saja pers Indonesia, tetapi juga pers dunia di negara-negara dan bangsa-bangsa yang sudah menganut demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai acuannya," imbuhnya.

Menurut Menteri Kominfo, menyoal eksistensi dan koeksistensi pers Indonesia salah satunya karena dilihat dari pers sebagai pilar

Mentri Kominfo Johnny G. Plate bersama Tokoh Pers Nasional Iham Dianting (kiri), Ketua PWI sekaligus Penanggungjawab Hari Pers Nasional 2020 Atal S Depart (kedua dari kiri), Anggota Komisi I DPR RI Nico Sibaun (kedua dari kanan), Anggota Dewan Pers Agus Sudtyo (kedua dari kanan), Ketua Panitia Tetap Anugerah Adinegoro, Rita Sri Hastuti (kanan) dalam Program Indonesia Bicara bertajuk Hari Pers Nasional 2020 bersama Anugerah Adinegoro, Gedung TVRI, Jakarta, Senin (03/02/2020). - (AYH)

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia yang mengantar kebebasan pers, kebebasan berkumpu dan berpendapat di era reformasi semakin maju seiring perkembangan global. Namun, menurutnya, Pers Indonesia dari tahun ke tahun harus senantiasa meningkatkan kualitas.

Refleksi! HPN 2020, Menkominfo Dorong Pers Indonesia Tingkatkan Kualitas



**HARI PERS
NASIONAL 2020**
Bersama Anugerah Adinegoro

“Yang menggunakan internet apapun namanya, kita punya ada yang namanya patroli sber yang namanya patroli sber dilakukan 1x24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu nonstop untuk semua perilaku masyarakat dalam kaitan dengan hak-hak sipil, ketidapkapan sipil dan kekerasan sipil,” jelasnya.

Berdasarkan pemantauan yang intensif dilakukan, Kementerian Kominfo hingga saat ini telah memblokir sekitar satu setengah juta akun yang beredar di dunia maya. “Sebagai informasi, kita sudah take-down (memblokir) hampir satu setengah juta akun selama ini, dan mayoritas adalah yang terkait dengan pornografi, perdagangan seksual. Ini gak akan bisa berhenti kalau masyarakatnya gak berubah,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPAI Susanto bersama jajaran komisioner juga memaparkan penanganan perlindungan anak dan bahaya pornografi. KPAI juga banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pornografi daring yang merupakan salah satu kasus terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut KPAI, radikalisme, ujaran kebencian, pornografi daring dan bullying yang bebas sber menjadi tantangan Indonesia saat ini, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. (ak)

Kepada Komisioner KPAI, Menteri Kominfo menjelaskan dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perlindungan anak dari pornografi daring, yaitu teknologi dan literasi. “Ada dua hal, secara teknologi dan literasi. Secara teknologi perlu kita tahu bahwa over the top perusahaan, platform atau aplikasi yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, saya nggak bisa memutar, yang bisa dia sendiri yang memutar,” jelasnya.

Menteri Johnny menyontohkan situs pornografi Porn Hub. Pihaknya, pernah meminta pihak situs-situs dewasa untuk memblokir konten pornografi, salah satunya Porn Hub. Pemerintah dalam hal ini langsung meminta pemblokiran jika situs-situs dewasa itu menggunakan VPN.

“Yang saya bisa minta blokir langsung dan dilakukan pemblokirannya adalah yang menggunakan media over the top kita, internetnya, itu bisa kita blokir. Tapi kalau VPN-nya musti minta dia (pengelola situs pornografi) yang cabut, mana ada perusahaan yang cabut, itu barang dagangannya dia kok. Karenanya yang bisa kita cegah dari sisi kita yaitu edukasi dan literasi, tentu perlu juga secara teknologi tapi ada yang bisa ada yang gak bisa,” paparnya.

Menteri Kominfo menegaskan bahwa akan berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh perusahaan, platform atau aplikasi yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, saya nggak bisa memutar, yang bisa dia sendiri yang memutar,” jelasnya.

Menteri Johnny menyontohkan situs pornografi Porn Hub. Pihaknya, pernah meminta pihak situs-situs dewasa untuk memblokir konten pornografi, salah satunya Porn Hub. Pemerintah dalam hal ini langsung meminta pemblokiran jika situs-situs dewasa itu menggunakan VPN.

“Yang saya bisa minta blokir langsung dan dilakukan pemblokirannya adalah yang menggunakan media over the top kita, internetnya, itu bisa kita blokir. Tapi kalau VPN-nya musti minta dia (pengelola situs pornografi) yang cabut, mana ada perusahaan yang cabut, itu barang dagangannya dia kok. Karenanya yang bisa kita cegah dari sisi kita yaitu edukasi dan literasi, tentu perlu juga secara teknologi tapi ada yang bisa ada yang gak bisa,” paparnya.

Menteri Kominfo menegaskan bahwa akan berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh perusahaan, platform atau aplikasi yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, saya nggak bisa memutar, yang bisa dia sendiri yang memutar,” jelasnya.

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan edukasi dan literasi menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak dari ancaman dan bahaya pornografi dalam jaring (daring) atau online.

"Kalau tidak ada edukasi dan literasi yang terkoordinasi, kerjanya kita seperti pemadam kebakaran saja. Jadi edukasi dan literasi secara terkoordinasi menjadi penting dilakukan sebagai pihak yang terkait," tuturnya saat menerima kunjungan Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (03/02/2020) pagi.

1. Menkominfo: Edukasi dan Literasi Penting untuk Lindungi Anak dari Pornografi Daring



Tips UKM Memulai Bisnis Online, Sisters!

Hi Sisters! Dengan melakukan berbagai cara untuk memulai bisnis UKM menjadi semakin populer dan tahun ke tahun dan populasinya semakin meningkat. Hal tersebut menjadi hal yang positif. Sebab semakin banyaknya pengusaha yang tumbuh, akan semakin maju perkembangan ekonomi di sebuah negara, apalagi kalau usaha yang dijalani sukses dan memperoleh banyak keuntungan.

Beberapa cara dapat dilakukan untuk memulai bisnis UKM mulai dari hal kecil hingga besar. Jika kamu bingung apa strategi yang tepat untuk meningkatkan keuntungan bisnis UKM, berikut adalah sejumlah caranya, Sisters!

1. Memilih Produk Sesuai dengan Target Pasar

Dengan mengetahui target pasar yang sesuai, memungkinkan produk yang kamu jual lebih cepat meningkat penjualannya dan membantu dalam mengembangkan produk. Tidak hanya itu, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik akan mendorong customer loyalty. Ingat, 65% dari keuntungan sebuah perusahaan berasal dari para pelanggan setia, Sisters!

2. Membuat Konten yang Menjual, Menarik Bagi Calon Pembeli

Sisters, pelajari bagaimana cara membuat artikel atau konten website yang menarik adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk bergerak maju di dunia digital ini. Tidak hanya artikel juga gambar, foto dan video. Kombinasi dan artikel, foto, dan video yang dikemas dengan teknik *story telling* merupakan kombinasi tak terpisahkan yang menjanjikan keberadaan di hasil mesin pencari.

3. Bangun Brand Image di Sosial Media

Salah satu cara untuk membangun brand image yang cukup cepat adalah dengan memanfaatkan media sosial. Sisters, kita bisa mencoba menerapkan komunikasi melalui media sosial. Mengingat arus informasi yang bisa sangat cepat disebarkan, maka media sosial juga akan ikut andil dalam membangun brand image dari bisnis yang sedang kita jalankan, *bro!*

Semoga tips diatas ini bermanfaat untuk kamu yang sedang membangun bisnis online, Sisters!





Begini Cara Mudah Membuat Business Plan Untuk UKM-mu

Rencana bisnis penting bagi pelaku bisnis sebab memberikan informasi tentang kejelasan bisnis yang akan akan dikerjakan, detail pasar, cara memasar-kan bisnis, menggal ide awal, mengenal struktur dan strategi bisnis, termasuk juga pesang.

1 Perhatikan komponen-komponen utama dalam rencana bisnis

Lantas, siapa yang membutuhkan rencana bisnis ini? Tentu saja semua pelaku bisnis, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Bagaimana membuat rencana bisnis untuk UKM? Membuat rencana bisnis untuk tentu tak serumit perusahaan skala besar. Sebab, lingkup kegiatan usahanya tak sebesar dan sekompleks korporasi. Berikut tips membuat rencana bisnis untuk UKM.

Sisters, bisnis tak hanya membutuhkan modal, tetapi juga perencanaan yang matang. Dengan adanya rencana bisnis (business plan), bisnis tersebut dapat dijalankan secara terstruktur dan sistematis sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis dapat dipahami sebagai pernyataan yang sifatnya formal mengenai alasan dan tujuan pendirian suatu bisnis serta strategi-strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis tak ubahnya cetak biru (blue print) dari bisnis yang akan dirintis dan dijalankan.

Sisters, pada prinsipnya bisnis harus dirancang secara matang agar mampu mencapai secara matang agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab itulah penting dibuat rencana bisnis untuk menggambar secara keseluruhan tentang aspek-aspek bisnis yang telah atau akan dijalankan. Semangat, ya!

2 Buatlah ringkas dan informatif

Kamu tak perlu membuat rencana bisnis secara terperinci. Kamu bisa menjelaskan setiap komponen utama dalam garis besarnya saja. Sementara untuk detailnya, kamu bisa menjelaskan secara lisan dalam diskusi atau saat mempresentasikannya di depan pelanggan, calon mitra atau karyawan, atau investor. Sisters.

3 Gunakan media yang sesuai

Sisters, kepada siapa rencana bisnis ditujukan mempengaruhi pemilihan media untuk membuat rencana bisnis. Contoh, media slide show digunakan jika kamu ingin mempresentasikan bisnis pada calon mitra, pelanggan, dan bahkan investor.



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Atas segala perhatian dan kerjasama dan pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Aamin.

Demikianlah Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Peindungan Data Pribadi ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya RUU Peindungan Data Pribadi ini dalam memberikan peindungan terhadap kedaulatan negara, keamanan negara, dan peindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia, besar harapan kami kiranya RUU ini dapat segera dibahas bersama Pemerintah dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
 Hadiri yang kami hormat,

Untuk memastikan efektifitas penerapan hukum peindungan data pribadi, RUU ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan/pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sanksi pidana dijatuhkan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
 Hadiri sidang yang bertahap,

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan: (1) persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi; (2) pemenuhan kewajiban perjanjian; (3) pemenuhan kewajiban hukum; (4) pemenuhan peindungan kepentingan yang sah (vital interest) Pribadi; (5) pelaksanaan kewajiban peindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau (7) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai Undang-Undang.

Perbedaan dan konsistensi data pribadi.
 Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan: (1) persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi; (2) pemenuhan kewajiban perjanjian; (3) pemenuhan kewajiban hukum; (4) pemenuhan peindungan kepentingan yang sah (vital interest) Pribadi; (5) pelaksanaan kewajiban peindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau (7) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai Undang-Undang.

Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Langkah kewajiban baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti: (1) menjaga kerahasiaan data pribadi; (2) melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, termasuk menjaga data pribadi secara tidak sah; (3) melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi; (4) melakukan pemrosesan aktivitas pemrosesan data pribadi; dan (5) menjamin akurasi, kelengkapan, dan (7) hak untuk menuruti dan menerima ganti rugi.

pelindungan data pribadi, hak pemilik data pribadi, syarat sah pemrosesan data pribadi, dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi.

RUU Pelindungan Data Pribadi juga memuat aspek-aspek penting pengaturan pelindungan data pribadi yang termasuk dalam peraturan pelindungan data pribadi di berbagai negara, dan telah diratifikasi dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor. Dengan demikian, pemerintah berpendapat RUU Pelindungan Data Pribadi ini akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan pelindungan hak asasi manusia, serta mengatur pemrosesan data pribadi baik didalam negeri maupun lintas batas negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Hadirin sidang yang berbahagia,

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. RRU ini memiliki jaminan yang mencakup peraturan hukum yang berlaku di dalam wilayah Indonesia atau berdampak bagi warga negara Indonesia. akbar hukum di dalam wilayah Indonesia atau berdampak bagi warga negara Indonesia.

Secara umum, lingkup pengaturan RRU Pelindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk hukum). RRU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang: (1) jenis data pribadi; (2) hak pemilik data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; (5) transfer data pribadi; (6) sanksi administratif; (7) larangan dalam penggunaan data pribadi; (8) pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi; (9) penyelesaian sengketa dan hukum acara; (10) kerja sama internasional; (11) peran pemerintah dan masyarakat; dan (12) ketentuan pidana.

Dalam RRU ini, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data tentang seseorang baik yang terdapat dalam atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya terdapat dalam atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik". Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan / atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data biometrik, data genetik, data kesehatan, dan data keuangan pribadi maupun data lainnya yang spesifik.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, RRU Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip, antara lain:

Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.

Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, penarikan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Kemapat, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.

Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam RRU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemilik

RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU Pelindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Secara yuridis, pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan Pasal 28 H ayat (e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,

Sebagaimana diketahui bahwa RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.

Rujukan kita pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka penyempurnaan Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi).

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,

Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

MENYERTAKAN PERBENTAHAN
 MENGENAI
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG
 TENTANG
 PELINDUNGAN DATA PRIBADI
 Jakarta, 25 Februari 2020
 Nomor: S-01/MINDA/INFORM/001/02/2020



WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY
LINKING WSIS ACTION LINES
WITH SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS



Sekedar carian, pada 2017 insiatif Indonesia "Internet Sehat" (Insemetehat.id) dari ICT Watch menjadi juara pertama untuk kategori ethical dimension. Kemudian pada 2018 karya dari Kementerian Kominfo, Portal Indonesia Baik (IndonesiaBaik.id) menjadi juara pertama untuk kategori media. Adapun untuk WISIS Prize 2020 ini, Untuk memperluas kaitan antara 17 lini aksi WISIS dengan 17 tujuan SDG, PBB telah membuat matriks WISIS – SDG untuk memudahkan membacanya. Dapat diakses di <http://www.wisid/wisid/wisidg/>. Matrik ini untuk memberikan panduan kepada para pemenang kepingan untuk menfasilitasi

dan mengintegrasikan TIK ke dalam kerja-kerja pembangunan dengan target yang telah ditetapkan bersama. Pun dokumen Matriks WISIS – SDG ini adalah alat baru yang dikembangkan oleh sejumlah lembaga PBB berdasarkan keahlan dan mandat mereka untuk memetakan bagaimana TIK dapat berkontribusi pada implementasi SDGs sekagesu berfungsi sebagai referensi mudah bagi pemenang kepingan TIK untuk turut berperan serta dalam upaya mencapai target pembangunan di negara masing-masing sebagaimana dipecahkan dalam SDG, semisal terkait dengan target pendidikan, kesetaraan gender, infrastruktur (akses universal dan keterjangkauan ke Internet) dan sebagainya.

Please read the complete document at www.wisid.org/tdg

SDG	WISIS Action Line	WISIS Action Line	WISIS Action Line
1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3
2	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3
3	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3
4	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3
5	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3
6	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3
7	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3
8	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3
9	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3
10	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3
11	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3
12	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3
13	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3
14	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3
15	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3
16	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3
17	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3

SDG	WISIS Action Line	WISIS Action Line	WISIS Action Line
1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3
2	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3
3	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3
4	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3
5	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3
6	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3
7	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3
8	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3
9	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3
10	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3
11	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3
12	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3
13	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3
14	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3
15	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3
16	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3
17	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3

Sedangkan berikut ini adalah 17 tujuan yang telah ditentukan PBB dengan target waktu pencapaian tahun 2030: 1) No poverty, 2) Zero Hunger, 3) Good health and well-being, 4) Quality education, 5) Gender equality, 6) Clean water and sanitation, 7) Affordable and clean energy, 8) Decent work and economic growth, 9) Industry, innovation and infrastructure, 10) Reduced inequalities, 11) Sustainable cities and communities, 12) Responsible consumption and production, 13) Climate action, 14) Life below water, 15) Life on land, 16) Peace, justice and strong institutions, dan 17) Partnerships for the goal.

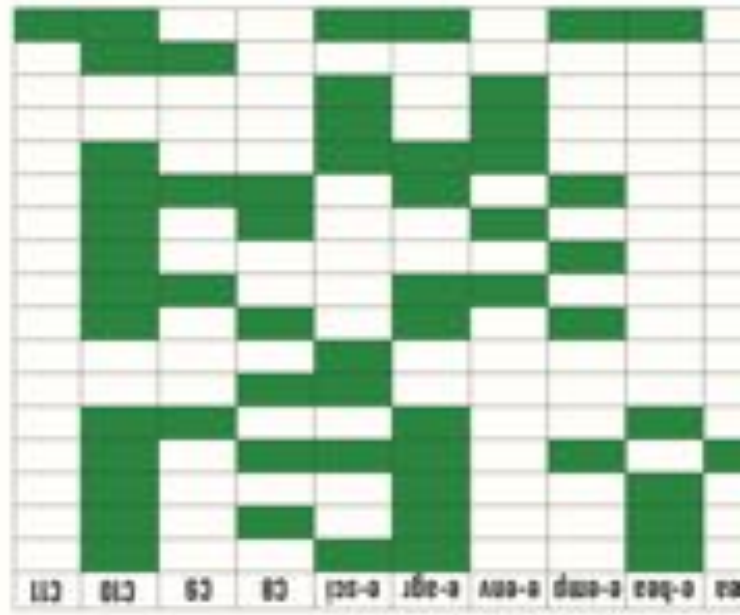
Dalam kompetisi ini, insiator ataupun inovator dari Indonesia akan mendapatkan pengalaman berkompetisi secara internasional dengan pengakuan keunggulan secara global. Karya/nisiatif pemenang juga akan tercatat di situs yang dikelola PBB, serta dapat diakses terbuka oleh siapapun. Lun yang dibagikan pun adalah para pakar yang berketerampilan internasional. Dengan jura tentu saja sudah melalui penilaian dengan standar terjaga dan merupakan pilihan dari beragam karya/nisiatif terbaik yang datang dari mancanegara. Secara umum, kriteria penilaian yang diterapkan dengan ketat pada kompetisi WSIS Prize ini adalah sebagai berikut berikut: (a) hasil yang dicapai dan dampak yang dihasilkan, (b) pemberdayaan komunitas, (c) relevansi dengan SDG, (d) kemampuan proyek, (e) untuk dipublikasi, (f) keberlanjutan proyek, (g) nilai-nilai WSIS dalam masyarakat.

Berikut ini 11 Action Lines yang kemudian menjadi total 18 kategori pilihan dalam kompetisi WSIS Prize: 1) The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development, 2) Information and communication infrastructure, 3) Access to information and knowledge, 4) Capacity building, 5) Building confidence and security in the use of ICTs, 6) Enabling environment, (a) ICT applications (7a) e-Government, 7b. e-Business, 7c. e-Learning, 7d. e-Health, 7e. e-Employment, 7f. e-Environment, 7g. e-Agriculture, 7h. e-Science), 8) Cultural diversity and identity, linguistic diversity, 9) media, 10) Ethical dimensions the Information Society, dan 11) International and regional cooperation.

Untuk kemudian memastikan bahwa pembangunan, pemanfaatan dan pemberdayaan TIK bisa sejalan dengan kepedulian agenda pembangunan bersama negara-negara di dunia sebagaimana terdapat dalam dokumen SDG, maka dibuatlah mekanisme unik untuk mengidentifikasi dan menampilkan kisah sukses dalam dan berbagai negara dan pemerintah kepedulian. Maka ditetapkan agenda kompetisi tahunan WSIS Prize untuk kali pertamanya pada tahun 2012. WSIS Prize dikembangkan sebagai tanggapan atas permintaan para pemangku kepentingan WSIS untuk melakukan mekanisme yang efektif dalam mengapresiasi karya dan nisiatif bidang TIK guna memajukan pembangunan. Untuk itu, acuan penilaian yang dipakai nanti akan berkaitan erat dengan WSIS Action Lines (Lini Aksi) dan SDG.

WSIS Action Lines adalah semacam panduan umum berisi 11 hal yang diapresiasi oleh negara-negara anggota PBB tentang bagaimana membangun dan mengimplementasikan TIK di sejumlah sektor. Sedangkan SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah 17 tujuan terukur dengan batas waktu yang telah ditetapkan PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk memastikan manusia dan planet bumi.

Tentang WSIS Prizes



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 14	SDG 15	SDG 16	SDG 17	
C1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
e-gov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
e-bus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

dengan pemimpin dunia lainnya, pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG) sebagai

keperluan pembangunan global. SDG berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Bila SDG memiliki 17 tujuan, maka

SDG sejatinya memiliki 17 misi yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip kunci di atas.

Maka setiap tahunnya, sekitar bulan April, sejumlah perwakilan pemerintah kepington dari berbagai negara, termasuk Indonesia, hadir pada Forum WISD di Jenewa untuk memberikan paparan tentang capaian-capaian yang telah dilakukan terkait dengan pemertaan TIK. Para delegasi dapat saling memberikan inspirasi, melakukan instalasi pertukaran pengetahuan hingga melakukan pertemuan tingkat tinggi terkait dengan kerjasama yang selaras dengan transformasi digital. Dalam pelaksanaan Forum WISD tersebut, salah satu agenda yang menarik adalah terkait pengumuman pemenang kompetisi tahunan WISD Prizes.

dipimpin langsung oleh Menteri Kominfo Syamsul Mu'arif. Adapun prinsip-prinsip kunci (key principles) yang diuraikan dalam WISD tersebut adalah:

"Kami berted dalam upaya kami untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari peluang yang dapat ditawarkan oleh TIK. Kami sepakat bahwa untuk memenuhi tantangan ini, semua pemangku kepentingan harus bekerja bersama untuk meningkatkan akses ke infrastruktur dan TIK serta informasi dan pengetahuan; membangun kapasitas; meningkatkan kepercayaan diri dan keamanan dalam penggunaan TIK; menciptakan lingkungan yang memungkinkan di semua tingkat; mengembangkan dan memperluas aplikasi TIK; menumbuhkan dan mengharmonisakan keberagaman budaya; mengenali peran media; membahas dimensi etis dan Masyarakat Informasi; dan mendorong kerja sama internasional dan regional." (Deklarasi selengkapnya dapat dibaca di <https://www.itu.int/net/wisd/doc/geneva/affid/afidop.htm>)

Secara lebih detil, dokumen deklarasi tersebut berupaya memetakan bahwa pemertaan dan pemberdayaan TIK oleh siapapun dari negara maupun tetap mengacu pada tujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif dengan menekankan pendekatan pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder), yaitu kolaborasi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis. WISD juga kemudian memastikan penggunaan TIK menjadi pilar tercapainya target-target agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB, yaitu Millennium Development Goals (MDG) pada tahun 2000 sampai dengan 2015, yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG) untuk tahun 2016 sampai dengan 2030. Mengatakan WISD dengan MDG dan lintas SDG, tak lain adalah berujung untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat semaksimal dan seoptimal mungkin menjadi faktor pemungkin (enabler) dalam membangun kesejahteraan masyarakat dunia secara inklusif dan non-diskriminatif.

Tentang SDG, Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, bersama

Sekilas Tentang WISIS & WSIS Prizes

Oleh : Dony BU
donnybu@iitb.ac.id

Transformasi masyarakat dunia lantan meluas dan menguatnya pematangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sejumlah aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan maupun hak asasi manusia (HAM), ternyata tak saja dianggap hal yang positif, tetapi juga rentan menimbulkan masalah baru bilamana tidak disertai dengan bijak. Transformasi digital tersebut, jika kita ingin meningkatkan kualitasnya, sejatinya adalah tentang bagaimana masyarakat dunia dapat mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul. Sedangkan dimulai sejak satu dekade terakhir pada penghujung abad ke-20, sejumlah masyarakat dan pemerintah negara maju telah memulai melakukan transformasi digital, sedangkan di negara lainnya masih ditemukan adanya kesenjangan digital yang kritical.

Kesenjangan ini bisa terkait kesempatan pada aspek modal (misal: daya beli layanan TIK), teknikal (misal: kemampuan penggunaan TIK)

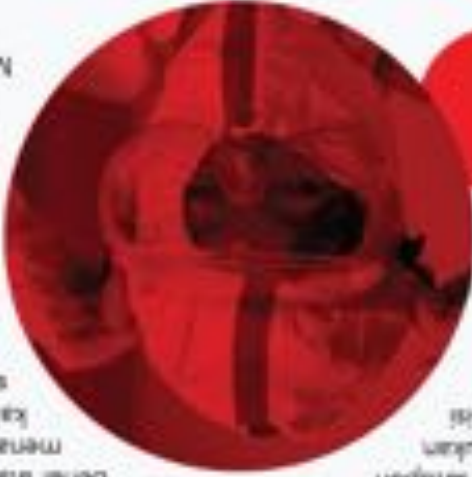
atau pun kultural (misal: kesetaraan gender pada TIK). Jika ini dibiarkan, tentu saja akan tercipta kelas-kelas sosial baru di masyarakat dunia yang kian dipisahkan jurang lebar, antara mereka yang dapat memanfaatkan manfaat TIK dengan baik versus mereka yang harus tercek-cek menganggap akses TIK yang paling dasar merupakan "kolonialisme" baru justru akan tumbuh subur tanpa terkendali karena adanya TIK, alih-alih sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dunia secara non-diskriminatif.

Maka organisasi global Penetapan Bangsa-Bangsa, yang ternyata telah cukup lama memberikan perhatian khusus terkait hal ini, kemudian pada Desember 2003 di Jenewa dan dilanjutkan pada November 2005 di Tunisia melakukan Pertemuan Puncak Masyarakat Informasi Dunia, atau the World Summit on the Information Society (WSIS). Kita itu, delegasi dari Republik Indonesia pun turut hadir.

● Virus Corona Ditemukan di Ayam Broiler

Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa virus corona ditemukan di ayam broiler, dalam narasinya juga menghibrida agar berhati-hati dalam mengonsumsi ayam broiler.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya informasi tersebut tidak benar adanya. Pada tanggal 1 Februari 2020, di tengah wabah Coronavirus yang mematahkan, muncul lagi wabah virus flu burung H5N1. Namun tidak ada satupun kasus setiap unggas yang ditemukan positif terkena virus Corona. Di sisi lain, virus corona berbeda dari Avian Influenza (H5N1), yang dapat diobati pada manusia dengan obat anti-virus yang berbeda. H5N1 tidak menular di antara manusia dan jarang menyebar ke manusia.



● Satu Warga di Toraja Utara Terjangkit Virus Corona

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp berisi informasi di Toraja Utara, tepatnya di Tondong sudah ada pasien dengan virus Corona dan sementara diisolasi di rumahnya dan sementara dapatkan nuangan khusus RSUD Lakkedada.

Dianter dari makassartribunews.com, Direktur RSUD Lakkedada Dr Syafar menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Dr Syafar

menanyakan "bisa-bisanya dia tahu kalau RS Lakkedada sedang sapkan skenario penanganan untuk pasien suspect terinfeksi Corona", Menurut Dr Syafar, jika memang benar, pasien tersebut tidak akan langsung ditangani RSUD Lakkedada, pasalnya di Toraja Utara juga terdapat sejumlah rumah sakit seperti RS Elm, Pontingku, dan Marampak.

● Thailand Berhasil Sembuhkan Pasien Virus Corona dengan Ganja

Beredar di media sosial Facebook, sebuah artikel berita dengan judul "Thailand Berhasil Sembuhkan Pasien Virus Corona dengan Ganja."

Dianter dari cekdata.tempo.co, informasi yang beredar bahwa Pemerintah Thailand berhasil menyembuhkan pasien Virus Corona Wuhan dengan ganja merupakan narasi yang tidak benar. Adapun obat yang digunakan para Dokter di Thailand untuk mengobati pasien Virus Corona Wuhan, yaitu obat anti-HIV dan obat anti-HIV, obat tersebut tidak mengandung ganja. Selain itu, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ganja bisa menyembuh Virus Corona Wuhan.

Telah beredar postingan di media sosial yang berisi informasi terkait daftar makanan dan beberapa lokasi yang terkontaminasi oleh Virus Corona di Australia.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Badan Kesehatan Negara Bagian New South Wales (NSW Health) yang mengatakan bahwa pesan yang beredar terkait larangan pada daftar makanan tersebut adalah hoaks. Larangan kunjungan ke daerah tertentu di New South Wales karena virus corona juga adalah hoaks. NSW Health juga menegaskan bahwa informasi dalam postingan tersebut bukan berasal dari pihaknya atau entitas apa pun yang berhubungan dengan pihaknya.

Berdar postingan yang berisi "Serangan virus Corona yang mematikan telah masuk ke Indonesia melalui para emigran China melalui 19 Bandara di wilayah Indonesia," Rakan Dokter Indonesia (RDI) menulis baru 1 bandara yang ketahuan terpepar virus Corona."

Faktanya video yang menjadi rujukan postingan tersebut tidak ada kaitannya. Video itu berasal dari Berdatas yang hanya menyampaikan data dan Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak 19 wilayah berisiko tinggi terular virus Corona. Hal itu lantaran wilayah tersebut memiliki akses langsung dan ke Tiongkok. Terkait klaim bahwa virus Corona telah masuk ke Indonesia melalui 19 bandara di Indonesia adalah salah karena per Senin 10 Februari 2020 belum ada apapun kasus pasien positif terinfeksi Corona atau meninggal karena virus Corona di Indonesia.

Serangan Virus Corona Telah Masuk ke Indonesia Melalui 19 Bandara di Indonesia

Berdar foto yang memperlihatkan kru pesawat dan sejumlah petugas medis bandara Sam Ratulangi International Airport, Manado, berkerum di garbarata, tepatnya di muka pintu pesawat bagian depan. Diibutkan, petugas medis yang menggunakan rompi kuning tengah memaka tujuh orang penumpang Lion Air yang positif terinfeksi virus korona.

Faktanya hal tersebut telah dilantasi oleh pihak Lion Air. Diantar Kompas.com, melalui artikel berjudul "Lion Air: 7 Penumpang Asal China yang Tiba di Manado Negatif Virus Corona" dimuat pada Minggu 26 Januari 2020. Corporate Communications Strategic Lion Air Dengan Manado Prihatino memastkan, tujuh penumpang Lion Air tersebut negatif virus korona.

7 Penumpang Lion Air di Manado Positif Terinfeksi Virus Corona



Berdar di media sosial sebuah pesan yang memberikan informasi agar masyarakat menggunakan masker karena ada seorang pasien yang sudah terjangkit virus Corona di RSUD Kabupaten Bekasi. Dalam pesan tersebut sumber informasi berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Faktanya setelah dilakukan penelusuran Humas Pemkab Bekasi melalui akun Instagram-nya @humas_kab_bekasi memastkan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi @dinkeskabekasi menyatakan tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut dan tidak ada pasien di RSUD Kabupaten Bekasi yang terkena virus Corona.

Ada yang Terjangkit Virus Corona di Kabupaten Bekasi

Menyebarnya HOAKS Corona

● China Minta Persetujuan Bunuh 20 Ribu Pasien Virus Corona

Berdar sebuah artikel berita yang berjudul "China Minta Persetujuan Pembunuhan Lebih dari 20.000 Pasien Virus Corona untuk Menghindari Penyebaran Virus Lebih Lanjut"

Faktanya, kalm yang diunggah situs ab-tc.com bahwa China meminta persetujuan untuk menahbi 20 ribu pasien untuk mengendalkan wabah Virus Corona (2019-nCoV) tersebut sama sekali tidak disertai bukti pendukung, khususnya soal dokumen pengadilan. Temuan para pencari fakta dari sejumlah negara juga membantah kalm tersebut. Malah sebagian karena reputasi situs ab-tc.com yang beberapa kali menyebarkan berita hoaks sebelumnya

● Virus Corona Berasal dari Cula Badak

Telah beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa virus Corona berasal dari penggunaan cula badak

Setelah diteliti lebih lanjut, Profesor Wolfgang Preiser Ahli Patologi dan Kepala Virologi Medis untuk Universitas Stellenbosch mengatakan bahwa walaupun sumber infeksi dari virus corona belum ditemukan, tapi tidak mungkin berasal dari cula badak. Virus itu membutuhkan sel hidup untuk bereplikasi, sedangkan cula badak tidak ada sel hidup karena sudah mati.

● Kokain Ampuh Hancurkan Virus Corona

Berdar di media sosial sebuah gambar potongan video breaking news yang mengklaim jika kokain adalah penawar baru untuk virus Corona.

Diklar dari asehtribunews.com bahwa berita tersebut adalah hoaks. Gambar dan isi berita merupakan gambar yang sengaja dibuat untuk disebarkan. Kenyataannya, sampai saat ini belum ada obat bagi virus Corona. Jika benar ada obat untuk virus Corona, tentunya bukan dari narkoba stimulan seperti kokain.



Bayangkan jika pemerintah Cina tidak punya kuasa atas data sederhana semacam data perjalanan seperti itu. Atau bayangkan juga jika data tersebut dikuasai oleh pihak lain, baik swasta maupun entitas negara lain. Apakah bisa terjadi jika data-data dikuasai, mulai dari sekedar penyediaan untuk mengirim materi pembelajaran, sampai ke penyediaan untuk data perang atau konflik. Langkah dalam situasi kritis ini, semua batu membuat menyelamatkan dunia berbekal data. Beberapa perusahaan teknologi Cina telah mengemb- bangkan aplikasi untuk mem- bantu orang memrika apakah mereka telah menggunakan perbandingan atau keta yang sama dengan pasien virus yang dikonfirmasi, mengumpukan data dari daftar yang diterbitkan oleh media pemerintah (Japan Times, 8 Februari 2020). Dengan penguasaan atas data dan penggunaan yang te- pat, harus diakui, pemerintah Cina sejauh ini relatif berhasil menyelamatkan jutaan nyawa populasinya.

Negara kita juga harus siap untuk memanfaatkan data se- bagai alat bantu dalam menda- ngun ekonomi dan mengata- kti-kritik. Kuncinya adalah penguasaan, pengaturan, dan pemanfaatan data yang baik.



Jalan ke Wuhan --kota yang merupakan jantung kritis virus corona di Cina-- berujung ketika potol muncul di pintu beba- pa saat setelah dia sampai ke rumahnya, dan meminta untuk memeriksa suhu tubuhnya. Padahal pria yang telah meng- karantina dirinya di rumahnya di Nanjing, Provinsi Jiangsu, tersebut merasa tidak pernah membentahi laporan tentang perjalanannya yang baru-baru ini ke Wuhan. Tetapi dengan menelusuri data perjalanan dari Wuhan, pemerintah setempat dapat mengidentifikasi dia dan mengirim petugas ke rumah nya.

Untuk menggoakan ke gawang legiatif, Kita harus menjadi tim yang terlibat semua. Bukan hanya "star" yang menguasai teknik membodol gawang yang dibutuhkan bantumannya, namun juga yang berkecenderungan sebagai "playmaker" atau juga "bek" dan penjaga gawang agar tak kebobolan.

Jika "gol" maka kita akan men- jadi negara ke-5 di ASEAN atau ke-127 dunia yang memiliki UU PDI. Ya, negara-negara lain memang sudah banyak yang memiliki terobos dini. Karena apa? Karena dunia sudah me- nyadari pentingnya data dalam bisnis, sekaligus pentingnya bisnis data, dalam ekonomi yang makin digital. Jargon "data adalah ladang minyak baru" sudah sejak lama terin- teralisasi dalam benak mereka. Selain bisnis, pertandingan data juga berlangsung erat dengan kedaulatan negara. Ini pula yang menjadi concern utama kita dalam mendorong penge- rahan UU PDI. Data soveregn- ty atau kedaulatan data sangat terkait dengan keamanan ne- gara. Oleh sebab itu kita harus memiliki kendali sepenuhnya atasnya.

Apa pentingnya kuasa atas data dalam era digital ini? Seorang pria yang baru saja melakukan per-



Kuasa Atas Data

Jika ada undang-undang Indonesia yang paling ditunggu-tunggu dunia, maka kemungkinan besar itu adalah UU tentang perlindungan data. Apa urusan negara lain terhadap regulasi domestik ini? Saya baru kembali dari World Economic Forum di Davos, bertemu dengan banyak eksekutif perusahaan global. Ada CEO YouTube, Susan Wojcicki; ada VP Global Policy dari Amazon Web Service, Michael Purke; ada Chief Executive of Hong Kong, Carrie Lam; dan lain-lain. Diskusinya banyak terkait dengan pembatasan industri internet dan hulu telekomunikasi di Indonesia. Salah satu yang penting dalam diskusi tersebut adalah tersedianya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang relevan, investasi di bidang data dan telekomunikasi oleh korporasi global sudah siap, tapi juga menunggu regulasi dan tersedianya UU Perlindungan Data.

Selama ini kalangan bisnis luar dan dalam negeri bertanya-tanya tentang apakah nanti prinsip GDPR (General Data Protection Regulation) yang berlaku di Eropa dan diterapkan untuk perusahaan di seluruh dunia akan diberlakukan juga di Indonesia. Keingintahuan itu lebih kurang menunjukkan bahwa saat ini investasi-investasi di bidang data, telekomunikasi dan informatika, sudah siap berlalu. Namun masih menunggu regulasinya dan tersedianya undang-undang perlindungan data di Indonesia karena akan sangat menentukan iklim dan putrinya bisnis mereka nantinya.

Saya yakin begitu disahkan, investasi dalam bidang data dan TIK akan segera membanjir ke Indonesia karena kepastian bisnisnya terjamin. UU ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang perlindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Saat ini masih RRU PDP telah disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, Presiden menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam membahas RRU PDP dengan DPR RI. Dengan pembahasan itu, konstitusi harus "light" dalam memperjuangkan pengesahan. Kita butuh kerja sama baik tim sepakdolan

Daftar Isi

- 2 Surat dari MMB 9
Lamba Hoaks
- 4 Perspektif
Mentori
- 6 Liputan Khizan
- 9 Portal
- 18 Sorotan Media
- 30 Resensi
Buku
- 35 Lintas
Kominfo
- 38 Agenda Presiden
- 50 Opini
- 68 Liputan Utama
RUU Pertindungan
Data Pihak di
Indonesia
- 72 RUU PDP
& Merdeka Data Kita

Pelindungan Bukan Pelindungan

"Kami berharap Pelindungan Data Pribadi dapat menjadi Undang-Undang pertama yang dibahas dan dihasilkan bersama DPR dan Pemerintah di tahun 2020," ujar Menteri Johnny G. Flate pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (25/02/2020). Nada optimis bercampur harapan tersebut bergambar jelas dalam penjelasan lengkap pemerintah kepada Menteri Johnny di hadapan sekitar 30 orang anggota Komisi I yang hadir.

Sebelumnya, naskah RUU PDP telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Presiden pun telah menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Mian

terti Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI. Menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, Menteri Johnny bergerak cepat. Selasa, 4 Februari 2020, bertempat di ruang pimpinan DPR RI, digelar pertemuan konsultasi antara Menteri Kominfo dengan Ketua DPR RI dan pimpinan DPR RI serta Komisi I pada media.



usi pertemuan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan RUU PDP harus dibahas terbuka. "Jangan kemudian menubuhkan persepul publik yang kemudian negatif, jangan sampai timbul draf atau daftar inventarisasi Masalah (DIM) oleh fraksi-fraksi di DPR RI, rapat kerja dengan agenda penyempurnaan padangan umum fraksi atas RUU PDP, pembentukan Panitia Kerja (Panja), rapat-rapat pembahasan tingkat Panja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, DPR RI. Raker pengambalian keputusan Tingkat I, dan terakhir dengan Rapat Paripurna DPR RI.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangrepan bersama Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Mariani F. Barata dan jajaran akan sibuk dengan pembahasan RUU PDP ini. Begitu juga Direktur Jenderal ICW Widodo Mulyo juga akan ikut ambil bagian dalam sosialisasi naskah RUU agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Termasuk literasi mengenai manfaat data pribadi.

Oh ya, RUU yang kita bahas ini judulnya adalah Pelindungan Data Pribadi, bukan Pelindungan Data Pribadi. Itu kata Asli Bahasa, kita jadi saja. Nah keseluruhan proses pembahasan RUU dan muatan materi RUU PDP serta penjelasan lengkap pemerintah mengenai RUU PDP kami ketengahkan di edisi ini.

Sekarang membaca!

Ferdandus Setu
 Ptl. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
 @Fsetu @Fsetu FSetu TV

PRIORITASI

Data Pribadi



Edisi 14
Februari 2020